

No. Reg: 211070000045370

LAPORAN PENELITIAN



JUDUL PENELITIAN PERAN PTKIN DALAM MEWUJUDKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI ACEH

Ketua Peneliti

Dr. Safrilsyah, S.Ag, M.Si

NIDN: 2020047001

NIPN: 197004201997031001

Anggota:

1. Dr. Fuad, S.Ag, Hum

2. Maimun Fuadi, M..Ag

Klaster	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
Bidang Ilmu Kajian	Ushuluddin dan Pemikiran/Filsafat
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2021

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2021**

1. a. Judul : **Peran PTKIN dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama di Aceh**
- b. Klaster : Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
- c. No. Registrasi : 21107000045370
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Ushuluddin dan Pemikiran/Filsafat

2. Peneliti/Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Dr. Safrilsyah, S.Ag, M.Si
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIP^(Kosongkan bagi Non PNS) : 197004201997031001
 - d. NIDN : 2020047001
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 20101100112001
 - f. Pangkat/Gol. : Pembina/(IV/a)
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala dalam bidang Psikologi Agama
 - h. Fakultas/Prodi : Psikologi/psikologi

 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : Dr. Fuad, S. Ag, M. Hum
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Fakultas/Prodi : Ushuluddin dan Filsafat
 - j. Anggota Peneliti 2^(Jika Ada)
 - Nama Lengkap : Maimun Fuadi, S. Ag, M.Ag
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Fakultas/Prodi : Dakwah & Komunikasi

3. Lokasi Kegiatan :
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 (Enam) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2021
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 35.700.000,00
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2021
8. *Output dan Outcome* : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Banda Aceh, 5 Oktober 2021
Pelaksana,


Dr. Safrilsyah, S.Ag, M.Si
NIDN. 2020047001

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : **Dr. Safrilsyah, S.Ag, M.Si**
NIDN : 2020047001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Banda Aceh, 20 April 1970
Alamat : Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala
Kota Banda Aceh
Fakultas/Prodi : Psikologi/Psikologi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **"Peran PTKIN dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama di Aceh"** adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 September 2021
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,



Dr. Safrilsyah, S.Ag, M.Si
NIDN. 2020047001

PERAN PTKIN DALAM MEWUJUDKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI ACEH

Ketua Peneliti:

Dr. Safrilsyah, S.Ag, M.Si

Anggota Peneliti:

Dr. Fuad, S. Ag, M. Hum; Maimun Fuadi, S. Ag, M.Ag

Maraknya kasus intoleransi beragama di Aceh menjadi perhatian publik Pemerintah hadir merespon kondisi ini dengan membentuk FKUB sebagai instrument problem solving. Rumusan penelitian ini terdiri dalam beberapa elemen, diantaranya: Apa saja potensi dan sumberdaya kerukunan beragama di PTKIN. Bagaimana bentuk partisipasi PTKIN dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Aceh dan Sejauhmana intervensi PTKIN dalam tata kelola kerukunan umat beragama di Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, terdiri dari kalangan akademisi dari beberapa PTKIN yang diperbandingkan. Lokasi penelitian ini terdiri dari tiga PTKIN yaitu, UIN Ar-Raniry di Kota Banda Aceh; IAIN Cot Kala di Kota Langsa; dan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh di Kabupaten Aceh Barat. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara/FGD, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data penelitian digunakan, metode deskriptif, metode interpretasi dan metode komparatif. Beberapa hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kerukunan beragama di Aceh relatif belum menggembirakan, belum sesuai dengan harapan. Masih terdapat pertikaian, konflik, dan polemik dalam kehidupan umat beragama. Konflik yang terjadi secara fenomenal, meskipun bukan dalam skala yang luas, lebih bersifat internal (intern umat beragama Islam antara tradisional dengan non-tradisional). Selanjutnya PTKIN di Aceh memiliki potensi dan sumber daya yang besar untuk dapat mewujudkan kerukunan beragama di Aceh. Terdapat hasil penelitian yang mengkaji problematika kerukunan umat beragama, yang diproduksi oleh kalangan dosen dan juga mahasiswa. Terdapat unit atau lembaga khusus “Rumah Moderasi Beragama” yang didedikasikan untuk mewujudkan kerukunan dan moderasi beragama.

Kata Kunci: *PTKIN Aceh, Kerukunan Umat Beragama.*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Peran PTKIN dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama di Aceh”**.

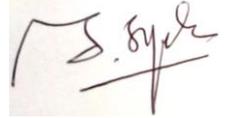
Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 3. Sekretaris LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 4. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Ketua FKUB Provinsi Aceh beserta Staf yang ikut terlibat dalam wawancara penelitian ini
 6. Semua pihak yang terlibat dalam menyukseskan penelitian ini
- Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal salih.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 2 Oktober 2021

Ketua Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Safrilsyah', with a horizontal line drawn underneath the name.

Dr. Safrilsyah, S.Ag, M.Si

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR.....	
DAFTAR LAMPIRAN.....	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Urgensi dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Pustaka.....	8
B. Kerangka Teoretis.....	16
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Jangka Waktu Penelitian.....	23
D. Data Penelitian.....	23
E. Instrumen Penelitian.....	24
F. Tahap-tahap Penelitian.....	25
G. Metode dan Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Kerukunan Beragama di Aceh.....	28
B. Potensi dan Sumberdaya Kerukunan Beragama di PTKIN.....	40
C. Partisipasi PTKIN dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragam.....	55

D. Keterlibatan PTKIN dalam Tata Kelola Kerukunan Umat Beragam	58
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran-saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENELITI	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Panduan wawancara : variabel penelitian
2. Lampiran deskriptif wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan kerukunan umat beragama di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini semakin menjadi sorotan, terutama dengan munculnya sejumlah pertikaian dengan basis keyakinan keagamaan. Fenomena ini tidak hanya terjadi antar umat beragama, bahkan juga intra agama Islam sendiri, terutama antar penganut aliran yang berbeda. Karakteristik pertikaian antar umat beragama mencuat seputar masalah keberadaan rumah/tempat ibadah, para penganut, dan proses peribadatnya. Demikian juga antar aliran dalam Islam diwarnai juga oleh kasus dengan motif yang sama. Kasus-kasus yang pernah terjadi ternyata juga tidak berdiri sendiri, adakalanya dilatari oleh perbedaan etnis yang memeluk agama berbeda.

Komunitas Muslim sebagai jumlah terbesar di Indonesia sejak lama telah menjadi penentu kebijakan, termasuk dalam menentukan hubungan antar agama. Masuknya sebagian besar Muslim ke dalam sistem pemerintahan dan kantor-kantor keagamaan menjadi dasar utama bangunan tatakelola kerukunan beragama yang dapat dilihat saat ini. Demikian juga dengan ruang-ruang yang disediakan dalam forum-forum pengambil kebijakan keagamaan di Indonesia, cenderung didominasi oleh kaum Muslim sebagai kelompok mayoritas. Salah satu jaminan yang dipertaruhkan adalah Muslim dan ajaran Islam memiliki standar yang baik dalam memperlakukan umat beragama lainnya.

Masalah yang muncul kemudian adalah gelombang protes dari kalangan nonmuslim atau sekalangan muslim lainnya terhadap kelompok muslim yang dominan yang dipandang tidak responsif terhadap kebutuhan mereka. Di sinilah terdapat tantangan bagi kerukunan yang dibangun oleh kelompok dominan tersebut, sehingga memunculkan

bentuk-bentuk sikap dan perilaku yang dianggap oleh kelompok minoritas sebagai intoleransi.

Prinsip-prinsip toleransi pada dasarnya bukanlah hal yang baru dalam masyarakat Indonesia. Prinsip ini bahkan dijadikan ajaran utama kehidupan berbangsa dan bernegara yang diakui oleh semua agama, termasuk Islam sendiri. Toleransi bahkan telah menjadi suatu standar global yang dipergunakan untuk mengukur tingkat kerukunan hidup masyarakat dunia dewasa ini, terlebih lagi masyarakat beragama di Indonesia yang berasaskan Pancasila. Bisa saja kehidupan masyarakat antaragama atau intraagama terlihat rukun, namun masih menyisakan problematika sosial yang belum terselesaikan, sehingga toleransi yang berjalan hanya bersifat pasif. Berbeda halnya jika kelompok mayoritas mampu membantu menyelesaikan problematika tersebut hingga menemukan titik kebebasan bersama, sehingga dapat disebut sebagai toleransi aktif sebagaimana yang diinginkan oleh banyak pihak.

Fenomena keagamaan tersebut telah mengundang berbagai respon dan kepedulian dari berbagai pihak terkait, tidak terkecuali pihak pemerintah pusat sebagai pemegang otoritas tertinggi. Di antara kebijakan strategis Pemerintah Indonesia dalam mencegah dan menyelesaikan berbagai persoalan keagamaan tersebut adalah membentuk sebuah lembaga khusus FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) yang berstatus legal-yuridis-formal, baik untuk tingkat pusat maupun tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Dalam Lampiran Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dinyatakan bahwa FKUB merupakan *center of excellence* di Indonesia dalam rangka mewujudkan kondisi “kerukunan substantif”, dan bukan sekedar “kerukunan simbolis”. Kementerian Agama dalam hal ini menetapkan empat sasaran kegiatan kerukunan umat beragama: 1) perumusan dan sosialisasi regulasi terkait kerukunan umat beragama; 2) peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan; 3) pemberdayaan FKUB, lembaga keagamaan, dan institusi

media; dan 4) pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama.¹

Dalam Lampiran Surat Keputusan Menteri Agama tersebut juga dinyatakan bahwa pemberdayaan FKUB, penyelenggaraan program-program peningkatan kemampuan manajerial, penanganan/negosiasi konflik, penanganan paskakonflik, peningkatan wawasan multikultural, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan juga secara terus menerus dilakukan di kalangan personil kepengurusannya. Dalam rangka mendukung operasionalisasi FKUB, Pemerintah juga memfasilitasi penyediaan biaya operasional, membangun gedung sekretariat FKUB yang dilengkapi dengan peralatan kerja, serta memperlakukan tenaga Pegawai Negeri Sipil yang secara khusus ditugasi membantu di bidang kesekretariatan di FKUB.²

Akan tetapi berbagai upaya pemerintah yang telah diuraikan di atas kelihatannya masih menyisakan suatu “kesenjangan” manakala lembaga perguruan tinggi di Indonesia belum terlibat secara formal dan institusional. Regulasi dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pemerintah belum “bersentuhan langsung” dengan peran dan tanggungjawab PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) dalam penataan kerukunan umat beragama. Peran dan tanggungjawab untuk menciptakan kerukunan beragama masih tertumpu pada pihak pemerintah (eksekutif), organisasi-organisasi keagamaan, terutama FKUB, lembaga-lembaga sosial lainnya, disamping aktor-aktor sosial, tokoh agama dan tokoh intelektual. Peran dan tanggungjawab tersebut belum dimiliki lembaga perguruan tinggi sebagai produsen kaum cendekia.

¹Lampiran I: Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 – 2019, hal. 4.

²Lampiran I: Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 – 2019, hal.6.

Rekomendasi yang diajukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI³ juga memunculkan kesan bahwa PTKIN secara formal-institusional bukanlah merupakan bagian penting dari elemen yang “bertanggung jawab” terhadap bangunan kerukunan umat beragama. Demikian halnya dalam PBM (Peraturan Bersama Menteri), Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri⁴ tidak tercantum adanya peran atau tuntutan peran lembaga perguruan tinggi dalam tata kelola kerukunan umat beragama atau pemberdayaan FKUB. Meskipun hasil penelitian atau kajian Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI menyebutkan bahwa FKUB memiliki kekurangan di bawah 60% pada aspek-aspek: profil kelembagaan, visi dan misi serta demografi; sumber daya lembaga, *leadership, constituent, workforce focus*; efisiensi, program, proses, dan hasil⁵, PTKIN juga “belum memperoleh peran” sesuai dengan kapasitas kelembagaannya dalam proses pemberdayaan FKUB.

Secara potensial, PTKIN memiliki andil yang sangat besar dalam mencerdaskan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, terutama umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan tinggi, PTKIN mengemban amanat dan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Salah satu misi “sakral” ini adalah Pengabdian

³Selengkapnya lihat: *Peran Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama*, Cetakan Pertama, Editor: Bashori A. Hakim, Penerbit: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2013.

⁴Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor : 9 Tahun 2006, dan Nomor : 8 Tahun 2006, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

⁵*Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama: Kapasitas Kelembagaan dan Efisiensi Kinerja FKUB terhadap Kerukunan Umat Beragama*, Editor: Ibnu Hasan Muchtar & Farhan Muntafa, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI Jakarta, 2015, hal.73.

kepada Masyarakat, dan salah satu tujuan dan sasaran (*out come*) yang diharapkan dari PTKIN adalah menciptakan kesejahteraan hidup masyarakat dalam berbagai aspek dan dimensinya termasuk aspek kehidupan beragama di Indonesia.

Oleh karena itu PTKIN harus mengambil peran dan tanggung jawab yang lebih optimal dalam proses tata kelola kehidupan umat beragama di Indonesia. Upaya untuk merumuskan konsep dan strategi kerukunan umat beragama sejatinya tidak bisa terlepas dari peran dan keberadaan PTKIN, baik melalui regulasi-regulasi dan kebijakan yang dirumuskan oleh pihak pemerintah maupun melalui program-program strategis dan kebijakan internal PTKIN itu sendiri. Terkait dengan signifikansi dan urgensi peran PTKIN, Nur Syam menegaskan bahwa PTKI harus mampu menjadi pusat bagi terciptanya *religious harmony*. Nur Syam menambahkan: “Kita semua tahu bahwa kita memiliki kearifan lokal, misalnya “satu tungku tiga batu”, atau “kitorang basudara”. Maka, hal ini harus terus menerus digelorakan untuk membangun harmoni dan kerukunan”.⁶

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan di atas, penelitian tentang peran PTKIN dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Aceh sangat signifikan dan urgen untuk dilakukan. Asumsi yang mendasari signifikansi dan urgensi penelitian ini, di antaranya adalah besarnya potensi konflik keagamaan di Indonesia, termasuk Aceh, yang berbias pada aspek kerukunan hidup umat beragama. Indonesia dikenal sebagai negara yang masyarakatnya heterogen, dimana kasus-kasus konflik atas nama agama dewasa ini marak terjadi.

⁶Nur Syam, *Peran PTKIN dalam Membangun Harmoni Sosial di Era Milenial*, Makalah Disampaikan dalam diskusi di STAIN Sorong, 11-10-2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan empat masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini:

1. Apa saja potensi dan sumberdaya kerukunan beragama di PTKIN?
2. Bagaimana bentuk partisipasi PTKIN dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Aceh?
3. Sejauhmana keterlibatan PTKIN dalam tata kelola kerukunan umat beragama di Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sesuai dengan masalah yang akan dikaji:

1. Memetakan potensi akademik dan kelembagaan yang dimiliki PTKIN dalam rangka perwujudan kerukunan umat beragama di Aceh, terkait dengan aspek kurikulum dan pembelajaran, SDM, pusat-pusat kajian, dan unit-unit pelayanan yang ada.
2. Menjelaskan peran PTKIN dalam pembangunan kerukunan umat beragama di Aceh dan seberapa signifikan peran tersebut telah berjalan.
3. Merumuskan pola-pola keterlibatan PTKIN dalam tata kelola kerukunan umat beragama di Aceh, baik terkait pengambilan kebijakan maupun penataan kerukunan umat beragama di Aceh.

D. Urgensi dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini sangat signifikan dilakukan untuk menjelaskan seberapa jauh PTKIN telah mengembangkan strategi kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk berkontribusi secara luas. Dalam beberapa sambutannya, Menteri Agama Republik Indonesia berharap agar jajarannya bersama Pemerintah Daerah membantu jalannya FKUB. Namun harapan ini tidak secara langsung tertuju pada PTKIN yang

seyogyanya menjadi garda terdepan dalam mewujudkan tatakelola kerukunan umat beragama di Indonesia.⁷

Penelitian ini juga sangat urgen dilakukan untuk menggali peran-peran strategis yang dapat dilakukan oleh PTKIN, sehingga melalui kajian yang bersifat eskploratif ini dapat ditemukan "esensi" model/pola/paradigma kerukunan beragama yang lebih ideal untuk dapat diterapkan. Dari penelitian ini juga diharapkan PTKIN dapat merumuskan gagasan-gagasan baru yang lebih konstruktif untuk mewujudkan kerukunan beragama di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh.

⁷Selengkapnya lihat: <https://nasional.tempo.co/read/1143019/menag-lukman-budaya-dan-agama-dibenturkan-indonesia-bisa-runtuh/full&view=ok>; dan <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/11/28/p03ov7396-kemenag-akan-perkuat-peran-forum-kerukunan-umat-beragama>.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Hasil-hasil kajian atau penelitian tentang persoalan kerukunan umat beragama atau yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama di Indonesia telah banyak dipublikasi di berbagai literatur kepustakaan. Hasil-hasil kajian/penelitian tersebut umumnya berkorelasi ganda: kajian tentang konflik umat beragama terkait dengan aspek kerukunan umat beragama; dan kajian tentang kerukunan umat beragama terkait dengan konflik antar umat beragama. Karena itu kajian tentang “konflik” tidak bisa dipisahkan dari kajian tentang “kerukunan”, sebagai dua variabel kembar. Kajian-kajian tentang kedua variabel tersebut juga terkait dengan berbagai rekomendasi yang diajukan serta lembaga/institusi yang terlibat dalam rangka pencegahan dan penyelesaian konflik atau kebijakan strategis untuk mewujudkan kerukunan umat beragama.

Hasil penelitian tentang isu-isu di atas dapat ditelusuri dari beberapa tulisan. Retnowati⁸, di antaranya, mengkaji upaya integrasi pasca kerusuhan di Situbondo Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi dan upaya rekonsiliasi tersebut telah dilakukan oleh umat dan pimpinan agama Islam dan Kristen di Situbondo, dimana unsur kearifan lokal juga menjadi modal sosial dalam mewujudkan integrasi dalam masyarakat, sehingga pasca kerusuhan kehidupan masyarakat dan hubungan antarumat beragama di Situbondo dapat dipulihkan kembali.

Adapun hasil penelitian Syahrin Harahap, Katimin, dan Sahdin Hasibuan⁹ tentang konflik di Tanjung Balai, Medan (Sumatera Utara),

⁸Retnowati, “Agama, Konflik, dan Integrasi Sosial (Integrasi Sosial Pasca Konflik Situbondo)”, Jurnal “*Analisa*”, Volume 21 Nomor 02 Desember 2014, p.p.189-200.

⁹Syahrin Harahap, Katimin, Sahdin Hasibuan, “The Phenomenon of Social and Religious Conflicts in Tanjungbalai, Medan, Indonesia”, *IOSR Journal Of Humanities*

menyebutkan bahwa kendati diakibatkan faktor ekonomi dan kekuasaan untuk menguasai kelompok lain oleh kelompok tertentu, konflik tersebut juga berimbas pada persoalan keagamaan. Padahal, selama ini Sumatera Utara dikategorikan sebagai zona aman (*zero conflict area*), namun konflik juga bisa terjadi.

Selain itu, Chris Wilson¹⁰ menegaskan bahwa konflik yang melanda Maluku Utara, yang menimbulkan kekerasan dan kebrutalan, merupakan konflik dan kekerasan antar etnik yang melibatkan agama (*Ethno-religious Violence*) yang terjadi di Indonesia. Dalam karya tersebut Wilson juga memaparkan beberapa contoh kasus yang dapat dianalisis dengan sejumlah teori konflik yang berbeda.

Survei Setara Institute yang dirilis menjelang akhir tahun 2018 juga menyampaikan daftar 94 kota dengan skor toleransi tertinggi hingga terendah terendah.¹¹ Sebelumnya, pada tahun 2016 juga ada kajian yang hampir sama dari Ma'arif Institute tentang Indeks Kota Islami, yang juga meninjau kondisi keamanan, kebahagiaan, serta kesejahteraan di 29 kota di Indonesia.¹²

Di samping itu, yang paling dekat dengan isu yang dibahas dalam proposal ini, adalah Survei Kerukungan Umat Beragama yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2015. Survei yang dilakukan di 10 provinsi di Indonesia ini mengakomodir tiga indikator utama sebagai ukuran kerukunan, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama.¹³

And Social Science (IOSR-JHSS), Volume 22, Issue 8, Ver. VI (August. 2017), p.p. 31-39.

¹⁰Chris Wilson, *Ethno-religious Violence in Indonesia From Soil to God*, Routledge, New York, 2008.

¹¹Setara Institute, *Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran Tahun 2018*. SETARA Institute for Democracy and Peace, Jakarta, 7 Desember 2018

¹²Maarif Institute, *Indeks Kota Islami Indonesia*. Maarif Institute for Culture and Humanity, Jakarta.

¹³Ulum, Raudhatul dan Budiyo, *Survey Kerukungan Umat Beragama di Indonesia Tahun 2015*. Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2015.

Hasil kajian oleh Litbang Kementerian Agama dapat menjadi dasar ukuran umum bagaimana tingkat kerukunan umat beragama saat ini di daerah-daerah di Indonesia. Hasil survei tersebut telah menunjukkan bahwa skala kerukunan sudah relatif tinggi. “sikap dan interaksi antar umat beragama” memiliki rata-rata 71,6; Kesetaraan 75.66 dan Kerjasama antar umat beragama diperoleh rata-rata 80.42.¹⁴ Survei Setara Institute kemudian mengkonfirmasi sisanya, di mana masih ada ketidakrukunan antar umat beragama dalam bentuk toleransi yang rendah di sejumlah daerah. Kajian tersebut didasarkan pada empat hal, yaitu; regulasi pemerintah, tindakan pemerintah, regulasi sosial, dan demografi agama, yang masing-masing memiliki variabel tertentu yang digunakan.¹⁵

Survei yang dibicarakan di atas tidak hanya dilakukan di daerah yang mayoritas penduduknya Muslim, tapi juga di daerah yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Kajian-kajian tersebut juga menunjukkan tingkat kerukunan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan yang lainnya.

Sintha Wahjusaputri¹⁶ mensinyalir bahwa pandangan atau perspektif tentang keagamaan yang menempatkan agama sebagai sumber konflik didasari oleh berbagai tujuan dan interpretasi, yang diharapkan dapat mereduksi konflik antar umat beragama kepada sikap saling toleransi. Kendati antar agama berbeda dalam segi tertentu, namun setiap agama dapat dipandang sama dalam hal kepatuhan dan keyakinan kepada Tuhan. Terlebih lagi berbagai ketegangan yang kerap kali terjadi di antara komunitas atau umat beragama sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor lain di luar wilayah agama. Secara umum, Sintha Wahjusaputri menyimpulkan tiga pola (*patterns*) konflik keagamaan: konflik di antara

¹⁴Ulum, Raudhatul dan Budiyo, *Survey Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Tahun 2015*. Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2015, hal. 56.

¹⁵Setara Institute, *Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran Tahun 2018*. SETARA Institute for Democracy and Peace, Jakarta, 7 Desember 2018, hal. 3.

¹⁶Sintha Wahjusaputri, “Religion Conflicts in Indonesia: Problems and Solutions, *Sociology Study*, December 2015, Vol. 5, No. 12, p.p. 931-936.

umat yang berbeda agama; konflik antara umat agama tertentu dengan kelompok lainnya; dan konflik antar umat agama tertentu yang memiliki perbedaan pemahaman tentang agama tersebut.

Marsudi Utoyo¹⁷ menegaskan bahwa masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang pluralistik (majemuk), yang memiliki keragaman dari segi: agama, tradisi, kesenian, kebudayaan, cara hidup, dan pandangan nilai, yang dianut oleh berbagai kelompok etnis di Indonesia. Di satu sisi, pluralitas tersebut bersifat positif dan konstruktif, namun di sisi lain juga berpotensi negatif dan destruktif yang dapat berakibat disintegrasi bangsa. Dengan kata lain, pluralitas tersebut juga menjadi “akar” konflik keagamaan jika sikap toleransi dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Salah satu upaya konstruktif yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah pendirian, pengelolaan, dan pemberdayaan lembaga FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Hasil kajian Khotimah¹⁸ menyebutkan bahwa program FKUB tentang dialog antar umat beragama merupakan modal utama bagi terciptanya kerukunan beragama, kesadaran beragama, dan mengandung nilai kemanusiaan universal. Umat beragama harus memahami agama mereka dengan baik dan sadar tentang adanya perbedaan dan keragaman agama-agama. Pemahaman tentang perbedaan dan keragaman tersebut secara teoretis terkait dengan tiga pendekatan yang biasa dilakukan: teologis, politis, dan sosio-kultural.

FKUB merupakan produk undang-undang yang bertujuan memelihara kerukunan umat beragama di Indonesia. Keberadaan dan peran FKUB harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat karena FKUB merupakan aset yang sangat berharga bagi pemeliharaan kerukunan

¹⁷Marsudi Utoyo, “Akar Masalah Konflik Keagamaan di Indonesia”, *Jurnal Lex Librum*, Vol.III, No.1, Desember 2016, p.p. 367-376.

¹⁸Khotimah, “Religious Harmony and Government in Indonesia”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 23, No. 1, Juni 2015.

umat beragama di Indonesia. Akan tetapi, di beberapa daerah FKUB belum mampu memberikan kontribusi secara optimal sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, karena berbagai kendala yang dihadapi, sebagaimana dinyatakan dalam tulisan Muhammad Anang Firdaus.¹⁹

Berbagai rekomendasi terkait pentingnya upaya menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia juga dapat dijumpai di beberapa tulisan. Hasil kajian Puslitbang Kehidupan Keagamaan²⁰ merekomendasikan upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kantor Kemenag, dan masyarakat dalam pemeliharaan kerukunan hidup umat beragama. Di antara rekomendasi yang ditawarkan adalah: 1) Meningkatkan monitoring dan pengawasan secara teratur, sistematis, terarah dan kontinyu terhadap berbagai kegiatan keagamaan dan kerukunan, khususnya terkait dengan fungsi intelijen dan fungsi keamanan pada umumnya untuk kepentingan siaga dini; 2) Menggalakkan dialog, silaturahmi, interaksi multi kultural lintas agama, etnis, profesi dan kelompok serta kerjasama sosial keagamaan; 3) Meningkatkan pengawasan, pelaporan, fasilitas administrasi, dana dan sumberdaya manusia, sinergisitas sektoral antar instansi dan kerjasama sosial kemanusiaan antar kelompok keagamaan.

¹⁹Muhammad Anang Firdaus, “Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia”, *Kontekstualita*, Vol. 29, No.1, 2014, p.p.63-84.

²⁰*Peran Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama*, Cetakan Pertama, Editor: Bashori A. Hakim, Penerbit: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2013.

Puslitbang Kehidupan Keagamaan²¹ juga merekomendasikan agar Pemerintah Daerah dan Kanwil Kementerian Agama berperan dalam pemeliharaan kerukunan hidup umat beragama, antara lain dengan: 1) Memperluas ruang gerak atau kesempatan kepada ormas-ormas keagamaan untuk mengekspresikan organisasinya; 2) Memberikan komitmen dan dukungan politis yang besar terhadap masalah kerukunan; 3) Memberikan dukungan dana dan fasilitas terhadap berbagai aktivitas yang menopang kerukunan hidup umat beragama; 4) Mengkoordinasikan aparat dan instansi vertikal yang ada di wilayah setempat dalam menjalin harmonisasi, kerjasama, dan sinergitas; 5) Menyediakan dan memfasilitasi forum-forum komunikasi, dialog dan interaksi sosial dalam rangka menjalin kebersamaan, saling pengertian, peningkatan wawasan dan mengakomodir aspirasi yang berkembang dalam masyarakat; dan 6) Melakukan monitoring dan mencari solusi bagi penyelesaian konflik.

Rekomendasi serupa juga dikemukakan oleh Marzuki²², bahwa dialog merupakan sarana yang strategis untuk digunakan dalam rangka membangun keharmonisan hidup antar umat beragama. Melalui dialog akan berkembang model pemahaman keagamaan yang berupaya mencari titik temu atau persamaan-persamaan yang ada di antara agama-agama. Dialog antar iman ini diharapkan akan mengantarkan umat beragama dari paradigma '*kesalehan ritual*' dan '*kesalehan individual*' kepada '*kesalehan sosial*'.

²¹Peran Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Cetakan Pertama, Editor: Bashori A. Hakim, Penerbit: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2013.

²²Marzuki, *Konflik antar Umat Beragama di Indonesia dan Alternatif Pemecahannya*, Makalah Disampaikan Pada Seminar tentang Revolusi Konflik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Senin 20 November 2006.

Selain itu, juga terdapat rekomendasi yang dihasilkan dari *workshop* Centre for Humanitarian Dialogue (HD Centre)²³ khusus tentang konflik Poso, Sulawesi Tengah. *Workshop* tersebut melibatkan unsur pemerintah lokal, NGOs, akademisi, pemimpin adat dan pemuka agama. Rekomendasi yang dihasilkan menyebutkan bahwa para elemen terkait perlu melakukan musyawarah reguler, yaitu: *Musyawaharah Sintuwu Maruso*, dalam rangka mewujudkan perdamaian secara kolektif, dialogis dan berkesinambungan.

Adapun rekomendasi khusus yang ditujukan pada kelembagaan PTKIN, terdapat dalam tulisan Nur Syam²⁴ yang disampaikan di STAIN Sorong. Nur Syam menegaskan bahwa PTKIN -khususnya STAIN Sorong- harus melakukan beberapa terobosan dalam rangka menuju masa depan, yaitu: 1) Agar menjadi lembaga pendidikan berkualitas, sesuai dengan RPJMN 2019-2024, melalui penguatan akreditasi; 2) Harus memiliki *center of religious harmony*; 3) STAIN Sorong diharapkan menyiapkan satu program pembelajaran tentang literasi media; dan 4) Perlu didiskusikan tentang apa yang bisa menjadi *center of excellence* di STAIN Sorong yang pusat keunggulan tersebut berasal dari keinginan masyarakat dan berbasis pada kearifan lokal yang mendasar di Sorong.

Jika dicermati secara seksama dan dipahami secara substansial, agama merupakan institusi sakral (*sacred*), yang senantiasa terkait dengan nilai-nilai kesucian. Tesis yang dikemukakan oleh Syamsul Hadi²⁵ menegaskan bahwa agama tidak mungkin menjadi penyebab berbagai konflik dan disharmoni masyarakat. Oleh karena itu, alasan lain dalam

²³*Conflict Management Strategies in Indonesia: Learning from the Poso Experience*, Workshop Report, Centre for Humanitarian Dialogue (HD Centre) and the Indonesian conflict management organisation, Institut Titian Perdamaian (ITP), 8 December 2009.

²⁴Nur Syam, *Peran PTKIN dalam Membangun Harmoni Sosial di Era Milenial*, Makalah Disampaikan dalam diskusi di STAIN Sorong, 11-10-2018.

²⁵Syamsul Hadi, *Abdurrahman Wahid: Pemikiran tentang Kerukunan antar Umat Beragama di Indonesia*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.

menganalisis faktor konflik tersebut perlu untuk diungkapkan, seperti: alasan ekonomi, politik, atau budaya. Kendatipun dalam perspektif sosiologis tertentu agama cenderung dipahami mempunyai andil bagi munculnya konflik, pemahaman tersebut mesti direduksi. Syamsul Hadi menambahkan bahwa ketika terjadi konflik horizontal antara sesama kelompok masyarakat berbeda agama, mulai dari Banyuwangi hingga Ternate, Aceh sampai Papua, peran agama dalam memulai konflik cenderung diabaikan. Agama hanya ditempatkan sebagai dampak dari berbagai persoalan politik, ekonomi dan lainnya. Dengan kata lain, dalam keseluruhan konflik tersebut, agama tidak dipandang sebagai faktor yang dominan. Dengan demikian, pemahaman bahwa dalam banyak peristiwa konflik seperti di Situbondo, Maumere, Ambon, Mataram, dan tempat lain sepanjang 1998-2000, yang menempatkan posisi agama sebagai faktor dominan dalam memulai konflik, hanyalah mitos yang harus segera dinetralisir untuk mewujudkan tatanan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Dalam konteks pluralisme agama, karena adanya keragaman agama dan perbedaan antar umat atau pemeluk agama, sikap toleransi menjadi faktor utama bagi kerukunan beragama. Hasil penelitian Umi Sumbulah dan Nurjanah²⁶ telah memperkuat teori pluralisme yang dikembangkan Nurcholish Madjid, Alwi Shihab, Budhi Munawar Rachman, dan Abdurrahman Wahid, bahwa pluralisme berbasiskan perasaan dan sikap saling menghormati, yaitu toleransi dalam arti aktif (*active tolerance*), bukan toleransi pasif (*pasive tolerance*) dan juga bukan toleransi malas (*lazy tolerance*). Pluralisme bukan sinkretisme, dan juga bukan relativisme, karena bukan berarti mencampuradukkan semua agama dan meyakini kebenaran semua agama. Pluralisme merupakan pandangan yang menghargai dan mengakui perbedaan antar agama, sebagai sikap

²⁶Umi Sumbulah dan Nurjanah, *Pluralisme Agama Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan antar Umat Beragama*, Malang: UIN-MALIKI PRESS, Malang, 2013.

toleran yang perlu dikembangkan dalam rangka mewujudkan kerukunan hidup seluruh umat beragama.

Kendati demikian, paparan dan ulasan-ulasan yang telah dikemukakan di atas masih menyisakan argumentasi penting yang dapat diajukan bahwa peran perguruan tinggi keislaman belum optimal dalam mewujudkan bangunan kerukunan umat beragama di Indonesia. Meskipun hasil survei Setara Institute telah menempatkan Kota Banda Aceh pada peringkat nomor dua terendah skor toleransinya,²⁷ dan Provinsi Aceh menduduki peringkat terendah dalam aspek kerukunan umat beragama (dengan skor 63.8) berdasarkan Survey Litbang Kementerian Agama, peran PTKIN di Aceh belumlah terlihat secara aktual. Demikian halnya dengan peran PTKIN di daerah-daerah lain, besar kemungkinan juga belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

B. Kerangka Teoretis

Diskursus tentang agama dan berbagai problematika keagamaan dapat dikaji atau diteliti dengan berbagai teori yang dikemukakan para ahli. Teori-teori tersebut juga dapat diklasifikasi ke dalam bidang atau pendekatan tertentu, misalnya antropologi agama; sejarah agama; sosiologi agama dan sebagainya. Perbedaan bidang atau pendekatan tersebut didasarkan pada perbedaan objek formal kajian, karena sudut pandang dan *subject-matter* (pokok persoalan) yang berbeda.

Disamping itu, kajian-kajian tentang agama juga biasanya dilakukan terhadap aspek-aspek tertentu, seperti konflik antar pemeluk agama, toleransi antar umat beragama, atau kerukunan umat beragama, dan seterusnya. Kajian-kajian tersebut terus berkembang dari waktu ke waktu, dengan munculnya berbagai teori, dan terjadinya perkembangan teori-teori yang telah ada secara lebih dinamis dan bervariasi.

²⁷https://www.vice.com/id_id/article/ev3k3a/banda-aceh-tempuh-jalur-hukum-saat-dicap-kota-intoleran-apakah-kota-lain-bakal-ikutan, diakses pada 14 Desember 2018.

Kajian tentang masalah toleransi beragama, misalnya, dapat dilakukan dengan mempergunakan konsep toleransi dalam Islam. Konsep toleransi dalam Islam mirip dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh UNESCO bahwa toleransi adalah konsisten dengan sikap respek terhadap hak-hak asasi manusia. Sikap menerima perbedaan orang lain dalam penampilan, situasi, percakapan, tingkah laku, dan nilai-nilai yang mereka anut mencerminkan pengakuan terhadap hak hidup mereka dalam kedamaian. Ini juga berarti bahwa pandangan atau pendapat seseorang tidak bisa dipaksakan pada orang lain.²⁸

Toleransi merupakan apresiasi terhadap keragaman dan kemampuan untuk hidup dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk hidup. Ini merupakan kemampuan untuk melatih sikap-sikap adil secara objektif terhadap pendapat, kegiatan-kegiatan, agama, kebangsaan yang berbeda yang dimiliki orang lain. Sebaliknya, sikap intoleran merupakan kegagalan untuk menghargai keragaman dan perbedaan-perbedaan tersebut.²⁹

Toleransi beragama dan saling bereksistensi dalam hidup damai mencerminkan kehidupan bersama dalam suatu kerukunan atau harmoni. Dalam kaitan ini pendidikan damai merupakan salah satu studi yang esensial dalam menciptakan kedamaian dan toleransi, karena mengajarkan norma-norma, nilai-nilai, dan sikap-sikap yang dapat mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan manusia. Pendidikan semacam ini dapat diimplementasikan mulai dari individu, keluarga, masyarakat, suatu bangsa, dan bahkan secara global, melalui orientasi damai dan toleransi. Demikian halnya sistem-sistem politik, ekonomi, dan sosial,

²⁸Ammar Fadzil, "Religious Tolerance in Islam: Theories, Practices and Malaysia's Experiences as a Multi Racial Society", *Journal of Islam in Asia*, Spl. Issue, No.3 September 2011, p.p.347-348.

²⁹Hanna Onyi Yusuf, "Promoting Peaceful Co-Existence and Religious Tolerance through Supplementary Readers and Reading Comprehension Passages in Basic Education Curriculum", *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 3 No. 8 [Special Issue – April 2013], p.p.224-232.

secara edukatif juga harus diorientasikan terhadap perdamaian dan toleransi.³⁰

Permasalahan toleransi beragama juga berkaitan dengan konflik sosial yang berdimensi agama, karena konflik dapat terjadi karena toleransi tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Ari Ganjar Herdiansah mengemukakan bahwa konflik-konflik sosial-keagamaan di Indonesia dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan politik.³¹

Talib dan Sarjit mencatat bahwa kebanyakan para sarjana mengkaji agama berdasarkan dua perspektif teoretis utama: teori struktural fungsional dan teori konflik. Terdapat hubungan-hubungan yang menarik antara teori-teori tersebut ketika dipergunakan untuk memahami toleransi beragama. Dalam hal ini, Talib dan Sarjit menyimpulkan bahwa tingkatan (*level*) konflik dalam suatu masyarakat akan tereduksi ketika tingkatan toleransi meningkat atau mengambil alih.³²

Persoalan toleransi dan konflik antar umat beragama, baik dalam konteks historis yang sudah berlangsung lama atau yang masih berkembang pada masa sekarang biasanya dipengaruhi oleh keterlibatan dua kelompok keagamaan: kelompok mayoritas dan minoritas. Dengan kata lain, konflik dapat dipicu oleh ketegangan-ketegangan atau kesenjangan antara kelompok yang memiliki otoritas dengan yang tidak punya akses terhadap otoritas. Jika dipahami secara seksama, persoalan ini juga tidak terlepas dari salah satu faktor sosial-politis yang disebut “hegemoni”.

³⁰Hanna Onyi Yusuf, “Promoting Peaceful Co-Existence and Religious Tolerance through Supplementary Readers and Reading Comprehension Passages in Basic Education Curriculum”, *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 3 No. 8 [Special Issue – April 2013], p.p.224-232.

³¹Ari Ganjar Herdiansah, “Public Policy And Religious Conflict In Indonesia: The Case Of Ahmadiyah”, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 1, No. 1, Maret 2016, p.p.79-90.

³²A.T. Talib and Sarjit S. Gill, “Socio-Religious Tolerance: Exploring the Malaysian Experience”, *Global Journal of Human Social Science*, Volume 12, Issue 8, Version 1.0 May 2012.

Antonio Gramsci menyatakan bahwa hegemoni adalah “*educational relationship*” dalam kehidupan bermasyarakat. Teori hegemoni yang dikemukakan Gramsci ini berkaitan dengan suatu pandangan hidup dan cara berpikir yang dominan, yang melaluinya konsep tentang kenyataan disebarluaskan dalam masyarakat, baik secara institusional maupun individual. Sebagai konsep ideologis, hegemoni mendiktekan seluruh kebiasaan moral, prinsip religius dan politik, serta hubungan-hubungan sosial lainnya kepada suatu masyarakat.

Teori Gramsci tentang hegemoni bukan berarti dominasi dengan menggunakan kekuasaan, tetapi hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Berbeda dengan makna aslinya dalam bahasa Yunani, bahwa hegemoni berarti penguasaan satu bangsa atas bangsa lainnya, hegemoni dalam pengertian Gramsci adalah sebuah organisasi konsensus dimana ketertundukan diperoleh melalui penguasaan ideologi dari kelas yang menghegemoni. Konsensus terkait dengan spontanitas yang bersifat psikologis, yang mencakup berbagai penerimaan aturan sosio-politis ataupun aspek-aspek aturan lainnya. Konsensus bisa terjadi karena: 1) rasa takut terhadap konsekuensi jika tidak menyesuaikan diri; 2) terbiasa mengikuti tujuan-tujuan dengan cara-cara tertentu; dan 3) kesadaran atau persetujuan terhadap unsur tertentu. Konsensus menurut Gramsci adalah konsensus yang tercipta atas dasar persetujuan.³³

Teori hegemoni tersebut dijadikan sebagai landasan teoretis untuk mengkaji permasalahan kehidupan beragama di Indonesia, baik untuk memahami toleransi dan kerukunan umat beragama maupun untuk mengungkap faktor-faktor intoleransi atau ketidakrukunan antar umat beragama. Selain itu, hegemoni dalam kaitan ini juga dapat dijadikan sebagai asumsi dasar yang bersifat positif bagi terciptanya kerukunan

³³Endah Siswati, “Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci”, *Jurnal Translitera*, Edisi 5/2017, p.p. 11-33.

umat beragama dimana ketidakrukunan atau intoleransi bisa terjadi karena proses hegemoni tidak berlangsung sebagaimana mestinya.

Hegemoni yang digambarkan di atas tidak dapat dipisahkan dari “peran” aktor sosial sebagai salah satu faktor utama, baik secara individual maupun kolektif institusional. Dalam tataran tertentu bahkan keterlibatan secara institusional atau peran suatu lembaga menjadi faktor yang lebih dominan dalam mewujudkan hegemoni dalam kehidupan sosial.

Terkait dengan persoalan “peran”, yang menjadi fokus utama penelitian ini dalam mengkaji peran PTKIN dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Aceh, terdapat beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli. Teori Peran (*Role Theory*) pada dasarnya menjelaskan tentang keragaman karakteristik perilaku sosial pada situasi dan kondisi tertentu, menyangkut ekspektasi normatif yang harus diperjuangkan.³⁴ Perilaku normatif terarah pada tujuan yang diharapkan dalam rangka mengoptimalkan kualitas dan pencapaian nilai-nilai tertentu.³⁵

Teori Peran yang menjadi acuan penelitian ini adalah Teori Peran Organisasi (*Organizational Role Theory*). Peran suatu organisasi pada dasarnya dapat dihubungkan dengan posisi-posisi sosial tertentu, dan digeneralisasikan oleh harapan-harapan normatif tentang bagaimana seharusnya kondisi sosial itu direkayasa. Dalam hal ini tuntutan-tuntutan organisasi atau lembaga untuk berkiprah secara normatif menjadi signifikan dan utama.³⁶ Dengan demikian peran PTKIN sebagai salah satu

³⁴B. J. Biddle, “Recent Developments In Role Theory”, *tAnnual Review of Sociology* Vol. 12:67-92, 1986. [t/doi.org/10.1146/annurev.so.12.080186.000435](https://doi.org/10.1146/annurev.so.12.080186.000435)

³⁵Albert Hunter, “Role Theory”, in *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 2nd Edition, 2015. (<https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/role-theory>)

³⁶B. J. Biddle, “Recent Developments In Role Theory”, *tAnnual Review of Sociology* Vol. 12:67-92, 1986. [ttps://doi.org/10.1146/annurev.so.12.080186.000435](https://doi.org/10.1146/annurev.so.12.080186.000435)

organisasi atau lembaga akademis yang bersifat strategis dipengaruhi oleh perilaku normatif individu-individu yang terdapat di dalamnya, untuk memenuhi tuntutan peran kelembagaan terhadap kondisi sosial yang terkait dengannya. Dengan kata lain, terkait secara eksplisit dengan penelitian ini, tuntutan dimaksud adalah peran PTKIN dalam mewujudkan kerukunan umat beragama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari misi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif yang menelaah permasalahan peran PTKIN dalam bangunan tatakelola kerukunan umat beragama di Aceh. Penelaahan dititikberatkan pada investigasi dan eksplorasi masalah-masalah yang terjadi dalam proses kerukunan umat beragama di tiga wilayah di Aceh dalam rangka menawarkan alternatif pemahaman yang potensial bagi upaya pengembangannya.

Karenanya penelitian ini merupakan penelitian terapan dan pengembangan, yang juga bersifat, melibatkan banyak pihak termasuk kalangan akademisi dari beberapa PTKIN. Berdasarkan bidang keilmuan, penelitian ini terlibat dengan ilmu-ilmu sosial, hukum, ekonomi, politik dan sejarah, disamping Studi Agama itu sendiri.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini memiliki ekspektasi untuk dapat memetakan peran dan keterlibatan PTKIN dalam bangunan tata kelola kerukunan umat beragama di Aceh. Wilayah yang dijadikan lokasi penelitian ini terdiri dari tiga kabupaten/kota, yaitu: Kota Banda Aceh; Kota Langsa; dan Kabupaten Aceh Barat.

Beberapa PTKIN yang diteliti peran dan keterlibatannya dalam tata kelola kerukunan umat beragama, di Provinsi Aceh, khususnya UIN Ar-Raniry di Kota Banda Aceh; IAIN Cot Kala di Kota Langsa; dan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh di Kabupaten Aceh Barat.

Berdasarkan penjelasan di atas, subjek penelitian (di ketiga PTKIN tersebut) dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa *cluster* sesuai kebutuhan data penelitian. Adapun terkait dengan jumlah informan dari

masing-masing *cluster*, disesuaikan dengan kualitas perolehan data dalam kegiatan penelitian nantinya.

C. Jangka Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung secara intensif selama lebih kurang 6 (enam) bulan, sesuai dengan langkah-langkah atau pentahapan (tahap-tahap Penelitian) dan prosedur pelaksanaan (Metode Penelitian) yang telah ditentukan dalam desain/proposal penelitian ini.

D. Data Penelitian

Secara umum data penelitian ini bersumber dari: 1) **Kepustakaan** (buku, jurnal, majalah, ensiklopedi, kamus, dan sejenisnya), baik yang bersifat manual (*paper base*) maupun digital (elektronik/*paper less*); 2) **Dokumen** (laporan, peraturan/undang-undang, kasus-kasus yang terjadi, nomenklatur yang dapat di akses dan terkait dengan data bangunan tata kelola kerukunan umat beragama; 3) **Subjek Penelitian** (hasil wawancara, hasil pengamatan langsung terhadap subjek penelitian, dan yang sejenisnya). Secara umum ketiga sumber tersebut menyajikan data-data yang bersifat kualitatif dan dapat digolongkan ke dalam Data Primer, Data Sekunder, dan Data Pendukung atau pelengkap lainnya.

1. Data Primer

Data primer penelitian ini pertama-tama bersumber subjek penelitian (informan) yang terdapat di ketiga PTKIN yang diteliti dan Lembaga-lembaga terkait lainnya. Kategori informan yang menjadi subjek penelitian terdiri dari: akademisi, mahasiswa, dan pimpinan ketiga PTKIN tersebut; tokoh agama; pengurus FKUB; dan eksponen *stakeholder* lainnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini bersumber dari kepustakaan (literatur/referensi ilmiah) dan dokumen-dokumen, yang menyajikan informasi-informasi tentang persoalan-persoalan bangunan tatakelola kerukunan umat beragama di Aceh, kebijakan-kebijakan, undang-undang atau aturan-aturan terkait bangunan tatakelola kerukunan umat beragama, dan informasi-informasi seputar permasalahan yang dikaji.

3. Data Pendukung

Data pendukung (pelengkap lainnya) bersumber dari berbagai kepustakaan pendukung, dokumen-dokumen dan sumber-sumber lainnya, yang ada kaitannya dengan persoalan-persoalan peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam bangunan tatakelola kerukunan umat beragama di Aceh. Data pendukung hanya menyajikan informasi-informasi tambahan, yang sewaktu-waktu diperlukan untuk melengkapi kebutuhan penelitian ini.

E. Instrumen Penelitian

Sebagaimana halnya dalam berbagai kegiatan penelitian kualitatif pada umumnya, peneliti dalam penelitian ini memainkan peran ganda, yaitu sebagai instrumen kunci (*key instrument*) dan sekaligus pengguna instrumen lainnya. Dalam kegiatan penelitian ini, peneliti mempergunakan beberapa instrumen: yaitu: pedoman wawancara, pedoman observasi dan dokumentasi kepustakaan.

F. Tahap-tahap Penelitian

Penelitian ini menempuh beberapa tahap dan langkah-langkah teknis operasional sebagai berikut:

1. Inventarisasi Data

Inventarisasi data merupakan tahap pertama dalam proses dan kegiatan penelitian ini, yang dilakukan dengan mempergunakan instrumen-instrumen sesuai dengan sumber dan jenis data masing-masing sebagaimana tersebut di atas. Dalam proses inventarisasi data ini juga dipergunakan teknik *Snowball*, yang berperan dalam pemilihan/penentuan subjek penelitian secara kronologis (dari subjek 1 kepada pemilihan subjek 2, dari subjek 2 kepada pemilihan subjek berikutnya, dan demikian seterusnya) dalam rangka melengkapi kebutuhan data penelitian.

2. Klarifikasi Data

Data yang telah terinventarisasikan selanjutnya diklarifikasi (disaring, dievaluasi, dan direduksi jika perlu) untuk memperoleh data yang otentik sesuai dengan kebutuhan variabel-variabel yang diteliti. Proses klarifikasi data sekaligus bertujuan untuk menentukan tingkat kebutuhan dan kelengkapan data, dimana kekurangan-kekurangan data (jika terjadi) dapat diinventarisasikan kembali berdasarkan hasil dari klarifikasi data.

3. Klasifikasi Data

Data yang telah diklarifikasi tersebut kemudian diklasifikasikan (dikelompokkan) sesuai dengan variabel-variabel penelitian yang terkait dengan rumusan masalah penelitian. Proses klasifikasi data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data penelitian, sehingga analisis data dapat berlangsung sesuai dengan tujuan-tujuan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses terakhir dalam pelaksanaan penelitian, yang meliputi penguraian data/kelompok data yang saling berkaitan satu sama lain, hubungan yang satu dengan yang lain, relasi sebab-akibat, dan sejumlah keterangan/informasi (data) yang saling melengkapi atau bahkan saling mereduksi, dalam rangka menyajikan pernyataan-pernyataan dan pemahaman secara utuh dan sistematis. Proses analisis data dalam hal ini juga dilakukan secara berjenjang, sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab masalah-masalah penelitian, yang dimulai sejak inventarisasi data, klarifikasi data, klasifikasi data, dan terutama setelah klasifikasi data sebagai analisis yang paripurna. Hal ini didasari karena keterlibatan peneliti yang berperan sebagai instrumen utama (*key instrument*) dalam setiap proses dan tahap penelitian yang berlangsung.

Secara lebih eksplisit penjelasan tentang metode dan teknik analisis data penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut.

G. Metode dan Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan di dalam penelitian ini terdiri dari: metode deskriptif dan metode interpretasi,. Metode deskriptif dan metode interpretasi dipergunakan untuk menganalisis data kualitatif. Selain itu metode deskriptif juga dipergunakan untuk menganalisis data kuantitatif yang berkaitan dengan data kualitatif.

Selain ketiga metode tersebut, untuk mendukung perolehan objektivitas data tentang peran PTKIN dalam tatakelola kerukunan umat beragama di Aceh, juga dipergunakan teknik analisis Triangulasi (*Triangulation*). Teknik Triangulasi ini dimaksudkan untuk menelaah kualitas dan kapasitas data secara “tiga arah” (dari ketiga jenis data) yaitu: data hasil wawancara; data hasil observasi; dan data dokumentasi dari referensi kepustakaan (buku/jurnal/majalah/koran) lainnya. Proses

Triangulasi melibatkan pola hubungan yang bersifat timbal-balik dan integral dari ketiga jenis data tersebut, dimana masing-masing jenis data dipergunakan untuk memferifikasi jenis data yang lain. Data hasil wawancara, misalnya, dipergunakan untuk memverifikasi data dokumentasi, dan begitu sebaliknya. Dengan demikian ketiga jenis data tersebut saling melengkapi dan saling menyempurnakan, sehingga dihasilkan data yang integral (utuh) berisi keterangan-keterangan atau informasi tentang peran PTKIN dalam bangunan tatakelola kerukunan umat beragama di Aceh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kerukunan Beragama di Aceh

Masyarakat Aceh dikenal sebagai masyarakat yang “fanatik” dalam beragama, khususnya kaum mayoritas yang beragama Islam. Berbagai aspek kehidupan masyarakat tidak terlepas dari keberagamaan, baik ekonomi, politik, pendidikan, maupun sosial dan budaya. Bahkan dalam tradisi kehidupan masyarakat yang diwarisi secara turun-temurun dikenal suatu ajaran yang bersifat doctrinal berbunyi: “*Hukoum ngon Adat lage Zat ngon Sifeut*” (hubungan agama dengan adat/budaya bagaikan zat dengan sifat, alias tidak terpisahkan).

Terlebih lagi dengan pemberlakuan Syari’at Islam secara resmi di Provinsi Aceh, problematika keberagamaan menjadi isu sentral yang menyita banyak perhatian, baik dari unsur pemerintah hingga masyarakat arus bawah maupun dari kalangan agamawan/tokoh agama Islam dan non-Islam lainnya. Salah satu isu yang menjadi tantangan terbesar dengan upaya pemberlakuan Syari’at Islam adalah seberapa efektif upaya tersebut dapat menjamin dan mewujudkan iklim keberagamaan yang produktif, kontributif, dan kondusif dalam kehidupan masyarakat Aceh secara luas.

Dalam konteks tersebut, masalah “kerukunan” umat beragama di Aceh dalam berbagai aspek dan dimensinya menjadi sangat signifikan dalam perbincangan, kajian, dan pemberitaan di media-media lokal, nasional, dan bahkan internasional. Masalah kerukunan umat beragama ini pula menjadi bagian dari upaya pemerintah Indonesia yang telah mencanangkan program “Moderasi Beragama” dalam rangka mewujudkan kerukunan bagi seluruh umat beragama di Indonesia.

Reza Indria, antropolog sekaligus dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh, berpendapat bahwa moderasi beragama yang dipromosikan

pemerintah Indonesia saat ini ditujukan bagi seluruh pemeluk agama, muslim dan non-muslim.³⁷ Pandangan ini sangat representatif dan menjadi acuan bagi seluruh stakeholders, karena moderasi, toleransi, dan kerukunan umat beragama merupakan tanggung jawab bersama secara kolektif dan sinergis.

Jika mencermati fenomena kehidupan umat beragama di Aceh dewasa ini, terkait dengan aspek kerukunan, belumlah dapat dikatakan normatif atau bersifat ideal sebagaimana yang diharapkan. Masih terdapat riak-riak atau gejala konflik antar umat beragama (muslim dengan non-muslim) dan intern umat beragama (sesama muslim itu sendiri). Kendati konflik-konflik yang terjadi di Aceh selama ini dapat dikatakan masih berskala kecil, dibandingkan daerah-daerah lain yang sifatnya lebih agresif dan brutal, fenomena tersebut tentu saja “ironis” dan kontraproduktif dengan misi pemberlakuan Syari’at Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Problematika yang dideskripsikan di atas mengindikasikan kondisi kerukunan umat beragama di Aceh belumlah terwujud secara optimal. Profil kerukunan umat beragama belum terbangun secara konstruktif dan stabil, atau cenderung bersifat labil, dan masih berpotensi “disharmoni” dalam tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya. Paling tidak, suasana disharmoni tersebut terlihat masif atau dominan di berbagai media sosial dan lainnya, melalui pemberitaan, komentar, dan respon-respon negatif yang sangat polemis di kalangan masyarakat.

Di wilayah Kabupaten Aceh Barat, misalnya, fenomena kerukunan beragama hanya terlihat secara formal dan belum dapat dikatakan bersifat substansial. Berbagai perspektif tentang kerukunan beragama dapat dicermati dari pendapat dan pandangan masyarakat, akademisi, dan juga mahasiswa.

³⁷ <https://basajan.net/moderasi-beragama-bukan-hanya-untuk-umat-islam/>

Salah seorang mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Jannatin Nisa, berpendapat bahwa kerukunan beragama yaitu terciptanya keadaan atau kondisi yang mana para ummat dari berbagai agama seperti Islam, Budha, Hindu, Kristen, Katolik hidup Bersama secara rukun, damai, saling berkerja sama, saling tolong, saling menghormati tanpa memandang status agama tanpa membedakan status agama, tidak saling mencela dan menghina satu dan lainnya. Walaupun hidup dilingkungan yang sama, tetapi setiap umat mempunyai hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing dan umat lainnya wajib menghormati dengan tidak menistakan agama/ibadah agama yang lain, saling hidup dengan meyakini Tuhan masing-masing tanpa menyalahkan keyakinan umat yang lain, yakni saling bertoleransi.³⁸

Meskipun umat Islam menjaga hubungan antar umat, akan tetapi Jannatin Nisa juga tidak menyangkal bahwa Islam juga mempunyai konflik internal dalam agama yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran oleh masing-masing individu yang dapat memicu terjadinya klise antar umat islam sendiri seperti dalam hal beribadah, didapati banyak perbedaan pendapat namun klise ini tidak sampai menimbulkan permasalahan yang serius dalam Islam sendiri.³⁹

Terkait dengan kondisi di wilayah Aceh Barat, salah seorang dosen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan terkait kerukunan beragama mengatakan bahwa:

“Komunikasi dan interaksi masyarakat yang muncul ke permukaan, sebagai gambaran fenomena sosial, dapat dikatakan tergolong kondusif.

Namun terdapat upaya sekelompok masyarakat yang bersifat eksklusif, sebagai kelompok mayoritas yang mendominasi otoritas. Mereka berasal dari kalangan Islam tradisional (Dayah) yang ingin menguasai dan mendominasi wilayah di Aceh Barat. Mereka bahkan mencurigai upaya rehabilitasi Gereja di sana dan mempersoalkan IMB Gereja tersebut.

³⁸ WW. dengan Jannatin Nisa, aktivis mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

³⁹ WW. dengan Jannatin Nisa, aktivis mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Mesjid Agung Kota Meulaboh (UPTD), sebagai masjid Kabupaten, juga kerap dipaksakan untuk mengikuti “ideologi Dayah” dalam setiap praktik atau kegiatan ritual peribatan.

Secara kasat mata perselisihan atau riak gejolak kontroversi antara kalangan masyarakat Islam tradisional (Dayah) dengan masyarakat non-tradisional (urban/Islam modern) tidak terlihat. Tidak terjadi konflik antar pemeluk agama di Aceh Barat, baik intern (antar sesama muslim) maupun antar agama (muslim dengan non-muslim).

Perselisihan atau perseteruan muncul di media sosial, terjadi polemik yang menghambat antara kelompok mainstream tradisional dengan kelompok non tradisional. Beberapa kasus yang terjadi seperti penolakan via media sosial terhadap pengelolaan Masjid Jabir al-Ka’bi oleh kelompok Salafi, yang disinyalir oleh Salafi tersebut sebagai masjid kelompok Wahabi, padahal jama’ahnya hanyalah mayoritas masyarakat perkotaan (urban). Fenomena ini tidak terlepas dari pengaruh konflik beragama (Salafi-Wahabi) yang pada mulanya terjadi di Banda Aceh.

Secara umum gaya atau pola beragama masyarakat Aceh Barat yang didominasi oleh mainstream kaum Salafi (tradisional) cenderung bersifat eksklusif dan tidak toleran.”⁴⁰

Maysarah, aktivis Mahasiswa STAIN Tgk. Dirundeng Melaboh, mengatakan: “Jika kita membahas dalam aspek internal Islam sendiri, khususnya Aceh Barat itu merupakan hal yang lebih mudah ditemukan di kabupaten Barat Selatan ini, seperti pertentangan Wahabi, Syiah dan ajaran sesat akan tetapi hingga saat ini belum ada pertumpahan darah yang terjadi akibat pertentangan hal tersebut.”⁴¹

Maysarah menambahkan bahwa kerukunan beragama berlangsung manakala beberapa penganut agama hidup dengan rukun saling menghormati ibadah lain, tidak melecehkan dan khususnya di Aceh Barat ini yang mana mayoritas Islam dan juga terdapat beberapa agama lain, tapi kita lihat sendiri penganut agama minoritas ini bisa beribadah dengan khidmat sebagaimana umat Islam beribadah, kita tidak pernah mendengar antar agama saling bentrok, saling mengganggu, saling merusak dan

⁴⁰ WW. dengan salah seorang dosen/peneliti STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

⁴¹ WW. dengan Maysarah, Aktivis Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

melecehkan di Aceh Barat ini, setiap agama di Aceh Barat ini hidup dengan sangat toleran, kalau menurut saya Aceh Barat adalah salah satu kabupaten yang sangat menghargai dan menjaga kerukunan antar agama.⁴²

Disamping perspektif individual yang dikemukakan di atas, juga terdapat perspektif institusional tentang kerukunan sebagaimana pandangan Ketua FKUB Aceh Barat berikut ini:

“FKUB menjalankan misi nasional dalam rangka implementasi Pancasila, dan berdasarkan UUD 45. Setiap sila dari Pancasila mencerminkan kerukunan dan kedamaian bagi seluruh bangsa Indonesia, dan hal ini harus mampu kita wujudkan. Dan terlebih penting lagi adalah FKUB melaksanakan misi Islam itu sendiri dalam mewujudkan *Rahmatan Lil’alamin*, misi ini bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.”⁴³

Akan tetapi muatan perspektif tersebut terkesan hanya bersifat normatif. Memang benar, tugas pemerintah bersama elemen terkait termasuk FKUB terutama adalah mewujudkan kerukunan umat beragama di wilayah masing-masing, sebagaimana wilayah Aceh Barat. Bagi pihak pemerintah tentu saja tidak mudah untuk bersikap dan berbuat yang ideal.

Salah seorang tokoh agama Aceh Barat mengatakan bahwa pemerintah daerah terkesan melindungi kalangan tradisional untuk “mempertahankan ketertiban dan kenyamanan masyarakat serta stabilitas pemerintahan”, sebagaimana kebijakan Bupati sekarang yang sudah dua periode menjabat. Sebelumnya, Kota Meulaboh (Sebagian besar wilayah Aceh Barat), didominasi oleh kalangan Muhammadiyah (Islam Kota). Tetapi belakangan ini lebih didominasi oleh Dayah Salafi, termasuk penguasaan Mesjid Agung (masjid Kabupaten) yang oleh Pemerintah Daerah secara tidak langsung diberikan kepada otoritas kalangan Dayah.⁴⁴

Di satu sisi Pemerintah Daerah Aceh Barat mensuport lembaga FKUB dan berupaya mengimplementasikan program moderasi beragama

⁴² WW. dengan Maysarah, Aktivistis Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

⁴³ WW. dengan Ketua FKUB Aceh Barat.

⁴⁴ WW. dengan salah seorang Tokoh Agama Islam Aceh Barat.

sebagai amanah Pemerintah Pusat. Namun di sisi lain Pemerintah Daerah tidak mampu bersikap moderat lantaran berbagai tuntutan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat yang menghendaki keberpihakan pada kelompok mayoritas.

Secara keseluruhan, berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerukunan beragama di Aceh lebih terwujud dalam konteks antarumat beragama, antara masyarakat muslim (mayoritas) dengan non-muslim (minoritas), dibandingkan intern umat beragama atau antar sesama muslim itu sendiri. Salah seorang tokoh Agama Buddha yang berdomisili di Banda Aceh mengatakan bahwa selama ini umat Buddha di Aceh dapat menjalankan ibadah dan kegiatan-kegiatan keagamaan dengan baik. Mereka merasa nyaman tanpa gangguan dan tanpa tekanan dari pemeluk agama lain. Bahkan tokoh atau pemuka agama mereka juga diundang oleh UIN Ar-Raniry untuk berdialog dan sharing pengalaman.⁴⁵ Demikian juga pendapat salah seorang tokoh Agama Kristen bahwa kerukunan antar umat beragama di Aceh sudah berjalan dengan baik. Tokoh tersebut bahkan merasa heran dengan pemberitaan bahwa indeks kerukunan beragama di Aceh masih tergolong rendah atau berada di urutan bawah.⁴⁶

Akan tetapi berbeda halnya dengan konteks kerukunan intern umat beragama, yang dapat dikatakan belum terwujud secara maksimal, karena polemik dan konflik internal masyarakat Islam masih berlangsung secara intensif, terutama antara kalangan masyarakat Islam tradisional sebagai mayoritas dengan non-tradisional sebagai minoritas. Dominasi kelompok mayoritas terhadap minoritas menjadikan bangunan kerukunan beragama tidak dapat berdiri kokoh dan terombang-ambing oleh berbagai faktor kepentingan yang bersifat eksklusif dan bernuansa politis.

⁴⁵ WW. dengan salah seorang Tokoh Agama Buddha di Banda Aceh.

⁴⁶ WW. dengan salah seorang Tokoh Agama Kristen di Banda Aceh.

Fenomena tersebut memang terkesan beralasan lantaran jumlah populasi masyarakat Aceh yang didominasi oleh umat Islam. Jika problematika kerukunan atau moderasi beragama di Aceh cenderung bersifat intern umat beragama, antar kelompok masyarakat Islam itu sendiri (tradisional dengan non-tradisional), itu terjadi akibat perbedaan latar belakang pendidikan dan aspek sosial-budaya lainnya. Kecenderungan perbedaan ini, yang berakibat munculnya polemik atau konflik wacana di berbagai media, merupakan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara tuntas, kecuali hanya dapat diminimalisir agar tidak semakin menghangat dan berdampak negatif lebih besar bagi kehidupan masyarakat.

B. Potensi dan Sumberdaya Kerukunan Beragama di PTKIN

Secara substansial indikator suatu keterlibatan, peran-serta, atau “peran” juga dapat dipahami dari aspek potensi dan sumberdaya yang tersedia. Demikian halnya potensi dan sumberdaya kerukunan beragama yang dimiliki oleh suatu institusi atau perguruan tinggi. Potensi dan sumberdaya merupakan infrastruktur yang konstruktif dan strategis, sebagai modal dasar, untuk mencapai suatu tujuan dalam rangka mewujudkan harapan dan cita-cita.

Persoalan kerukunan atau moderasi beragama bukanlah hal yang asing dalam berbagai wacana dan perbincangan di perguruan tinggi di Aceh. Diskusi terkait kerukunan atau moderasi semakin populer di kalangan akademisi, bukan hanya dalam lingkup pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Menurut Reza Indria, ketika berbicara moderasi beragama di Aceh, tidak bisa dilepaskan dari *stereotype* yang berkembang di Indonesia dalam cara melihat Aceh. Selain itu, informasi yang dikembangkan secara global di media nasional dan internasional, Aceh diproyeksikan sebagai daerah yang fanatik dan radikal. “Ini sebenarnya tidak baru, karena terkait dengan

peradaban Barat ketika mereka bertemu dengan Aceh (di masa lalu-red), yang tidak mau tunduk. Sehingga mereka melabelkan orang Aceh itu sebagai fanatik dan radikal, sebagaimana terdapat di dalam catatan kolonial yang dapat kita akses hingga hari ini.”⁴⁷

Reza Indria juga berpendapat bahwa adagium yang mengatakan Aceh adalah Islam akan menjadi modal orang Aceh. Dengan menjadi Aceh, maka menjadi muslim toleran, menawarkan konsep harmonis, *tawazun* (seimbang) dan *tabayun* dalam mendengarkan berita. “Konsep itu sudah ada dalam Islam, namun proyek kita ke depan bagaimana kita membahasakan dengan bahasa yang lebih dekat dengan bahasa kita sehari-hari.”⁴⁸

Jika pandangan tersebut dikaitkan atau dilibatkan dalam konteks akademis, tentu saja peran PTKIN tidak dapat diabaikan. Terlebih lagi untuk wilayah Provinsi Aceh yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Provinsi Aceh memiliki beberapa PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri), di antaranya UIN Ar-Raniry Banda Aceh; IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa; dan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Ketiga PTKIN ini juga didedikasikan untuk mampu mewujudkan tatanan kerukunan umat beragama di Aceh sembari mengemban misi Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai kewajiban utama.

Sebagai PTKIN terbesar di Provinsi Aceh, UIN Ar-Raniry memegang peran penting dalam konteks kerukunan umat beragama melalui program nasional moderasi beragama yang telah digulirkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian moderasi beragama sudah resmi menjadi program resmi yang harus dituangkan dalam sistem pendidikan tinggi di UIN Ar-Raniry, baik dalam muatan kurikulum pembelajaran,

⁴⁷ <https://staindirundeng.ac.id/2020/09/stain-meulaboh-bentuk-seuramoe-moderasi-beragama/>

⁴⁸ <https://staindirundeng.ac.id/2020/09/stain-meulaboh-bentuk-seuramoe-moderasi-beragama/>

program-program kegiatan yang direncanakan, dan strategi pengembangan kelembagaan serta penguatan kapasitas SDM civitas akademika pada umumnya.

1. Potensi dan Sumber Daya di UIN Ar-Raniry

UIN Ar-Raniry Banda Aceh memiliki visi, misi, tujuan, dan motto (sesuai dengan PMA Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry) sebagai berikut:

Visi: Menjadi Universitas Yang Unggul dalam Pengembangan dan Pengintegrasian Ilmu Keislaman, Sains, Teknologi dan Seni.

Misi:

1. Melahirkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik, profesi dan/atau vokasi yang kompetitif, berorientasi pada masa depan dan berakhlak mulia.
2. Mengembangkan tradisi riset yang multidisipliner dan integratif berbasis syariat Islam.
3. Mengimplementasikan Ilmu untuk membangun masyarakat madani, yang beriman, berilmu dan beramal.

Tujuan :

1. Meningkatkan Kemampuan akademik yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman dan seni yang dijiwai nilai-nilai keislaman
2. Menyiapkan Mahasiswa agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlakul karimah
3. Membangun Kepribadian Civitas Akademika
4. Meningkatkan Mutu dan Budaya Akademik
5. Meningkatkan Mutu layanan Akademik dan keuangan
6. Meningkatkan Kemampuan dan Budaya Meneliti Dosen dan Mahasiswa

7. Meningkatkan Kemampuan Dosen dan mahasiswa dalam Pengembangan Pengabdian masyarakat
8. Meningkatkan Kualitas Kerjasama
9. Memberdayakan Potensi Alumni dalam proses pembangunan masyarakat
10. Memberikan akses Pendidikan bagi masyarakat marginal.⁴⁹

Selain visi, misi, dan tujuan tersebut, secara potensial UIN Ar-Raniry juga memiliki beberapa sumber daya yang dapat mendukung upaya untuk mewujudkan kerukunan umat beragama:

a. Kurikulum Pembelajaran

Secara umum beberapa di beberapa prodi di UIN telah mengajarkan kurikulum yang bermuatan kerukunan umat Bergama, khususnya Prodi Studi Agama-agama, Prodi Sosiologi Agama, Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Prodi Manajemen Dakwah Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam dan Prodi Kesejahteraan Sosial.

Adapun komponen mata kuliah universitas yang wajib diambil oleh setiap mahasiswa telah bermuatan nilai dan prinsip kerukunan beragama, seperti Studi Syariat Islam, Ilmu budaya Dasar, Ilmu Kalam dan Dirasah Islamiah.⁵⁰

Hal ini sesuai dengan pendapat dari salah seorang Guru Besar di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Prof. Syamsul Rijal, bahwa Kurikulum UIN Ar-Raniry secara umum telah ada bermuatan kerukunan umat beragama, jika dilihat dari pilar-pilar kerukunan yang diajarkan di beberapa MK yang ada di PTKIN. Namun jika dilihat secara khusus tidak ada Kurikulum tentang kerukunan umat beragama di UIN Ar-Raniry.

Prof. Hamid Sarong menegaskan sudah seyogyanya PTKIN menjadi Pilar terdepan dalam mempelajari dan hadir di tengah-tengah Kehidupan

⁴⁹ <http://uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/visi-dan-misi>.

⁵⁰ *Buku Panduan Akademik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019/2020.*

Umat beragama untuk membina kerukunan beragama yang semakin mengerus saat ini. Sebab hampir semua muatan kurikulum UIN/ MK diajarkan dengan prinsip dan nilai-nilai keislaman, diharapkan akan lahir manusia terdidik yang bermanfaat bagi orang lain, seperti bagaimana seorang itu bisa berkomunikasi baik dengan orang lain, bagaimana seseorang itu bisa menghargai orang lain, bagaimana seseorang itu harus harus tolong-menolong dalam kehidupan dan nilai tolong menolong itu semua telah digariskan sama ada dalam studi keislaman maupun dalam antropologi dalam prinsip-prinsip sosial di masyarakat. Dengan demikian diharapkan dari ilmu-ilmu yang dikembangkan dalam kurikulum PTKIN dapat diterapkan oleh mahasiswa untuk menjadi individu yang memiliki Visi dasar menjadi insan yang hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membentuk kerukunan umat beragama dan moderasi beragama.⁵¹

Prof. Hamid Sarong menjelaskan bahwa UIN Ar-Raniry telah lama mengaplikasikan pendidikan kerukunan dalam kurikulumnya. Seperti Prodi perbandingan Mazhab, yang alah satu dasar pendidikannya dalah kerukunan intern agama dengan megenal berbagai mazhab yang dalam masysarakat Islam. Mealalui pemahaman mazhab yang mashur di masyarakat muslim, maka kita bisa tumbuh dan berkembang, serta beragama secara moderasi. Kita paham mazhab orang lain dan Kita paham tingkah orang lain, itulah yang disebut dengan bingkai moderasi. Tapi kalau kita ekstrim sendiri, kita hanya pentingkan pemahaman kita sendiri, tidak mau paham tentang pemahaman orang lain, disitulah timbulnya intoleransi. Kita mau menang sendiri hebat sendiri.

Beliau melanjutkan, “saya rasa betul kalau dulu tahun 70-an, angkatan 70-an di IAIN ini semua jurusan dan semua fakultas

⁵¹ WW. dengan Prof. Dr. Syamsul Rijal, M.Ag (Guru Besar Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Araniry).

memperoleh mata kuliah perbandingan mazhab. Dulu dosennya pak Ismuha kuliahnya di Aula, Semua masuk di situ, siapa yang berani tampil kedepan menjelaskan perbandingan mazhab dia lulus, kalau belum berani nggak lulus-lulus. Walaupun bertahun-tahun ada kemungkinan 2 tahun baru lulus, ya begitu”.

Menurut Prof. Hamid Sarong peran PTKIN itu sudah maksimal tinggal lagi mungkin mahasiswa atau yang terlibat dari PTKIN saat ini, belum dapat menghayati tentang ilmu ilmu pengetahuan yang diajarkan saat ini. Ilmu pnetahuan luas sekali. Manusia dengan kemampuan yang terbatas hanya bisa memahami sebagian kecil dari kepingan-kepingan ilmu yang luas itu. Dengan kata lain, pemahaman terhadap sekeping ilmu itu jangan diperdebatkan dengan kepingan-kepingan pemahaman orang lain, karena orang lain memahaminya seperti yang lain lagi. Jadi jangan kita klaim yang kita paham itu yang benar, yang orang lain paham itu tak benar. Di situlah menurut kunci kesuksesan moderasi beragama.⁵²

Adapun figur kerukunan beragama yang berasal dari UIN, menurut Prof. Hamid Sarong, adalah Alm. Prof. Ismuha yang menulis buku, menerjemahkan buku berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Salah satu bukunya adalah *Pengantar Perbandingan Mazhab* sebanyak dua jilid. Dan beliau mengajarkan tentang perbandingan Mazhab dalam bahasa Arab. Dengan buku dan langsung diajarkan penulisnya kita akan sangat mudah untuk memahami dengan sebenar pemahaman. Saat ini jarang kita temukan dosen sekaliber beliau.

Selanjutnya saran Prof. Hamid Sarong adalah perlunya usaha PTKIN ntuk menyempurnakan kurikulum yang ada, dengan narasi buku-buku rujukan yang yang tepat. Tidak hanya narasi informasi-informasi ilmu pengetahuan yang muncul secara liar tanpa dibingkai dengan narasi

⁵² WW. dengan Prof. Dr. A. Hamid Sarong (Guru Besar FSH UIN Ar-Raniry/Ketua FKUB Aceh).

yang dibingkai ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kearifan lokal kebinekaan bangsa Indonesia.

b. Renstra dan Program Kerja

Walaupun selama ini UIN Ar-Raniry telah banyak melakukan program kerja terkait dengan kerukunan beragama di masyarakat, namun belum maksimal dan terstruktur. Sebagaimana yang diutarakan Prof. Syamsul Rijal, bahwa selama ini PTKIN belum begitu serius dalam pengembangan program kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi UIN terkait kerukunan beragama.

Karena apa yang beliau amati selama ini dalam mengorganisir dan mendesain organisasi tidak cukup hanya satu dua kali seminar melalui daring, namun harus ada fokus grup diskusi (FGD) yang sistematis dan berkesinambungan. Kaitan pendalaman konsep terkait kerukunan di Aceh, penelitian guna melihat persoalan sosiologi di masyarakat, menganalisis dengan kepakaran masing-masing bidang ilmu, sehingga dapat dipetakan problematika sekaligus memberikan solusi kepada apa yang diperoleh di lapangan. Aktivitas yang terstruktur, sistematis dan berkesinambungan akan membantu pimpinan universitas, Dosen, mahasiswa bahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan publik saat ini.

Seperti halnya Prof. Syamsul Rijal, Prof. Hamid Sarong menambahkan bahwa Renstra yang ada sudah tidak *up to date* lagi, sudah lama mungkin, maka diperlukan renstra baru. Perlu dibuat kerangka-kerangka toleransi, seperti rumah toleransi atau rumah moderasi beragama yang ada itu belum cukup, tidak cukup dengan gambar-gambar, tidak cukup dengan fragmentasi fragmentasi, tidak cukup dengan contoh-contoh, namun harus dilengkapi dengan kerangka berpikir dalam bingkai ilmiah dalam narasi intelektual yang baik. Sehingga diharapkan Renstra yang ada dapat dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal yang unik. Arahkan isinya tergantung pada PT

masing-masing, di Aceh berbeda dengan di Sumatera Utara, berbeda dengan di Lampung, berbeda dengan di Jawa, jangan disamaratakan dan diseragamkan. Moderasi beragama masing-masing daerah itu ada ciri khas sendiri, harus dibangun, dibina dan dipupuk agar masyarakat bisa hidup secara aman dan damai.⁵³

c. Tenaga Pengajar/Dosen

Keberadaan SDM dari UIN Ar-raniry selama ini sangat diperhitungkan dalam pembentukan kerukunan umat beragama di Aceh. Beberapa orang Dosen UIN menjadi pengurus FKUB di provinsi dan Kabupaten Kota. ada yang menjadi ketua dan sebagian besar anggota. Sebagian dari mereka ada menjadi nara sumber di beberapa event terkait kerukunan umat beragama dan sebagian lagi menjadi Juru Dakwah, relawan dan fasilitator dalam sosialisasi dan pembinaan sikap kerukunan umat beragama di masyarakat. Namun sering sekali kegiatan yang dilakukan oleh SDM UIN dilakukan secara pribadi bukan atas nama penugasan dari PTKIN.

Menurut Prof. Hamid Sarong, sudah banyak SDM UIN yang berkiprah di ranah kerukunan umat beragama. Saya kira kalau diterjemahkan sampai ke tingkat moderasi beragama sampai ke tingkat toleransi itu sudah banyak dosen UIN yang berkiprah di perguruan tinggi di Aceh bahkan Indonesia. Bahkan menurutnya seorang dosen harus mendalami persoalan-persoalan seperti toleransi dan moderasi Beragama yang ada saat ini. Seorang dosen tidak cocok seorang dosen UIN membangun pemahaman-pemahaman ekstrem sementara dia berada di dalam perguruan tinggi lingkup PTKIN.

⁵³ WW. dengan Prof. Dr. A.Hamid Sarong (Guru Besar FSH UIN Ar-Raniry/Ketua FKUB Aceh).

d. Penelitian Dosen

Adapun sumbangsih keilmuan dan akademik SDM PTKIN terdapat pengembangan kerukunan umat beragama di Aceh cukup membanggakan. Ada sejumlah penelitian yang dilaksanakan oleh Pusat penerbitan dan penelitian UIN Ar-Raniry, diantaranya, buku dinamika kerukunan umat beragama di masyarakat aceh (Ushuluddin Press), sikap toleransi beragama siswa SMU di Banda Aceh (Jurnal Substantia, 2019), dll.

e. Lembaga Rumah Moderasi Beragama

Menteri Agama Jenderal (Purn) Fachrul Razi meresmikan Rumoh Moderasi UIN Ar-Raniry, Senin, 14 Desember 2020. Rumoh Moderasi menjadi jalur untuk menyebarkan nilai-nilai keberagaman dan kerukunan di Aceh. Ia mengatakan, soal kerukunan di Aceh sudah selesai. Hanya saja saatnya Aceh menyebarkan nilai-nilai keberagaman ke daerah lainnya.

Sikap moderasi sangat penting bagi suatu bangsa. Ia menjelaskan, moderasi beragama telah masuk dalam Rancangan Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, UIN Ar-Raniry.

UIN Ar-Raniry telah lama mengimplementasikan konsep moderasi ini yang mengacu kepada Renstra tersebut dengan nama Rumoh Moderasi. Hal ini juga sejalan dengan visi UIN kita yaitu: Menjadi Universitas yang Modern dalam Keislaman, Kebangsaan dan Keuniversalan.

Menurut Prof. Hamid Sarong, rumah moderasi beragama itu hanya fragmen-fragmen saja. fragmen kepingan-kepingan dari makna pelaksanaan moderasi yang luas. Maka perlu didasari dengan intelektual pengetahuan yang cukup kalau tidak ia tidak banyak manfaatnya, akan menjadi mainan-mainan saja, puranya, ditonjolkan sekedar pencitraan. Menurutnya fragmen yang ada tersebut mesti dilengkapi dan dikawal secara baik yang melibatkan dosen, mahasiswa dan masyarakat yang di bangun diatas nasari inteltual dan kearif lokal

masyarakat Aceh. Rumah moderasi di PTKIN adalah rumah yang diisi oleh bagi kaum intelektual dengan dasar ilmu yang mantab. Seperti pertanyaan mengapa kita harus memahami pemahaman orang, Kenapa kita harus memahami agama orang, apa kita harus menghormati dia, kita hormati dia, pertanyaan ini dapat di jawab dengan memeberi contoh bahwa agama kita ini menentramkan sebagaimana kita ikuti semua ajaran Rasulullah. Jika kita mengikuti ajaran Rasullah, maka tidak ada masalah dalam kehidupan bermasyrskat. Bagaimana Rasulullah bisa bertingkah laku yang menyenangkan orang Yahudi, menyenangkan orang Nasrani, sehingga orang-orang yang seperti itu Ingat kepada rasul Nabi Muhammad. Katakanlah mereka tidak berpindah agama tapi ingat dia bahwa itu orangnya baik sekali, orangnya terpercaya sebelum Nabi Muhammad diresmikan sebagai Rasul, Nabi Muhammad sudah terkenal sebagai orang jujur sebagai orang percaya. Sebagai pribadi yang terhormat, kenapa kita tidak mampu bilang bahwa saya adalah pengikut Rasulullah yang mulai, agar tingkah laku kita juga akan mendamaikan dan menyenangkan orang lain selam itu sesuai dengan syariat Islam.⁵⁴

Selain itu, juga dilaksanakan Workshop Moderasi Beragama bagi Dosen UIN Ar-Raniry, mengambil Tema *Moderasi Beragama: Strategi Penetrasi Pemahaman Nilai Keagamaan dalam Pendidikan Tinggi Islam*.berlangsung empat hari, yaitu 22 25 Juni 2021 yang diikuti 160 dosen dari berbagai disiplin ilmu. Narasumber Workhop Dr. Ahmad Suaedy, Dekan Fakultas Islam Nusantara, Universitas Nahdatul Ulama, Jakarta dan Dr. Junaidi Simun, Manager Riset dan Advokasi, Institut Titian Perdamaian (ITP), Jakarta.⁵⁵

⁵⁴ WW. dengan Prof.Dr. A.Hamid Sarong (Guru Besar FSH UIN Ar-Raniry/Ketua FKUB Aceh).

⁵⁵<http://www.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/posts/uin-ar-raniry-banda-aceh-laksanakan-workshop-moderasi-beragama>.

Menurut Ketua Panitia, Khatib A. Latief, tujuan dilaksanakan workshop ini untuk menelusuri gagasan dan pemikiran moderasi beragama yang dapat diterapkan dosen di dalam proses pembelajaran dan mencari langkah-langkah dinamis untuk membangun moderasi beragama dalam kerangka pluralisme bangsa. Diharapkan dari workshop ini dapat (1) teridentifikasi gagasan perumusan moderasi beragama yang kontekstual dengan kultur Aceh yang religus; (2) lahir rumusan umum moderasi beragama dalam Pendidikan tinggi Islam di Aceh; (3) teridentifikasi langkah-langkah dinamis, berkeadilan, dan berimbang dalam penerapan moderasi beragama di dunia pendidikan di Aceh; (4) mampu menumbuhkan kembangkan sikap toleransi dan akomodatif terhadap nilai religusitas agama dalam budaya Aceh.

Menurut Narasumber Workshop Dr. Ahmad Suaedy, Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Islam mengatakan beberapa alasan mengapa Moderasi Beragama penting. *Pertama*, tidak bisa disangkal bahwa tradisi nusantara dan Indoensia menempatkan agama dan kepercayaan sebagai elemen yang sangat penting. Karena itu suatu usaha perubahan yang tidak mengikutkan agama sangat sulit untuk mencapai keberhasilan. Namun mengikutkan agama tidak selalu berarti menetapkan elemen-elemen ajaran agama konvensional atau mapan dalam ranah publik atau pemerintahan melainkan bisa dengan mereview atau mengkritiknya agar nilai-nilai dan juga kelembagaan agama sejalan dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan memberikan kontribusi bagi solusi berbagai problem dalam masyarakat mutakhir.

Kedua, fenomena adanya radikalisme dan terorisme yang mengancam kekerasan dan pemusnahan manusia berbasis pada agama. Namun radikalisme dan terorisme tidak bisa ditempatkan sebagai sumber utama dari masalah itu sendiri. Ia lebih sebagai akibat. Maka harus dicari sebab fundamental dari fenomena tersebut. Tradisi peran agama di dalam pemerintahan nusantara ini dianggap bertentangan dengan tradisi di barat

yang sekularistik. Maka kini harus dicari cara baru atau revitalisasi peran agamawan dan elemen-elemen agama dalam sistem bernegara dan berpemerintahan.

Ketiga, era disrupsi dan TI (Teknologi Informasi) mengancam stabilitas masyarakat karena tiadanya atau terhapusnya otoritas dalam masyarakat dan budaya termasuk otoritas agama, hukum dan negara bahkan metodologi ilmu pengetahuan. Sehingga terjadi polarisasi yang kompleks dalam masyarakat. Siapa yang kuat dan menguasai teknologi maka itulah yang menang. Ini bukan hanya membahayakan sistem kenegaraan dan pemerintahan melainkan juga sosial, budaya dan kemanusiaan. Perlu dicari suatu pola dan nilai-nilai baru yang bisa diterima oleh masyarakat “zaman now” dengan karakter teknologi informasi dan disrupsi tersebut. Program MB harus bisa menempatkan pada pencarian solusi itu.

Keempat, Indonesia begitu luas dan begitu plural dan multikultural dan ciri paling utama adalah kepulauan, sehingga tidak mudah untuk memahami dasar-dasar bersama dan tidak mungkin dibangun sistem terpusat dengan mengabaikan yang kecil, pinggiran dan lemah. Karena itu, bentuk MB diharapkan bisa menyerap perbedaan-perbedaan tersebut namun di lain pihak bisa dibangun suatu titik temu dan kesadaran bersama yang baru. Di sini perguruan tinggi diharapkan memberi peran dalam terbangunnya basis etika bersama dan baru tersebut.

Kelima, Islam memiliki sejarah yang panjang dan mendalam di nusantara dan Indonesia. Namun tingkat ketebalan dan perannya serta dimensinya berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain. Aceh, misalnya, berbeda dengan Jawa, Makassar, NTB dan seterusnya.

Namun Islam juga tidak hanya memperkenalkan model institusi dan pengetahuan yang mapan melainkan Islam juga berkembang dalam rangka menjawab tantangan zaman tersebut. Maka perguruan tinggi Islam sangat diharapkan perannya dalam membangun dan mengoperasikan program

MB tersebut. Sehingga MB bukan suatu formula teh botol atau coca-cola melainkan setiap daerah bisa dan bahkan harus memiliki pola dan ukurannya sendiri. Dari sana bisa dibangun suatu dialog yang terus menerus dan menuntun negara dan pemerintahan dalam menjawab berbagai tantangan tersebut.

Program Moderasi Beragama bukan hanya menjawab tentang radikalisme keagamaan melainkan problem kemanusiaan. Karena itu pula moerasi beragama bukan semacam mata kuliah akhlak dan bukan hanya berlaku bagi negara dan pemerintah melainkan diharapkan menjadi “cara berpikir, bersikap, dan berperilaku setiap warganegara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka, sesungguhnya dalam konteks perguruan tinggi apalagi perguruan tinggi agama Islam moeras beragama ini bukan hanya menanamkan apalagi indoktrinasi melainkan diperdebatkan baik dalam nilai-nilai asasi, metodologinya maupun strateginya sesuai dengan landasan negara dan bangsa serta tantangan-tantangannya.

Sementara narasumber ke dua Dr. Junaidi Simun, Manager Riset dan Advokasi, Institut Titian Perdamaian (ITP), Jakarta. Menjelaskan, bahwa Moderasi beragama adalah upaya dan proses peletakan pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang dilakukan secara benar, seimbang, dan fungsional. Upaya dan proses ini diyakini dimiliki semua agama namun karena berada pada tataran non substansial ajaran agama menyebabkan multitafsir dan keliru implementasinya. Karenanya moderasi beragama adalah upaya pengembalian pemahaman individu beragama ke moderat; bukan memoderatkan agama.

Islam sendiri menawarkan konsep tentang moderasi beragama, yaitu mengambil jalan tengah (*tawassuth*), berkeseimbangan (*tawazun*), lurus dan tegas (*i'tidal*), toleransi (*tasamuh*), egaliter (*musawah*), musyawarah (*Syura*), reformasi (*Ishlah*), dan mendahulukan (*aulawiyah*), dan dinamis dan inovatif (*tathawwur wa Ibtikar*). Moderasi beragama harus dipahami

sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Dosen merupakan elemen penting karena pendidikan tinggi dianggap media yang paling penting, strategis, efektif, dan sekaligus rentan diseminasi pemahaman yang keliru baik tentang ajaran agama maupun teori kehidupan lain.

2. Potensi dan Sumber Daya di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Demikian halnya STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, kendati dengan kapasitas yang relatif berbeda dengan UIN Ar-Raniry juga memiliki beberapa potensi dan sumberdaya yang dapat mendukung kerukunan beragama.

Secara fundamental, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh memiliki visi, misi, tujuan, dan motto (sesuai dengan PMA Nomor 55 Tahun 2016 tentang Statuta STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh) sebagai berikut:

1. Visi: "Menjadi institusi pendidikan yang unggul dan kompetitif dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman".
2. Misi: "Melahirkan sarjana yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam rahmatan lil' alamin.".
3. Tujuan: a) meningkatkan pemerataan dan memperluas akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan tinggi keislaman; dan b) meningkatkan kualitas dan pelaksanaan syariat Islam di wilayah barat selatan Aceh.
4. Moto: "keikhlasan, inovatif, dan berakhlak mulia".⁵⁶

Jika ditelaah secara seksama, visi misi dan motto tersebut mencerminkan aspek kerukunan dan moderasi beragama. Salah seorang mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh mengatakan:

⁵⁶ <https://staindirundeng.ac.id/visi-dan-misi/>

“Kerukunan Beragama adalah saling menghormati masing masing agama tanpa ikut campur tangan dalam antar agama, seperti sabda Rasulullah “untukmu agamamu, dan untukku agamaku”.⁵⁷

Secara lebih konstruktif, beberapa potensi dan sumber kerukunan beragama yang dimiliki STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dapat dideskripsikan sebagai berikut.

a. Kurikulum Pembelajaran

Inayatillah, Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh menjelaskan bahwa moderasi beragama juga perlu dikembangkan di lembaga pendidikan, dalam hal ini dapat dilakukan melalui penguatan kurikulum Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Kewarganegaraan dan lainnya. Selain itu juga harus didukung dengan kemampuan tenaga pendidik dalam menanamkan paradigma moderasi kepada mahasiswa.⁵⁸

Inayatillah melanjutkan, dari segi pemerintah, selain melalui aturan-aturan, nilai-nilai moderasi beragama harus diaktualisasikan lewat sikap bernegara, beragama dan berbangsa oleh pejabat pemerintah, sehingga menjadi teladan bagi milenial.

“Dengan adanya pendidikan dan pembinaan yang baik, maka akan melahirkan milenial-milenial dengan karakter moderat yang mampu membawa perubahan di tengah-tengah masyarakat,” jelasnya.⁵⁹

Menurut keterangan dari Jannatin Nisa, aktivis mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, di mata kuliah Aqidah Akhlak mereka pernah belajar mengenai kerukunan beragama, akan tetapi tidak secara difokuskan, hanya sepintas dikarenakan materi mata kuliah menyangkut tentang sikap dan akhlak yang baik bagi seorang muslim.⁶⁰

Maysarah, juga aktivis Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng

⁵⁷ WW. Maya Sartika, Ketua Dema STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

⁵⁸ <https://staindirundeng.ac.id/2020/09/stain-meulaboh-bentuk-seuramoe-moderasi-beragama/>

⁵⁹ <https://staindirundeng.ac.id/2020/09/stain-meulaboh-bentuk-seuramoe-moderasi-beragama/>

⁶⁰ WW. dengan Jannatin Nisa, aktivis mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Meulaboh, mengatakan: Saya pernah belajar sejarah peradaban Islam, Filsafat, disitu diajarkan kita untuk bersikap belas kasih dan betapa indahnya Islam tanpa kerusakan, implementasi dari mata kuliah tersebut saya lihat sudah mulai dijalankan oleh kabupaten Aceh Barat sendiri.⁶¹

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sendiri sangat berperan Ketika mahasiswanya mampu untuk bisa memberi pemahaman bahwa tidak ada yang perlu diributkan dalam hal agama, seperti ayat “lakum dinukum waliyadin” ‘bagimu agamamu bagiku agamaku’ dan Ketika dosen memberikan ilmu yang berkaitan dengan hal kerukunan disitulah peran STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam membangun pemahaman saling cinta, saling menghormati, saling belas kasih terhadap sesama umat, walaupun tidak ada mata kuliah yang dikhususkan mengulas kerukunan beragama.⁶²

Menurut Maya Sartika, Ketua Dema STAIN STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, .mereka diajarkan kerukunan oleh dosen di sela sela mata kuliah agama, namun tidak ada silabus yang berfokus dalam pembahasan Kerukunan beragama yang saya tahu.⁶³

Kendati demikian, secara implisit STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh memiliki muatan kurikulum yang bersentuhan dengan aspek kerukunan, toleransi, dan moderasi beragama. Beberapa mata kuliah bermuatan tersebut, di antaranya: 1) Pancasila dan Kewarganegaraan; 2) Konsep Dasar Akidah Akhlak; 3) Syariat Islam Di Aceh; 4) Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5) Civic Education; 6) Komunikasi Antar Budaya dan Agama; 7) Etika dan HAM dalam Pekerjaan Sosial; 8) Resolusi Konflik; dan 9) Studi Multikulturalisme.⁶⁴

⁶¹ WW. dengan Maysarah, aktivis Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

⁶² WW. dengan Maysarah, aktivis Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

⁶³ WW. Maya Sartika, Ketua Dema STAIN STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

⁶⁴ *Buku Pedoman Akademik STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh*, Tahun 2018.

b. Organisasi Mahasiswa

Di kampus STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sendiri setahu saya belum ada pembekalan kerukunan beragama, bahkan ada mahasiswa yang menolak dalam moderasi beragama, menurutnya moderasi adalah mencampur adukkan ajaran agama kita dengan yang lain, padahal saya belajar moderasi itu untuk diajarkan toleransi dengan agama lain saling menghormati dan menjaga kesatuan. Salah satu contoh dari kalangan mahasiswa yang berbeda pendapat adalah saat takziah ke rumah orang meninggal, dimana di daerahnya (simeulu) ketika berkunjung ke tempat duka, yang membawakan makanan adalah orang yang datang berkunjung bukannya si Tuan rumah seperti disini.⁶⁵

Maya Sartika, Ketua Dema STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, mengatakan bahwa pernah ada kegiatan moderasi yang saya ikuti akan tetapi bukan pihak kampus yang adakan, tetapi dari pihak luar yang meminta mahasiswa ikut kegiatannya, kalau dari pihak kampus sendiri belum ada saya rasa. Untuk UKK/UKM cuma organisasi KAMMI yang lebih fokus membahas tentang keberagamaan, sementara UKK/UKM lain tidak ada, tetapi banyak anggota SEMA yang lebih religius saat telah bergabung dalam organisasi.⁶⁶

Khusus untuk para mahasiswa, Seuramoe Moderasi Beragama STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sudah merancang program penyusunan buku terkait moderasi beragama, namun realisasinya belum berjalan efektif.⁶⁷

Kalau untuk kegiatan seminar atau lainnya mungkin ada diadakan oleh kampus tapi mungkin hanya saya saja yang kurang informasi, tapi kampus pernah mengutus mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Dialog Lintas agama, untuk penyelenggaraan saya belum tahu ada atau

⁶⁵ WW. Maya Sartika, Ketua Dema STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

⁶⁶ WW. Maya Sartika, Ketua Dema STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

⁶⁷ WW. dengan M. Ikhwan, Ketua Seuramoe Moderasi Beragama STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

tidaknya kampus adakan. Dalam organisasi menulis yang saya ikuti pernah juga terdapat tulisan tentang keberagaman, akan tetapi tidak difokuskan dalam kerukunan, dan juga ada forum Cinta yang membahas filsafat.⁶⁸

c. Seuramoe Moderasi Beragama

Seuramoe Moderasi Beragama merupakan unit kajian khusus yang disiapkan untuk mengkaji isu-isu terkait moderasi beragama di Aceh dan Indonesia. Unit ini berada di bawah Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.⁶⁹

Pembentukan Seuramoe Moderasi Beragama STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh ditandai dengan Webinar sesi 9 “Moderasi Beragama dan Tantangan di Era Disrupsi.” Webinar ini menghadirkan tiga pemateri sekaligus, yaitu Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Amany Lubis, Antropolog sekaligus dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Reza Idria dan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Inayatillah.⁷⁰

Ketua Seuramoe Moderasi Beragama STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, M. Ikhwan, mengatakan bahwa keberadaan unit kajian moderasi beragama sesuai dengan instruksi pemerintah dalam rencana strategis Kementerian Agama. Ia menyampaikan, Seuramoe Moderasi Beragama STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh nantinya akan fokus pada kajian-kajian terkait moderasi beragama melalui pendekatan kearifan lokal. Selain kajian dan pembinaan, unit ini nantinya juga akan menghasilkan penelitian-penelitian tentang moderasi. “Sehingga nantinya dapat dijadikan rujukan dalam penyelesaian masalah-masalah

⁶⁸ WW. dengan Maysarah, Aktivis Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

⁶⁹ <https://staindirundeng.ac.id/2020/09/stain-meulaboh-bentuk-seuramoe-moderasi-beragama/>

⁷⁰ <https://staindirundeng.ac.id/2020/09/stain-meulaboh-bentuk-seuramoe-moderasi-beragama/>

yang muncul dalam masyarakat,” ujar M. Ikhwan saat memandu Webinar.⁷¹

Seuramoe Moderasi Beragama STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah secara internal seperti webinar, yang diikuti dosen dan mahasiswa. Meskipun belum sepenuhnya efektif lantaran suasana covid dan refocusing anggaran, menyebabkan kiprah dan kegiatan yang direncanakan tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian lembaga ini juga telah memprogramkan beberapa kegiatan strategis ke depan, dengan harapan dapat terlaksana dengan baik.⁷²

Kendati program moderasi beragama sudah dicanangkan dan Seuramoe Moderasi Beragama sudah didirikan, dosen-dosen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh belum memiliki persepsi yang sama tentang kerukunan atau toleransi beragama,. Hanya segelintir dosen yang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan kerukunan atau moderasi beragama.⁷³

Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Inayatillah mengatakan, milenial sebagai generasi yang sangat dekat perangkat teknologi harus mendapatkan pembinaan secara serius dalam penanaman nilai-nilai moderasi beragama. Terlebih di tengah-tengah gempuran informasi seperti saat ini.⁷⁴ Dan selaku lembaga pendidikan tinggi Islam, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh harus berperan sebagai “menara air” yang mengalir setiap hikmah bagi masyarakat. “Pada akhirnya, menjadi *center of excellence* bagi pembangunan dan perbaikan umat,”. Inayatillah mengatakan, sebagai *agent of social change* dan harapan umat,

⁷¹ <https://staindirundeng.ac.id/2020/09/stain-meulaboh-bentuk-seuramoe-moderasi-beragama/>

⁷² WW. dengan M. Ikhwan, Ketua Seuramoe Moderasi Beragama STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

⁷³ WW dengan Muhajir, Dosen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

⁷⁴ <https://staindirundeng.ac.id/2020/09/stain-meulaboh-bentuk-seuramoe-moderasi-beragama/>

mahasiswa selaku generasi muda harus disiapkan dengan sebaik mungkin, terutama dari segi pengetahuan berbangsa, bernegara dan beragama.⁷⁵

3. Potensi dan Sumber Daya di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa memiliki visi dan misi dalam upaya pengembangan kelembagaan dan SDM untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Visi IAIN ini adalah: "Menjadi pusat kajian keislaman yang berkarakter rahmatan lil alamin". Adapun misi yang diemban meliputi: 1) menghasilkan sarjana Islam yang berwawasan dan berintegritas; 2) menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas; dan 3) melaksanakan pengabdian yang kreatif, inovatif, dan produktif.⁷⁶

Disamping visi dan misi tersebut, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa juga memiliki potensi dan sumber daya yang dapat dikembangkan untuk mewujudkan kerukunan umat beragama. Beberapa potensi dan sumber tersebut adalah:

1. Kurikulum Pembelajaran

IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa memiliki beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan aspek kerukunan atau moderasi dalam kehidupan beragama. Beberapa mata kuliah tersebut yaitu : 1)Pancasila; 2)Ilmu Dakwah; 3)Metode Studi Islam; 4)Pendidikan Kewarganegaraan; 5)Aklak Tasawuf; 6)Hadis Dakwah; 7)Tafsir ayat-ayat dakwah; 8)Komunikasi Islam; 9)Penyuluhan syari'at islam.⁷⁷

Melihat pada muatan mata kuliah tersebut secara tidak langsung berhubungan dengan aspek kerukunan beragama. Meskipun tidak terdapat kurikulum kerukunan beragama di IAIN tersebut, mata kuliah dan pembelajarannya sebagiannya bermuatan kerukunan beragama.

⁷⁵ <https://staindirundeng.ac.id/2020/09/stain-meulaboh-bentuk-seuramoe-moderasi-beragama/>

⁷⁶<https://iainlangsa.ac.id/pages/visi-dan-misi>.

⁷⁷ <https://fuad.iainlangsa.ac.id/pages/kurikulum>

2. Program dan Kegiatan Internal

Salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa adalah Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) dalam rangka penerimaan mahasiswa baru setiap tahunnya. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2021 diawali dengan sambutan menteri agama Yaqut Cholil Qoumas tentang moderasi beragama. Mahasiswa Baru (Maba) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa diharapkan mampu menjadi agen moderasi beragama ditengah kehidupan bermasyarakat.⁷⁸

Kegiatan tersebut dapat menjadi stimulus bagi para mahasiswa dalam menekuni pendidikan yang terarah pada kerukunan hidup dalam beragama. Sebagai calon-calon *agent of social change* mahasiswa dipersiapkan dan dibekali dengan muatan kerukunan dan moderasi beragama.

Selain itu, kegiatan tentang moderasi bergama juga digelar oleh Itjen Kemenag dengan menghadirkan Nasumber pertama Rektor IAIN Langsa, Basri. Basri menyampaikan dalam paparannya ada beberapa langkah strategis yang bisa dijalankan oleh IAIN Langsa untuk terwujudnya moderasi beragama; *pertama*, moderasi beragama harus menjadi perhatian sivitas kademika dalam menyusun rencana pengembangan strategis kelembagaan. *Kedua*, melibatkan komponem dan unsur perguruan tinggi dalam memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kerukunan beragama, dan moderasi beragama. *Ketiga*, mengembangkan literasi keagamaan (*religious literacy*) dan pendidikan lintas iman (*interfaith education*). *Keempat*, perguruan tinggi keagamaan memperbanyak praktik pengalaman

⁷⁸ <https://iainlangsa.ac.id/detailpost/menag-harap-maba-iain-langsa-mampu-menjadi-agen-moderasi-beragama>

keagamaan yang berbeda sehingga kita bisa menjalin kerja sama antar pemeluk agama.

“Upaya yang dilaksanakan pada IAIN Langsa dalam rangka pembinaan ASN yang berintegritas yakni pembinaan melalui tugas dan fungsi bagi ASN, pengembangan kurikulum yang kontekstual dan dinamis, pembentukan rumah moderasi beragama, pelatihan-pelatihan tentang moderasi beragama, kajian-kajian keagamaan yang dinamis, membangun semangat silaturahmi dan forum interaksi sosial, kebijakan penelitian dan publikasi yang mencerminkan moderasi beragama, dan kegiatan pengabdian masyarakat yang damai dan komunikatif,”⁷⁹

C. Partisipasi PTKIN dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama

Menurut Reza Indria, sebagai sebuah konsep, jika merujuk kepada ilmu sosial, berbanding lurus dengan peradaban Barat. Bahkan jika ditelisik lebih jauh, sangat berkaitan dengan orang Barat menilai peradabannya dan problem-problemnya sendiri. “Jika hari ini, berbicara mengenai moderasi beragama seakan ditujukan bagi Islam dan muslim, sebenarnya konsepnya sendiri berasal dari Barat,” jelas Reza. Reza menyampaikan, meski begitu, dalam Islam sendiri para ilmuwan sangat sering menyerukan kembali konsep *washatiyah*. Konsep *ummatan wasatan*, umat yang berada di tengah. “Namun tengah yang seperti apa? ini menjadi suatu kajian dan proyek kita bersama”⁸⁰

Sinyalemen tersebut terkait erat dengan kelembagaan Islam, PTKIN, dan juga eksponen PTKIN itu sendiri, sebagaimana keterlibatan dosen

⁷⁹ <http://itjen.kemenag.go.id/web/wujudkan-moderasi-beragama-iain-langsa-dan-kankemenag-kota-palu-gunakan-langkah-strategis>

⁸⁰ <https://staindirundeng.ac.id/2020/09/stain-meulaboh-bentuk-seuramoe-moderasi-beragama/>

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam forum FKUB Aceh Barat. Salah seorang dosen senior, mantan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, terlibat aktif dalam forum FKUB dan dialog kerukunan bergama, beliau bahkan pernah menjadi pengurus FKUB. Juga Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yang menjabat sekarang, selalu terlibat aktif dalam forum dan kegiatan tentang kerukunan beragama di Aceh Barat, baik yang diselenggarakan oleh FKUB maupun pihak pemerintah daerah setempat.⁸¹

Selain para dosen, beberapa mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh juga ikut serta dalam kegiatan-kegiatan tentang kerukunan beragama. Maya Sartika, Ketua Dema STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, mengatakan: “Saya pernah ikut kegiatan Moderasi Beragama yang diselenggarakan oleh Kemenag RI bagi organisasi kemahasiswaan lintas agama di Banda Aceh, disana saya lihat sikap peserta antar agama sangat toleran dan menghormati, berbeda dengan di kampus STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sendiri yang mana mahasiswa dalam satu agama saja terkadang intoleran dalam berpendapat. Dalam aspek internal beragama, saya bisa melihat dari kampus STAIN sendiri khususnya dalam ruang kelas saya, terkadang menjadi suatu tantangan juga bagi mahasiswa dalam menyatukan pendapat jika menyangkut pembahasan mengenai agama, dimana mahasiswa STAIN juga berasal dari berbagai daerah yang kental agama, misalnya Abdya, Simeulu, dll sehingga mereka memiliki mazhab sendiri dan tentu saja mempertahankan pendapatnya, dan seringkali dikarenakan perbedaan pendapat ini menjadi suatu ketidakharmonisan antar mahasiswa itu sendiri.”⁸²

Peran Lembaga STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam mewujudkan kerukunan umat beragama adalah Ketika STAIN mampu

⁸¹ WW. dengan M. Ikhwan, Ketua Seuramoe Moderasi Beragama STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

⁸² WW. Maya Sartika, Ketua Dema STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

menjadi penghubung antar umat yang mana STAIN bisa menunjukkan bahwasanya Lembaga Pendidikan yang berlandaskan Islam tidak anti toleransi akan tetapi juga bisa menjadi wadah pemerhati dan menyatukan antar umat beragama, salah satunya juga dengan mengirimkan delegasi mahasiswa dalam kegiatan moderasi dan kegiatan lainnya yang diadakan oleh Kemenag Aceh Barat ataupun lembaga lain.⁸³

Jannatin Nisa, aktivis mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, mengatakan bahwa Organisasi yang pernah diikuti di dalam kampus adalah HMJ dan HMP, diluar kampus berkecimpung dalam organisasi HMI dan belajar tentang kepemimpinan, cara memecahkan masalah, *public speaking* dan kegiatan agamis lainnya. Untuk secara khusus terlibat dengan FKUB tidak ada, namun secara garis besar HMI yang merupakan forum keislaman yang mana ketika basic training di HMI ada diberikan materi tentang bagaimana cara menghadapi anggota dalam forum yang berbeda keyakinan dengan kita untuk saling bertoleransi atau bisa dikatakan cara untuk bertoleransi dengan umat lain yaitu dengan tidak membicarakan hal-hal yang sensitif atau menjaga etika secara norma atau agama dengan mereka, karena HMI juga melibatkan seluruh aspek masyarakat baik muslim dan/ataupun non muslim untuk dijadikan informer untuk kegiatan HMI salah satunya kegiatan Pemeliharaan dan Kesejahteraan Wanita yang di selenggarakan oleh Kohati HMI.⁸⁴

Demikian halnya Maysarah, aktivis Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, aktif dalam organisasi kampus yaitu Formadiksi (ketua), KIP Kuliah, Firqah Literasi Tuas, luar kampus ada organisasi Inong Literasi, dan penulisan cerpen. Dia pernah terlibat ikut Dialog Lintas Agama di Kecamatan dengan tema Moderasi Beragama dalam

⁸³ WW. dengan Jannatin Nisa, aktivis mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

⁸⁴ WW. dengan Jannatin Nisa, aktivis mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Mengikis Intoleransi' yang diadakan oleh Kemenag Aceh Barat. Yang diutuskan mewakili oleh kampus pada agustus 2021 lalu.⁸⁵

D. Keterlibatan PTKIN dalam Tata Kelola Kerukunan Umat

Beragama

Reza Idria menjelaskan bahwa moderasi beragama yang dipromosikan pemerintah saat ini merupakan satu konsep tidak hanya ditujukan bagi umat Islam saja, namun untuk semua pemeluk agama.⁸⁶ Reza menambahkan, ketika berbicara *washatiyah*, maka akan ada penengah yang memiliki kewenangan menjadi pengadil, menjadi orang yang menegakkan hukum. Menurutnya, Aceh memiliki banyak aturan, mulai dari surat edaran hingga qanun, namun aturan-aturan tersebut tidak ditegakkan. Padahal semestinya negara berperan sebagai penegak hukum.⁸⁷

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, H. Khairul Azhar, S.Ag mengatakan, pemerintah wajib menjaga dan menjamin keamanan masyarakat untuk bebas menganut agama yang ditetapkan oleh pemerintah. "Pemerintah wajib menjaga dan menjamin keamanan masyarakat untuk bebas beribadah," ungkapnya. Khairul mengatakan, di Kabupaten Aceh Barat tingkat toleransi antar umat beragama masih sangat tinggi, dengan menghargai perbedaan yang ada.⁸⁸

Asisten bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Setdakab Aceh Barat Mawardi SH membuka rapat koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam rangka menjalin sinergitas kehidupan beragama bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Barat yang digelar di ruang rapat

⁸⁵ WW. dengan Maysarah, Aktivistis Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

⁸⁶ <https://staindirundeng.ac.id/2020/09/stain-meulaboh-bentuk-seuramoe-moderasi-beragama/>

⁸⁷ <https://staindirundeng.ac.id/2020/09/stain-meulaboh-bentuk-seuramoe-moderasi-beragama/>

⁸⁸ <https://infopublik.id/kategori/nusantara/394094/tingkatkan-kerukunan-beragama-di-aceh-barat-kemenag-aceh-adakan-dialog-lintas-agama?show=>

Bupati Aceh Barat pada Rabu (14-07-2021). Rapat FKUB yang di inisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Aceh Barat ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpol Aceh Barat, unsur Forkopimda Aceh Barat, perwakilan Kemenag Aceh Barat, para tokoh lintas agama, tokoh adat, serta para anggota FKUB Kabupaten Aceh Barat. Mawardi mengatakan bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama merupakan tugas bersama yang melekat pada setiap umat beragama serta Pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan, mengatur, serta memberdayakan umat beragama yang diakomodir oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ini paparnya.⁸⁹

Salah satu upaya Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia adalah membentuk FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Struktur dan elemen keanggotaan FKUB tidak hanya didominasi oleh umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia. Terdapat juga elemen non-muslim yang menjadi bagian penting FKUB, yang berasal dari Agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu.

Secara hirarkhis struktur organisasi FKUB terpusat di Jakarta (tingkat pusat/nasional) yang diderivasi ke tingkat provinsi dan dijabarkan ke tingkat kabupaten dan kota. Untuk tingkat nasional FKUB dibentuk oleh Pemerintah Pusat melalui koordinasi kementerian terkait, dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga nasional lainnya. Sedangkan di tingkat provinsi FKUB dibentuk oleh Pemerintah Provinsi, seperti halnya di wilayah provinsi Aceh yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh. FKUB Provinsi Aceh terpusat di Kota Banda sebagai ibukota provinsi.

Di wilayah Aceh Barat, FKUB dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten setempat. Disamping berafiliasi dan berkoordinasi dengan pihak

⁸⁹<https://www.acehbaratkab.go.id/berita/kategori/berita/pemkab-aceh-barat-perkuat-fkub-antisipasi-potensi-konflik>.

pemerintah, FKUB juga bekerjasama dengan berbagai lembaga terkait atau *stakeholder* lainnya termasuk PTKIN yang terdapat di sana (STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh) sebagaimana tercermin dari visi dan misi kelembagaannya. Akan tetapi di dalam kenyataannya visi dan misi tersebut belum dapat diwujudkan secara efektif – untuk tidak mengatakan maksimal, karena terbentur oleh berbagai faktor.

FKUB menjalankan misi nasional dalam rangka implementasi Pancasila, dan berdasarkan UUD 45. Setiap sila dari Pancasila mencerminkan kerukunan dan kedamaian bagi seluruh bangsa Indonesia, dan hal ini harus mampu kita wujudkan. Dan terlebih penting lagi adalah FKUB melaksanakan misi Islam itu sendiri dalam mewujudkan *Rahmatan Lil'alamin*, misi ini bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.⁹⁰

FKUB Aceh Barat juga mengadakan dialog-dialog intern dan antaragama yang melibatkan berbagai kalangan terkait. Kegiatan ini dilaksanakan secara triwulan, semesteran, dan terkadang pada waktu tertentu secara khusus. Dalam kegiatan ini FKUB juga mengundang elemen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, seperti Abi Samsuar (Mantan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh) dan M. Ikhwan (Ketua Seuramoe Moderasi Beragama).⁹¹

Di satu sisi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mensupport lembaga FKUB dan berupaya mengimplementasikan program moderasi beragama sebagai amanah Pemerintah Pusat. Namun di sisi lain Pemerintah Daerah tidak mampu mereduksi otoritas dan dominasi kalangan Dayah yang tidak moderat, atau bahkan melindungi dan memelihara kelompok Dayah demi melestarikan kekuasaan (yang didukung oleh kalangan Dayah sebagai mayoritas).

⁹⁰ WW. dengan Ketua FKUB Aceh Barat.

⁹¹ WW. dengan Ketua FKUB Aceh Barat.

Namun terlepas dari sikap ambiguitas pemerintah daerah terhadap keberadaan FKUB, FKUB telah memainkan peran sebagai instrumen utama kerukunan umat beragama. FKUB memang didekasikan untuk kepentingan kerukunan hidup umat beragama dalam berbagai aspeknya.

Salah satu komponen pendukung utama FKUB adalah PTKIN sebagai produsen gagasan, teori, dan konsep-konsep akademik yang secara normatif dibutuhkan oleh FKUB. PTKIN seharusnya ikut berperan secara proaktif, bekerjasama dengan FKUB dan Lembaga lainnya, karena memiliki potensi dan sumberdaya yang konstruktif untuk perwujudan kerukunan umat beragama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kerukunan beragama di Aceh relatif belum menggembirakan, belum sesuai dengan harapan, sebagaimana di Banda Aceh, Kota Langsa, dan Aceh Barat, kendati di wilayah-wilayah tersebut sudah terdapat FKUB dan PTKIN.
2. Secara umum, kondisi kehidupan umat beragama di Aceh masih tergolong kondusif jika dilihat dari perspektif pemahaman kaum mayoritas (yang berbasis muslim tradisional) sebagai penghuni wilayah dengan jumlah populasi terbesar.
3. PTKIN di Aceh (UIN Ar-Raniry Banda Aceh; IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa; dan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh) memiliki potensi dan sumber daya yang besar untuk dapat mewujudkan kerukunan beragama di Aceh.
4. Terdapat unit atau lembaga khusus “Rumah Moderasi Beragama” yang didedikasikan untuk mengentaskan problematika kehidupan umat beragama dan mewujudkan kerukunan dan moderasi beragama.
5. Secara umum PTKIN di Aceh ((UIN Ar-Raniry Banda Aceh; IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa; dan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh) turut-serta, berpartisipasi dalam kancah perwujudan kerukunan umat beragama di Aceh, kendati masih dalam taraf yang belum maksimal.
6. Keterlibatan PTKIN (secara formal dan kelembagaan) dalam kaitan tersebut masih sangat terbatas dan belum sebanding dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki.
7. Partisipasi PTKIN dalam hal ini bahkan tercermin dari peran eksponen atau elemen PTKIN (dosen, aktivis, civitas) yang secara individual terlibat aktif dalam kepengurusan FKUB, MPU, program-

program pemerintah yang berorientasi pada perwujudan kerukunan umat beragama.

8. Secara kelembagaan PTKIN di Aceh (UIN Ar-Raniry Banda Aceh; IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa; dan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh) belum melakukan intervensi dalam proses tatakelola kerukunan umat beragama di Aceh.
9. Hanya eksponen PTKIN (dosen, aktivis) yang berperan aktif dalam proses tatakelola kerukunan beragama di Aceh, yang secara individual memiliki intervensi dan memainkan peran dan keaktorannya.

B. Saran-saran

1. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi rujukan untuk pengembangan kajian-kajian terkait kerukunan umat Beragama di Aceh untuk ke depan.
2. Perlu dilakukan kajian-kajian yang lebih mandalam tentang problematika kerukunan umat Bergama dengan berbagai perspektif dan pendekatan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.T. Talib and Sarjit S. Gill, "Socio-Religious Tolerance: Exploring the Malaysian Experience", *Global Journal of Human Social Science*, Volume 12, Issue 8, Version 1.0 May 2012.
- Ammar Fadzil, "Religious Tolerance in Islam: Theories, Practices and Malaysia's Experiences as a Multi Racial Society", *Journal of Islam in Asia*, Spl. Issue, No.3, September 2011, p.p. 347-348.
- Ari Ganjar Herdiansah, "Public Policy And Religious Conflict In Indonesia: The Case Of Ahmadiyah", *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 1, No. 1, Maret 2016, p.p.79-90.
- Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, *Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama: Kapasitas Kelembagaan dan Efisiensi Kinerja FKUB terhadap Kerukunan Umat Beragama*, Editor: Ibnu Hasan Muchtar & Farhan Muntafa, Jakarta, 2015.
- Chris Wilson, *Ethno-religious Violence in Indonesia From Soil to God*, Routledge, New York, 2008.
- Endah Siswati, "Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci", *Jurnal Translitera*, Edisi 5/2017, p.p. 11-33.
- Hanna Onyi Yusuf, "Promoting Peaceful Co-Existence and Religious Tolerance through Supplementary Readers and Reading Comprehension Passages in Basic Education Curriculum", *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 3 No. 8 [Special Issue – April 2013], p.p.224-232.
- HD Centre, *Conflict Management Strategies in Indonesia: Learning from the Poso Experience*, Workshop Report, Centre for Humanitarian Dialogue (HD Centre) and the Indonesian conflict management organisation, Institut Titian Perdamaian (ITP), 8 December 2009.
- <https://nasional.tempo.co/read/1143019/menag-lukman-budaya-dan-agama-dibenturkan-indonesia-bisa-runtuh/full&view=ok>. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/11/28/p03ov7396-kemenag-akan-perkuat-peran-forum-kerukunan-umat-beragama>.

https://www.vice.com/id_id/article/ev3k3a/banda-aceh-tempuh-jalur-hukum-saat-dicap-kota-intoleran-apakah-kota-lain-bakal-ikutan, diakses pada 14 Desember 2018.

Khotimah, "Religious Harmony and Government in Indonesia, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 23, No. 1, Juni 2015.

Lampiran I: Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 – 2019.

Maarif Institute, *Indeks Kota Islami Indonesia*. Maarif Institute for Culture and Humanity, Jakarta.



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Dr. Safrilsyah, S.Ag, M.Si
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala dalam bidang Psikologi Agama
4.	NIP	197004201997031001
5.	NIDN	2020047001
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	20101100112001
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Banda Aceh, 20 April 1970
8.	E-mail	safrilsyah@gmail.com
9.	Nomor Telepon/HP	081269817255
10.	Alamat Kantor	Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh
11.	Nomor Telepon/Faks	06517552921 / 06517552922
12.	Bidang Ilmu	Psikologi Agama
13.	Program Studi	Psikologi
14.	Fakultas	Psikologi

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Ar-Raniry Banda Aceh	Universitas Indonesia	Universitas Utara Malaysia
2.	Kota dan Negara PT	Aceh, Indonesia	Indonesia	Malaysia
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Filsafat	Psikologi	Psikologi
4.	Tahun Lulus	1995	2001	2018

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2019	Pengaruh Religiusitas dan Latar Belakang pendidikan terhadap tingkah laku prososial remaja	LP2M UIN Ar-Raniry
2.	2018	Pengaruh religiusitas dan penalaran moral terhadap tingkah laku prososial siswa SMA di Aceh	LPSDM Aceh

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2020	Pelatihan Motivasi Berprestasi pada Guru Pondok Pesantren Darul Qur'an Aceh, Samahani, Aceh Besar	Pribadi

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Religiosity and Prosocial Behaviour on Student of Islamic and Public schools at Banda Aceh, Indonesia	TADRIS : JURNAL KEGURUAN DAN ILMU TARBIYAH	Vol 6/ No 1/ 2021/ https://doi.org/10.24042/tadris.v6i1.6295

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.				
2.				
dst.				

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Pengaruh Religiusitas dan Latar Belakang pendidikan terhadap tingkah laku prososial remaja	2019	Laporan Penelitian	000161985

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh,
Ketua/Anggota Peneliti,

Dr. Safrilsyah, S.Ag, M.Si
NIDN. 2020047001



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Maimun Fuadi, S.Ag, M.Ag
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli dalam bidang Epistemologi Islam
4.	NIP	197511032009011008
5.	NIDN	2003117502
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	200311750201065
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Langsa, 03 November 1975
8.	E-mail	maimun_fuadi75@yahoo.co.id
9.	Nomor Telepon/HP	081360266566
10.	Alamat Kantor	Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh
11.	Nomor Telepon/Faks	0651-7552921,75552922/0651-7552922
12.	Bidang Ilmu	Manajemen Dakwah
13.	Program Studi	Manajemen Dakwah
14.	Fakultas	Dakwah dan Komunikasi

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Ar-Raniry Banda Aceh	IAIN Ar-Raniry Banda Aceh	
2.	Kota dan Negara PT	Aceh, Indonesia	Aceh, Indonesia	
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Manajemen Dakwah	Pemikiran Dalam Islam	
4.	Tahun Lulus	2000	2008	

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2019	Integrasi Ilmu di PTKI	
2.	2020	Revolusi Mental di MAN	

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.			

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.			

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

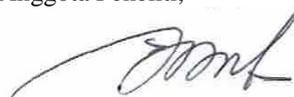
No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.				
2.				
dst.				

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.				

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh,
Anggota Peneliti,



Maimun Fuadi, S.Ag, M.Ag
NIDN. 2003117502



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Dr. Fuad, S.Ag, M.Hum
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor dalam bidang Ilmu Filsafat
4.	NIP	19690315199603100
5.	NIDN	2015036902
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	201503690203248
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Banda Aceh, 15 Maret 1969
8.	E-mail	fuadramly@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	082295414511
10.	Alamat Kantor	Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh
11.	Nomor Telepon/Faks	06517552921 / 06517552922
12.	Bidang Ilmu	Filfsat
13.	Program Studi	Aqidah Filsafat Islam
14.	Fakultas	Ushuluddin

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Ar-Raniry Banda Aceh	UGM Yogyakarta	UGM Yogyakarta
2.	Kota dan Negara PT	Aceh, Indonesia	Yogyakarta, Indonesia	Yogyakarta, Indonesia
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Aqidah dan Filsafat	Ilmu Filsafat	Ilmu Filsafat
4.	Tahun Lulus	1994	2000	2013

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2018	Model Integrasi Ilmu dan Pengembangannya di Perguruan Tinggi Islam (Studi Komparatif UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan UIN Sumatra Utara)	
2.			

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.			

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.			

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.				
2.				
dst.				

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.				

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh,
Ketua/Anggota Peneliti,

Dr. Fuad, S.Ag, M.Hum
NIDN. 2015036902

No. Reg: 21107000045370

**DRAF ARTIKEL
PUBLIKASI HASIL PENELITIAN**



PERAN PTKIN DALAM MEWUJUDKAN TOLERANSI BERAGAMA DI ACEH

¹Dr. Safrihsyah, S.Ag, M.Si, , ² Dr. Fuad, S. Ag, M. Hum; ³Maimun Fuadi, S. Ag, M.Ag

Klaster	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
Outcome yang akan dicapai	Publikasi pada Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi Terindek Scopus atau Jurnal Ilmiah Terakreditasi Nasional Sinta 1

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2021**

PERAN PTKIN DALAM MEWUJUDKAN TOLERANSI BERAGAMA DI ACEH

¹Dr. Safrilsyah, S.Ag, M.Si, , ² Dr. Fuad, S. Ag, M. Hum; ³Maimun Fuadi, S. Ag, M.Ag

¹UIN Ar-Raniry; ² UIN Ar-Raniry; ³ UIN Ar-Raniry

ABSTRACT

Maraknya kasus intoleransi beragama di Aceh menjadi perhatian publik Pemerintah hadir merespon kondisi ini dengan membentuk FKUB sebagai instrument problem solving. Rumusan penelitian ini terdiri dalam beberapa elemen, diantaranya: Apa saja potensi dan sumberdaya kerukunan beragama di PTKIN. Bagaimana bentuk partisipasi PTKIN dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Aceh dan Sejauhmana intervensi PTKIN dalam tata kelola kerukunan umat beragama di Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, terdiri dari kalangan akademisi dari beberapa PTKIN yang diperbandingkan. Lokasi penelitian ini terdiri dari tiga PTKIN yaitu, UIN Ar-Raniry di Kota Banda Aceh; IAIN Cot Kala di Kota Langsa; dan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh di Kabupaten Aceh Barat. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara/FGD, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data penelitian digunakan, metode deskriptif, metode interpretasi dan metode komparatif. Beberapa hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kerukunan beragama di Aceh relatif belum menggembirakan, belum sesuai dengan harapan. Masih terdapat pertikaian, konflik, dan polemik dalam kehidupan umat beragama. Konflik yang terjadi secara fenomenal, meskipun bukan dalam skala yang luas, lebih bersifat internal (intern umat beragama Islam antara tradisional dengan non-tradisional). Selanjutnya PTKIN di Aceh memiliki potensi dan sumber daya yang besar untuk dapat mewujudkan kerukunan beragama di Aceh. Terdapat hasil penelitian yang mengkaji problematika kerukunan umat beragama, yang diproduksi oleh kalangan dosen dan juga mahasiswa. Terdapat unit atau lembaga khusus "Rumah Moderasi Beragama" yang didedikasikan untuk mewujudkan kerukunan dan moderasi beragama.

Keywords: PTKIN Aceh, Kerukunan Umat Beragama.

A. Pendahuluan

Persoalan kerukunan umat beragama di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini semakin menjadi sorotan, terutama dengan munculnya sejumlah pertikaian dengan basis keyakinan keagamaan. Fenomena ini tidak hanya terjadi antar umat beragama, bahkan juga intra agama Islam sendiri, terutama antar penganut aliran yang berbeda. Karakteristik pertikaian antar umat beragama mencuat seputar masalah keberadaan rumah/tempat ibadah, para penganut, dan proses peribadatannya. Demikian juga antar aliran dalam Islam diwarnai juga oleh kasus dengan motif yang sama. Kasus-kasus yang pernah terjadi ternyata juga tidak berdiri sendiri, adakalanya dilatari oleh perbedaan etnis yang memeluk agama berbeda.

Fenomena keagamaan tersebut telah mengundang berbagai respon dan kepedulian dari berbagai pihak terkait, tidak terkecuali pihak pemerintah pusat sebagai pemegang otoritas tertinggi. Di antara kebijakan strategis Pemerintah Indonesia dalam mencegah dan menyelesaikan berbagai persoalan keagamaan tersebut adalah membentuk sebuah lembaga khusus FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) yang berstatus legal-yuridis-formal, baik untuk tingkat pusat maupun tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Dalam Lampiran Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dinyatakan bahwa FKUB merupakan *center of excellence* di Indonesia dalam rangka mewujudkan kondisi "kerukunan substantif", dan bukan sekedar "kerukunan simbolis". Kementerian Agama dalam hal ini menetapkan empat sasaran kegiatan kerukunan umat beragama: 1) perumusan dan sosialisasi regulasi terkait kerukunan

umat beragama; 2) peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan; 3) pemberdayaan FKUB, lembaga keagamaan, dan institusi media; dan 4) pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama.¹

Hasil penelitian tentang isu-isu di atas dapat ditelusuri dari beberapa tulisan. Retnowati², di antaranya, mengkaji upaya integrasi pasca kerusuhan di Situbondo Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi dan upaya rekonsiliasi tersebut telah dilakukan oleh umat dan pimpinan agama Islam dan Kristen di Situbondo, dimana unsur kearifan lokal juga menjadi modal sosial dalam mewujudkan integrasi dalam masyarakat, sehingga pasca kerusuhan kehidupan masyarakat dan hubungan antarumat beragama di Situbondo dapat dipulihkan kembali.

Adapun hasil penelitian Syahrin Harahap, Katimin, dan Sahdin Hasibuan³ tentang konflik di Tanjung Balai, Medan (Sumatera Utara), menyebutkan bahwa kendati diakibatkan faktor ekonomi dan kekuasaan untuk menguasai kelompok lain oleh kelompok tertentu, konflik tersebut juga berimbas pada persoalan keagamaan. Padahal, selama ini Sumatera Utara dikategorikan sebagai zona aman (*zero conflict area*), namun konflik juga bisa terjadi. Selain itu, Chris Wilson⁴ menegaskan bahwa konflik yang melanda Maluku Utara, yang menimbulkan kekerasan dan kebrutalan, merupakan konflik dan kekerasan antar etnik yang melibatkan agama (*Ethno-religious Violence*) yang terjadi di Indonesia. Dalam karya tersebut Wilson juga memaparkan beberapa contoh kasus yang dapat dianalisis dengan sejumlah teori konflik yang berbeda.

Survei Setara Institute yang dirilis menjelang akhir tahun 2018 juga menyampaikan daftar 94 kota dengan skor toleransi tertinggi hingga terendah terendah.⁵ Sebelumnya, pada tahun 2016 juga ada kajian yang hampir sama dari Ma'arif Institute tentang Indeks Kota Islami, yang juga meninjau kondisi keamanan, kebahagiaan, serta kesejahteraan di 29 kota di Indonesia.⁶

Marsudi Utoyo⁷ menegaskan bahwa masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang pluralistik (majemuk), yang memiliki keragaman dari segi: agama, tradisi, kesenian, kebudayaan, cara hidup, dan pandangan nilai, yang dianut oleh berbagai kelompok etnis di Indonesia. Di satu sisi, pluralitas tersebut bersifat positif dan konstruktif, namun di sisi lain juga berpotensi negatif dan destruktif yang dapat berakibat disintegrasi bangsa. Dengan kata lain, pluralitas tersebut juga menjadi "akar" konflik keagamaan jika sikap toleransi dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Kajian tentang masalah toleransi beragama, misalnya, dapat dilakukan dengan mempergunakan konsep toleransi dalam Islam. Konsep toleransi dalam Islam mirip dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh UNESCO bahwa toleransi adalah konsisten

¹Lampiran I: Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 – 2019, hal. 4.

²Retnowati, "Agama, Konflik, dan Integrasi Sosial (Integrasi Sosial Pasca Konflik Situbondo)", Jurnal "Analisa", Volume 21 Nomor 02 Desember 2014, p.p.189-200.

³Syahrin Harahap, Katimin, Sahdin Hasibuan, "The Phenomenon of Social and Religious Conflicts in Tanjungbalai, Medan, Indonesia", *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, Volume 22, Issue 8, Ver. VI (August. 2017), p.p. 31-39.

⁴Chris Wilson, *Ethno-religious Violence in Indonesia From Soil to God*, Routledge, New York, 2008.

⁵Setara Institute, *Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran Tahun 2018*. SETARA Institute for Democracy and Peace, Jakarta, 7 Desember 2018

⁶Maarif Institute, *Indeks Kota Islami Indonesia*. Maarif Institute for Culture and Humanity, Jakarta.

⁷Marsudi Utoyo, "Akar Masalah Konflik Keagamaan di Indonesia", *Jurnal Lex Librum*, Vol.III, No.1, Desember 2016, p.p. 367-376.

dengan sikap respek terhadap hak-hak asasi manusia. Sikap menerima perbedaan orang lain dalam penampilan, situasi, percakapan, tingkah laku, dan nilai-nilai yang mereka anut mencerminkan pengakuan terhadap hak hidup mereka dalam kedamaian. Ini juga berarti bahwa pandangan atau pendapat seseorang tidak bisa dipaksakan pada orang lain.⁸

Toleransi merupakan apresiasi terhadap keragaman dan kemampuan untuk hidup dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk hidup. Ini merupakan kemampuan untuk melatih sikap-sikap adil secara objektif terhadap pendapat, kegiatan-kegiatan, agama, kebangsaan yang berbeda yang dimiliki orang lain. Sebaliknya, sikap intoleran merupakan kegagalan untuk menghargai keragaman dan perbedaan-perbedaan tersebut.⁹ Toleransi beragama dan saling bereksistensi dalam hidup damai mencerminkan kehidupan bersama dalam suatu kerukunan atau harmoni. Dalam kaitan ini pendidikan damai merupakan salah satu studi yang esensial dalam menciptakan kedamaian dan toleransi, karena mengajarkan norma-norma, nilai-nilai, dan sikap-sikap yang dapat mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan manusia. Pendidikan semacam ini dapat diimplementasikan mulai dari individu, keluarga, masyarakat, suatu bangsa, dan bahkan secara global, melalui orientasi damai dan toleransi. Demikian halnya sistem-sistem politik, ekonomi, dan sosial, secara edukatif juga harus diorientasikan terhadap perdamaian dan toleransi.¹⁰

Terkait dengan persoalan “peran”, yang menjadi fokus utama penelitian ini dalam mengkaji peran PTKIN dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Aceh, terdapat beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli. Teori Peran (*Role Theory*) pada dasarnya menjelaskan tentang keragaman karakteristik perilaku sosial pada situasi dan kondisi tertentu, menyangkut ekspektasi normatif yang harus diperjuangkan.¹¹ Perilaku normatif terarah pada tujuan yang diharapkan dalam rangka mengoptimalkan kualitas dan pencapaian nilai-nilai tertentu.¹² Teori Peran yang menjadi acuan penelitian ini adalah Teori Peran Organisasi (*Organizational Role Theory*). Peran suatu organisasi pada dasarnya dapat dihubungkan dengan posisi-posisi sosial tertentu, dan digeneralisasikan oleh harapan-harapan normatif tentang bagaimana seharusnya kondisi sosial itu direkayasa. Dalam hal ini tuntutan-tuntutan organisasi atau lembaga untuk berkiprah secara normatif menjadi signifikan dan utama.¹³ Dengan demikian peran PTKIN sebagai salah satu organisasi atau lembaga akademis yang bersifat strategis dipengaruhi oleh perilaku normatif individu-individu yang terdapat di dalamnya, untuk memenuhi tuntutan peran kelembagaan terhadap kondisi sosial yang terkait dengannya. Dengan kata lain, terkait secara eksplisit dengan penelitian ini,

⁸ Ammar Fadzil, “Religious Tolerance in Islam: Theories, Practices and Malaysia’s Experiences as a Multi Racial Society”, *Journal of Islam in Asia*, Spl. Issue, No.3 September 2011, p.p.347-348.

⁹ Hanna Onyi Yusuf, “Promoting Peaceful Co-Existence and Religious Tolerance through Supplementary Readers and Reading Comprehension Passages in Basic Education Curriculum”, *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 3 No. 8 [Special Issue – April 2013], p.p.224-232.

¹⁰ Hanna Onyi Yusuf, “Promoting Peaceful Co-Existence and Religious Tolerance through Supplementary Readers and Reading Comprehension Passages in Basic Education Curriculum”, *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 3 No. 8 [Special Issue – April 2013], p.p.224-232.

¹¹ B. J. Biddle, “Recent Developments In Role Theory”, *Annual Review of Sociology* Vol. 12:67-92, 1986.

¹² Albert Hunter, “Role Theory”, in *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 2nd Edition, 2015. (<https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/role-theory>)

¹³ B. J. Biddle, “Recent Developments In Role Theory”, *Annual Review of Sociology* Vol. 12:67-92, 1986.

tuntutan dimaksud adalah peran PTKIN dalam mewujudkan kerukunan umat beragama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari misi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Secara potensial, PTKIN memiliki andil yang sangat besar dalam mencerdaskan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, terutama umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan tinggi, PTKIN mengemban amanat dan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Salah satu misi "sakral" ini adalah Pengabdian kepada Masyarakat, dan salah satu tujuan dan sasaran (*outcome*) yang diharapkan dari PTKIN adalah menciptakan kesejahteraan hidup masyarakat dalam berbagai aspek dan dimensinya termasuk aspek kehidupan beragama di Indonesia.

Oleh karena itu PTKIN harus mengambil peran dan tanggung jawab yang lebih optimal dalam proses tata kelola kehidupan umat beragama di Indonesia. Upaya untuk merumuskan konsep dan strategi kerukunan umat beragama sejatinya tidak bisa terlepas dari peran dan keberadaan PTKIN, baik melalui regulasi-regulasi dan kebijakan yang dirumuskan oleh pihak pemerintah maupun melalui program-program strategis dan kebijakan internal PTKIN itu sendiri. Terkait dengan signifikansi dan urgensi peran PTKIN, Nur Syam menegaskan bahwa PTKI harus mampu menjadi pusat bagi terciptanya *religious harmony*. Nur Syam menambahkan: "Kita semua tahu bahwa kita memiliki kearifan lokal, misalnya "satu tungku tiga batu", atau "kitorang basudara". Maka, hal ini harus terus menerus digelorakan untuk membangun harmoni dan kerukunan".¹⁴

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan di atas, penelitian tentang peran PTKIN dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Aceh sangat signifikan dan urgen untuk dilakukan. Asumsi yang mendasari signifikansi dan urgensi penelitian ini, di antaranya adalah besarnya potensi konflik keagamaan di Indonesia, termasuk Aceh, yang berbias pada aspek kerukunan hidup umat beragama. Indonesia dikenal sebagai negara yang masyarakatnya heterogen, dimana kasus-kasus konflik atas nama agama dewasa ini marak terjadi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan empat masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini: Apa saja potensi dan sumberdaya kerukunan beragama di PTKIN? Bagaimana bentuk partisipasi PTKIN dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Aceh? Sejauhmana keterlibatan PTKIN dalam tata kelola kerukunan umat beragama di Aceh? Penelitian ini dilakukan untuk menggali peran-peran strategis yang dapat dilakukan oleh PTKIN, sehingga melalui kajian yang bersifat eskploratif ini dapat ditemukan "esensi" model/pola/paradigma kerukunan beragama yang lebih ideal untuk dapat diterapkan. Dari penelitian ini juga diharapkan PTKIN dapat merumuskan gagasan-gagasan baru yang lebih konstruktif untuk mewujudkan kerukunan beragama di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh.

B. Metode

- 1. Metode Penelitian;** Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif yang menelaah permasalahan peran PTKIN dalam bangunan tatakelola kerukunan umat beragama di Aceh. Penelaahan dititikberatkan pada investigasi dan eksplorasi masalah-masalah yang terjadi dalam proses kerukunan umat beragama di tiga wilayah di

¹⁴Nur Syam, *Peran PTKIN dalam Membangun Harmoni Sosial di Era Milenial*, Makalah Disampaikan dalam diskusi di STAIN Sorong, 11-10-2018.

Aceh dalam rangka menawarkan alternatif pemahaman yang potensial bagi upaya pengembangannya.

2. **Lokasi Penelitian;** Penelitian ini memiliki ekspektasi untuk dapat memetakan peran dan keterlibatan PTKIN dalam bangunan tata kelola kerukunan umat beragama di Aceh. Wilayah yang dijadikan lokasi penelitian ini terdiri dari tiga kabupaten/kota, yaitu: Kota Banda Aceh; Kota Langsa; dan Kabupaten Aceh Barat. Beberapa PTKIN yang diteliti peran dan keterlibatannya dalam tata kelola kerukunan umat beragama, di Provinsi Aceh, khususnya UIN Ar-Raniry di Kota Banda Aceh; IAIN Cot Kala di Kota Langsa; dan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh di Kabupaten Aceh Barat.
3. **Data Penelitian;** Secara umum data penelitian ini bersumber dari: 1) **Kepustakaan** (buku, jurnal, majalah, ensiklopedi, kamus, dan sejenisnya), baik yang bersifat manual (*paper base*) maupun digital (elektronik/*paper less*); 2) **Dokumen** (laporan, peraturan/undang-undang, kasus-kasus yang terjadi, nomenklatur yang dapat diakses dan terkait dengan data bangunan tata kelola kerukunan umat beragama; 3) **Subjek Penelitian** (hasil wawancara, hasil pengamatan langsung terhadap subjek penelitian, dan yang sejenisnya). Secara umum ketiga sumber tersebut menyajikan data-data yang bersifat kualitatif dan dapat digolongkan ke dalam Data Primer, Data Sekunder, dan Data Pendukung atau pelengkap lainnya. **Data Primer;** Data primer penelitian ini pertama-tama bersumber subjek penelitian (informan) yang terdapat di ketiga PTKIN yang diteliti dan Lembaga-lembaga terkait lainnya. Kategori informan yang menjadi subjek penelitian terdiri dari: akademisi, mahasiswa, dan pimpinan ketiga PTKIN tersebut; tokoh agama; pengurus FKUB; dan eksponen *stakeholder* lainnya. **Data Sekunder;** Data sekunder penelitian ini bersumber dari kepustakaan (literatur/referensi ilmiah) dan dokumen-dokumen, yang menyajikan informasi-informasi tentang persoalan-persoalan bangunan tatakelola kerukunan umat beragama di Aceh, kebijakan-kebijakan, undang-undang atau aturan-aturan terkait bangunan tatakelola kerukunan umat beragama, dan informasi-informasi seputar permasalahan yang dikaji. **Data Pendukung;** Data pendukung (pelengkap lainnya) bersumber dari berbagai kepustakaan pendukung, dokumen-dokumen dan sumber-sumber lainnya, yang ada kaitannya dengan persoalan-persoalan peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam bangunan tatakelola kerukunan umat beragama di Aceh. Data pendukung hanya menyajikan informasi-informasi tambahan, yang sewaktu-waktu diperlukan untuk melengkapi kebutuhan penelitian ini.
4. **Instrumen Penelitian;** Sebagaimana halnya dalam berbagai kegiatan penelitian kualitatif pada umumnya, peneliti dalam penelitian ini memainkan peran ganda, yaitu sebagai instrumen kunci (*key instrument*) dan sekaligus pengguna instrumen lainnya. Dalam kegiatan penelitian ini, peneliti mempergunakan beberapa instrumen: yaitu: pedoman wawancara, pedoman observasi dan dokumentasi kepustakaan.
5. **Metode dan Teknik Analisis Data;** Metode analisis data yang dipergunakan di dalam penelitian ini terdiri dari: metode deskriptif dan metode interpretasi. Metode deskriptif dan metode interpretasi dipergunakan untuk menganalisis data kualitatif. Selain itu metode deskriptif juga dipergunakan untuk menganalisis data kuantitatif yang berkaitan dengan data kualitatif. Selain ketiga metode tersebut, untuk mendukung perolehan objektivitas data tentang peran PTKIN dalam tatakelola kerukunan umat beragama di Aceh, juga dipergunakan teknik analisis Triangulasi (*Triangulation*). Teknik Triangulasi ini dimaksudkan untuk menelaah

kualitas dan kapasitas data secara “tiga arah” (dari ketiga jenis data) yaitu: data hasil wawancara; data hasil observasi; dan data dokumentasi dari referensi kepustakaan (buku/jurnal/majalah/koran) lainnya. Proses Triangulasi melibatkan pola hubungan yang bersifat timbal-balik dan integral dari ketiga jenis data tersebut, dimana masing-masing jenis data dipergunakan untuk memverifikasi jenis data yang lain. Data hasil wawancara, misalnya, dipergunakan untuk memverifikasi data dokumentasi, dan begitu sebaliknya. Dengan demikian ketiga jenis data tersebut saling melengkapi dan saling menyempurnakan, sehingga dihasilkan data yang integral (utuh) berisi keterangan-keterangan atau informasi tentang peran PTKIN dalam bangunan tatakelola kerukunan umat beragama di Aceh.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Profil Kerukunan Beragama di Aceh

Masyarakat Aceh dikenal sebagai masyarakat yang “fanatik” dalam beragama, khususnya kaum mayoritas yang beragama Islam. Berbagai aspek kehidupan masyarakat tidak terlepas dari keberagamaan, baik ekonomi, politik, pendidikan, maupun sosial dan budaya. Bahkan dalam tradisi kehidupan masyarakat yang diwarisi secara turun-temurun dikenal suatu ajaran yang bersifat doctrinal berbunyi: “*Hukoum ngon Adat lage Zat ngon Sifeut*” (hubungan agama dengan adat/budaya bagaikan zat dengan sifat, alias tidak terpisahkan).

Terlebih lagi dengan pemberlakuan Syari’at Islam secara resmi di Provinsi Aceh, problematika keberagamaan menjadi isu sentral yang menyita banyak perhatian, baik dari unsur pemerintah hingga masyarakat arus bawah maupun dari kalangan agamawan/tokoh agama Islam dan non-Islam lainnya. Salah satu isu yang menjadi tantangan terbesar dengan upaya pemberlakuan Syari’at Islam adalah seberapa efektif upaya tersebut dapat menjamin dan mewujudkan iklim keberagamaan yang produktif, kontributif, dan kondusif dalam kehidupan masyarakat Aceh secara luas.

Dalam konteks tersebut, masalah “kerukunan” umat beragama di Aceh dalam berbagai aspek dan dimensinya menjadi sangat signifikan dalam perbincangan, kajian, dan pemberitaan di media-media lokal, nasional, dan bahkan internasional. Masalah kerukunan umat beragama ini pula menjadi bagian dari upaya pemerintah Indonesia yang telah mencanangkan program “Moderasi Beragama” dalam rangka mewujudkan kerukunan bagi seluruh umat beragama di Indonesia.

Reza Indria, antropolog sekaligus dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh, berpendapat bahwa moderasi beragama yang dipromosikan pemerintah Indonesia saat ini ditujukan bagi seluruh pemeluk agama, muslim dan non-muslim.¹⁵ Pandangan ini sangat representatif dan menjadi acuan bagi seluruh stakeholders, karena moderasi, toleransi, dan kerukunan umat beragama merupakan tanggung jawab bersama secara kolektif dan sinergis.

Jika mencermati fenomena kehidupan umat beragama di Aceh dewasa ini, terkait dengan aspek kerukunan, belumlah dapat dikatakan normatif atau bersifat ideal sebagaimana yang diharapkan. Masih terdapat riak-riak atau gejolak konflik antar umat beragama (muslim dengan non-muslim) dan intern umat beragama (sesama muslim itu sendiri). Kendati konflik-konflik yang terjadi di Aceh selama ini dapat dikatakan masih berskala kecil, dibandingkan daerah-daerah lain yang sifatnya lebih agresif dan brutal, fenomena tersebut tentu saja “ironis” dan kontraproduktif dengan misi pemberlakuan Syari’at Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

¹⁵ <https://basajan.net/moderasi-beragama-bukan-hanya-untuk-umat-islam/>

Problematika yang dideskripsikan di atas mengindikasikan kondisi kerukunan umat beragama di Aceh belumlah terwujud secara optimal. Profil kerukunan umat beragama belum terbangun secara konstruktif dan stabil, atau cenderung bersifat labil, dan masih berpotensi “disharmoni” dalam tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya. Paling tidak, suasana disharmoni tersebut terlihat masif atau dominan di berbagai media sosial dan lainnya, melalui pemberitaan, komentar, dan respon-respon negatif yang sangat polemis di kalangan masyarakat.

Di wilayah Kabupaten Aceh Barat, misalnya, fenomena kerukunan beragama hanya terlihat secara formal dan belum dapat dikatakan bersifat substansial. Berbagai perspektif tentang kerukunan beragama dapat dicermati dari pendapat dan pandangan masyarakat, akademisi, dan juga mahasiswa.

Salah seorang mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Jannatin Nisa, berpendapat bahwa kerukunan beragama yaitu terciptanya keadaan atau kondisi yang mana para ummat dari berbagai agama seperti Islam, Budha, Hindu, Kristen, Katolik hidup Bersama secara rukun, damai, saling berkerja sama, saling tolong, saling menghormati tanpa memandang status agama tanpa membedakan status agama, tidak saling mencela dan menghina satu dan lainnya. Walaupun hidup dilingkungan yang sama, tetapi setiap umat mempunyai hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing dan umat lainnya wajib menghormati dengan tidak menistakan agama/ibadah agama yang lain, saling hidup dengan meyakini Tuhan masing-masing tanpa menyalahkan keyakinan umat yang lain, yakni saling bertoleransi.¹⁶

Meskipun umat Islam menjaga hubungan antar umat, akan tetapi Jannatin Nisa juga tidak menyangkal bahwa Islam juga mempunyai konflik internal dalam agama yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran oleh masing-masing individu yang dapat memicu terjadinya klise antar umat islam sendiri seperti dalam hal beribadah, didapati banyak perbedaan pendapat namun klise ini tidak sampai menimbulkan permasalahan yang serius dalam Islam sendiri.¹⁷

Terkait dengan kondisi di wilayah Aceh Barat, salah seorang dosen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan terkait kerukunan beragama mengatakan bahwa:

“Komunikasi dan interaksi masyarakat yang muncul ke permukaan, sebagai gambaran fenomena sosial, dapat dikatakan tergolong kondusif.

Namun terdapat upaya sekelompok masyarakat yang bersifat eksklusif, sebagai kelompok mayoritas yang mendominasi otoritas. Mereka berasal dari kalangan Islam tradisional (Dayah) yang ingin menguasai dan mendominasi wilayah di Aceh Barat. Mereka bahkan mencurigai upaya rehabilitasi Gereja di sana dan mempersoalkan IMB Gereja tersebut.

Mesjid Agung Kota Meulaboh (UPTD), sebagai masjid Kabupaten, juga kerap dipaksakan untuk mengikuti “ideologi Dayah” dalam setiap praktik atau kegiatan ritual peribatan.

Secara kasat mata perselisihan atau riak gejala kontroversi antara kalangan masyarakat Islam tradisional (Dayah) dengan masyarakat non-tradisional (urban/Islam modern) tidak terlihat. Tidak terjadi konflik antar pemeluk agama di Aceh Barat, baik intern (antar sesama muslim) maupun antar agama (muslim dengan non-muslim).

Perselisihan atau perseteruan muncul di media sosial, terjadi polemik yang menghangat antara kelompok mainstream tradisional dengan kelompok non tradisional. Beberapa kasus yang terjadi seperti penolakan via media sosial terhadap pengelolaan Masjid Jabir

¹⁶ WW. dengan Jannatin Nisa, aktivis mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

¹⁷ WW. dengan Jannatin Nisa, aktivis mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

al-Ka'bi oleh kelompok Salafi, yang disinyalir oleh Salafi tersebut sebagai masjid kelompok Wahabi, padahal jama'ahnya hanyalah mayoritas masyarakat perkotaan (urban). Fenomena ini tidak terlepas dari pengaruh konflik beragama (Salafi-Wahabi) yang pada mulanya terjadi di Banda Aceh.

Secara umum gaya atau pola beragama masyarakat Aceh Barat yang didominasi oleh mainstream kaum Salafi (tradisional) cenderung bersifat eksklusif dan tidak toleran."¹⁸

Maysarah, aktivis Mahasiswa STAIN Tgk. Dirundeng Melaboh, mengatakan: "Jika kita membahas dalam aspek internal Islam sendiri, khususnya Aceh Barat itu merupakan hal yang lebih mudah ditemukan di kabupaten Barat Selatan ini, seperti pertentangan Wahabi, Syiah dan ajaran sesat akan tetapi hingga saat ini belum ada pertumpahan darah yang terjadi akibat pertentangan hal tersebut."¹⁹

Maysarah menambahkan bahwa kerukunan beragama berlangsung manakala beberapa penganut agama hidup dengan rukun saling menghormati ibadah lain, tidak melecehkan dan khususnya di Aceh Barat ini yang mana mayoritas Islam dan juga terdapat beberapa agama lain, tapi kita lihat sendiri penganut agama minoritas ini bisa beribadah dengan khidmat sebagaimana umat Islam beribadah, kita tidak pernah mendengar antar agama saling bentrok, saling mengganggu, saling merusak dan melecehkan di Aceh Barat ini, setiap agama di Aceh Barat ini hidup dengan sangat toleran, kalau menurut saya Aceh Barat adalah salah satu kabupaten yang sangat menghargai dan menjaga kerukunan antar agama."²⁰

Disamping perspektif individual yang dikemukakan di atas, juga terdapat perspektif institusional tentang kerukunan sebagaimana pandangan Ketua FKUB Aceh Barat berikut ini:

"FKUB menjalankan misi nasional dalam rangka implementasi Pancasila, dan berdasarkan UUD 45. Setiap sila dari Pancasila mencerminkan kerukunan dan kedamaian bagi seluruh bangsa Indonesia, dan hal ini harus mampu kita wujudkan. Dan terlebih penting lagi adalah FKUB melaksanakan misi Islam itu sendiri dalam mewujudkan *Rahmatan Lil' alamin*, misi ini bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia."²¹

Akan tetapi muatan perspektif tersebut terkesan hanya bersifat normatif. Memang benar, tugas pemerintah bersama elemen terkait termasuk FKUB terutama adalah mewujudkan kerukunan umat beragama di wilayah masing-masing, sebagaimana wilayah Aceh Barat. Bagi pihak pemerintah tentu saja tidak mudah untuk bersikap dan berbuat yang ideal.

Salah seorang tokoh agama Aceh Barat mengatakan bahwa pemerintah daerah terkesan melindungi kalangan tradisional untuk "mempertahankan ketertiban dan kenyamanan masyarakat serta stabilitas pemerintahan", sebagaimana kebijakan Bupati sekarang yang sudah dua periode menjabat. Sebelumnya, Kota Meulaboh (Sebagian besar wilayah Aceh Barat), didominasi oleh kalangan Muhammadiyah (Islam Kota). Tetapi belakangan ini lebih didominasi oleh Dayah Salafi, termasuk penguasaan Mesjid Agung (masjid Kabupaten) yang oleh Pemerintah Daerah secara tidak langsung diberikan kepada otoritas kalangan Dayah."²²

Di satu sisi Pemerintah Daerah Aceh Barat mensupport lembaga FKUB dan berupaya mengimplementasikan program moderasi beragama sebagai amanah Pemerintah Pusat. Namun di sisi lain Pemerintah Daerah tidak mampu bersikap moderat lantaran berbagai

¹⁸ WW. dengan salah seorang dosen/peneliti STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

¹⁹ WW. dengan Maysarah, Aktivis Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

²⁰ WW. dengan Maysarah, Aktivis Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

²¹ WW. dengan Ketua FKUB Aceh Barat.

²² WW. dengan salah seorang Tokoh Agama Islam Aceh Barat.

tuntutan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat yang menghendaki keberpihakan pada kelompok mayoritas.

Secara keseluruhan, berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerukunan beragama di Aceh lebih terwujud dalam konteks antarumat beragama, antara masyarakat muslim (mayoritas) dengan non-muslim (minoritas), dibandingkan intern umat beragama atau antar sesama muslim itu sendiri. Salah seorang tokoh Agama Buddha yang berdomisili di Banda Aceh mengatakan bahwa selama ini umat Buddha di Aceh dapat menjalankan ibadah dan kegiatan-kegiatan keagamaan dengan baik. Mereka merasa nyaman tanpa gangguan dan tanpa tekanan dari pemeluk agama lain. Bahkan tokoh atau pemuka agama mereka juga diundang oleh UIN Ar-Raniry untuk berdialog dan sharing pengalaman.²³ Demikian juga pendapat salah seorang tokoh Agama Kristen bahwa kerukunan antar umat beragama di Aceh sudah berjalan dengan baik. Tokoh tersebut bahkan merasa heran dengan pemberitaan bahwa indeks kerukunan beragama di Aceh masih tergolong rendah atau berada di urutan bawah.²⁴

Akan tetapi berbeda halnya dengan konteks kerukunan intern umat beragama, yang dapat dikatakan belum terwujud secara maksimal, karena polemik dan konflik internal masyarakat Islam masih berlangsung secara intensif, terutama antara kalangan masyarakat Islam tradisional sebagai mayoritas dengan non-tradisional sebagai minoritas. Dominasi kelompok mayoritas terhadap minoritas menjadikan bangunan kerukunan beragama tidak dapat berdiri kokoh dan terombang-ambing oleh berbagai faktor kepentingan yang bersifat eksklusif dan bernuansa politis.

Fenomena tersebut memang terkesan beralasan lantaran jumlah populasi masyarakat Aceh yang didominasi oleh umat Islam. Jika problematika kerukunan atau moderasi beragama di Aceh cenderung bersifat intern umat beragama, antar kelompok masyarakat Islam itu sendiri (tradisional dengan non-tradisional), itu terjadi akibat perbedaan latar belakang pendidikan dan aspek sosial-budaya lainnya. Kecenderungan perbedaan ini, yang berakibat munculnya polemik atau konflik wacana di berbagai media, merupakan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara tuntas, kecuali hanya dapat diminimalisir agar tidak semakin menghangat dan berdampak negatif lebih besar bagi kehidupan masyarakat.

2. Potensi dan Sumberdaya Kerukunan Beragama di PTKIN

Secara substansial indikator suatu keterlibatan, peran-serta, atau “peran” juga dapat dipahami dari aspek potensi dan sumberdaya yang tersedia. Demikian halnya potensi dan sumberdaya kerukunan beragama yang dimiliki oleh suatu institusi atau perguruan tinggi. Potensi dan sumberdaya merupakan infrastruktur yang konstruktif dan strategis, sebagai modal dasar, untuk mencapai suatu tujuan dalam rangka mewujudkan harapan dan cita-cita.

Persoalan kerukunan atau moderasi beragama bukanlah hal yang asing dalam berbagai wacana dan perbincangan di perguruan tinggi di Aceh. Diskusi terkait kerukunan atau moderasi semakin populer di kalangan akademisi, bukan hanya dalam lingkup pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Menurut Reza Indria, ketika berbicara moderasi beragama di Aceh, tidak bisa dilepaskan dari *stereotype* yang berkembang di Indonesia dalam cara melihat Aceh. Selain itu, informasi yang dikembangkan secara global di media nasional dan internasional, Aceh diproyeksikan sebagai daerah yang fanatik dan radikal. “Ini sebenarnya tidak baru, karena terkait dengan peradaban Barat ketika mereka bertemu dengan Aceh (di masa lalu-red),

²³ WW. dengan salah seorang Tokoh Agama Buddha di Banda Aceh.

²⁴ WW. dengan salah seorang Tokoh Agama Kristen di Banda Aceh.

yang tidak mau tunduk. Sehingga mereka melabelkan orang Aceh itu sebagai fanatik dan radikal, sebagaimana terdapat di dalam catatan kolonial yang dapat kita akses hingga hari ini.”²⁵

Reza Indria juga berpendapat bahwa adagium yang mengatakan Aceh adalah Islam akan menjadi modal orang Aceh. Dengan menjadi Aceh, maka menjadi muslim toleran, menawarkan konsep harmonis, *tawazun* (seimbang) dan *tabayun* dalam mendengarkan berita. “Konsep itu sudah ada dalam Islam, namun proyek kita ke depan bagaimana kita membahaskan dengan bahasa yang lebih dekat dengan bahasa kita sehari-hari.”²⁶

Jika pandangan tersebut dikaitkan atau dilibatkan dalam konteks akademis, tentu saja peran PTKIN tidak dapat diabaikan. Terlebih lagi untuk wilayah Provinsi Aceh yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Provinsi Aceh memiliki beberapa PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri), di antaranya UIN Ar-Raniry Banda Aceh; IAIN Cot Kala Langsa; dan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Ketiga PTKIN ini juga didedikasikan untuk mampu mewujudkan tatanan kerukunan umat beragama di Aceh sembari mengemban misi Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai kewajiban utama.

Sebagai PTKIN terbesar di Provinsi Aceh, UIN Ar-Raniry memegang peran penting dalam konteks kerukunan umat beragama melalui program nasional moderasi beragama yang telah digulirkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian moderasi beragama sudah resmi menjadi program resmi yang harus dituangkan dalam sistem pendidikan tinggi di UIN Ar-Raniry, baik dalam muatan kurikulum pembelajaran, program-program kegiatan yang direncanakan, dan strategi pengembangan kelembagaan serta penguatan kapasitas SDM civitas akademika pada umumnya.

a. Potensi dan Sumber Daya di UIN Ar-Raniry

UIN Ar-Raniry Banda Aceh memiliki visi, misi, tujuan, dan motto (sesuai dengan PMA Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry) sebagai berikut:

Visi: Menjadi Universitas Yang Unggul dalam Pengembangan dan Pengintegrasian Ilmu Keislaman, Sains, Teknologi dan Seni.

Misi:

1. Melahirkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik, profesi dan/atau vokasi yang kompetitif, berorientasi pada masa depan dan berakhlak mulia.
2. Mengembangkan tradisi riset yang multidisipliner dan integratif berbasis syariat Islam.
3. Mengimplementasikan Ilmu untuk membangun masyarakat madani, yang beriman, berilmu dan beramal.

Tujuan :

1. Meningkatkan Kemampuan akademik yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman dan seni yang dijiwai nilai-nilai keislaman
2. Menyiapkan Mahasiswa agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlakul karimah
3. Membangun Kepribadian Civitas Akademika
4. Meningkatkan Mutu dan Budaya Akademik
5. Meningkatkan Mutu layanan Akademik dan keuangan
6. Meningkatkan Kemampuan dan Budaya Meneliti Dosen dan Mahasiswa
7. Meningkatkan Kemampuan Dosen dan mahasiswa dalam Pengembangan Pengabdian masyarakat
8. Meningkatkan Kualitas Kerjasama

²⁵ <https://staindirundeng.ac.id/2020/09/stain-meulaboh-bentuk-seuramoe-moderasi-beragama/>

²⁶ <https://staindirundeng.ac.id/2020/09/stain-meulaboh-bentuk-seuramoe-moderasi-beragama/>

9. Memberdayakan Potensi Alumni dalam proses pembangunan masyarakat
10. Memberikan akses Pendidikan bagi masyarakat marginal.²⁷

Selain visi, misi, dan tujuan tersebut, secara potensial UIN Ar-Raniry juga memiliki beberapa sumber daya yang dapat mendukung upaya untuk mewujudkan kerukunan umat beragama:

- a. Kurikulum Pembelajaran

Secara umum beberapa di beberapa prodi di UIN telah mengajarkan kurikulum yang bermuatan kerukunan umat Bergama, khususnya Prodi Studi Agama-agama, Prodi Sosiologi Agama, Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Prodi Manajemen Dakwah Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam dan Prodi Kesejahteraan Sosial.

Adapun komponen mata kuliah universitas yang wajib diambil oleh setiap mahasiswa telah bermuatan nilai dan prinsip kerukunan beragama, seperti Studi Syariat Islam, Ilmu budaya Dasar, Ilmu Kalam dan Dirasah Islamiah.²⁸

Hal ini sesuai dengan pendapat dari salah seorang Guru Besar di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Prof. Syamsul Rijal, bahwa Kurikulum UIN Ar-Raniry secara umum telah ada bermuatan kerukunan umat beragama, jika dilihat dari pilar-pilar kerukunan yang diajarkan di beberapa MK yang ada di PTKIN. Namun jika dilihat secara khusus tidak ada Kurikulum tentang kerukunan umat beragama di UIN A-Raniry.

Prof. Hamid Sarong menegaskan sudah seyogyanya PTKIN menjadi Pilar terdepan dalam mempelajari dan hadir di tengah-tengah Kehidupan Umat beragama untuk membina kerukunan beragama yang semakin mengerus saat ini. Sebab hampir semua muatan kurikulum UIN/ MK diajarkan dengan prinsip dan nilai-nilai keislaman, diharapkan akan lahir manusia terdidik yang bermanfaat bagi orang lain, seperti bagaimana seorang itu bisa berkomunikasi baik dengan orang lain, bagaimana seseorang itu bisa menghargai orang lain, bagaimana seseorang itu harus tolong-menolong dalam kehidupan dan nilai tolong menolong itu semua telah digariskan sama ada dalam studi keislaman maupun dalam antropologi dalam prinsip-prinsip sosial di masyarakat. Dengan demikian diharapkan dari ilmu-ilmu yang dikembangkan dalam kurikulum PTKIN dapat diterapkan oleh mahasiswa untuk menjadi individu yang memiliki Visi dasar menjadi insan yang hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membentuk kerukunan umat beragama dan moderasi beragama.²⁹

Prof. Hamid Sarong menjelaskan bahwa UIN Ar-Raniry telah lama mengaplikasikan pendidika kerukunan dalam kurikulumnya. Seperti Prodi perbandingan Mazhab, yang alah satu dasar pendidikannya dalah kerukunan intern agama dengan megenal berbagai mazhab yang dalam masysarakat Islam. Mealalui pemahaman mazhab yang mashur di masyarakat muslim, maka kita bisa tumbuh dan berkembang, serta beragama secara moderasi. Kita paham mazhab orang lain dan Kita paham tingkah orang lain, itulah yang disebut dengan bingkai moderasi. Tapi kalau kita ekstrim sendiri, kita hanya pentingkan pemahaman kita sendiri, tidak mau paham tentang pemahaman orang lain, disitulah timbulnya intoleransi. Kita mau menang sendiri hebat sendiri.

Beliau melanjutkan, “saya rasa betul kalau dulu tahun 70-an, angkatan 70-an di IAIN ini semua jurusan dan semua fakultas memperoleh mata kuliah perbandingan mazhab. Dulu dosennya pak Ismuha kuliahnya di Aula, Semua masuk di situ, siapa yang berani tampil kedepan menjelaskan perbandingan mazhab dia lulus, kalau belum berani nggak lulus-lulus. Walaupun bertahun-tahun ada kemungkinan 2 tahun baru lulus, ya begitu”. Menurut Prof. Hamid Sarong peran PTKIN itu sudah maksimal tinggal lagi mungkin mahasiswa atau yang terlibat dari PTKIN saat ini, belum dapat menghayati tentang ilmu

²⁷ <http://uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/visi-dan-misi>.

²⁸ *Buku Panduan Akademik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2019/2020.

²⁹ WW. dengan Prof. Dr. Syamsul Rijal, M.Ag (Guru Besar Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Araniry).

ilmu pengetahuan yang diajarkan saat ini. Ilmu pengetahuan luas sekali. Manusia dengan kemampuan yang terbatas hanya bisa memahami sebagian kecil dari kepingan-kepingan ilmu yang luas itu. Dengan kata lain, pemahaman terhadap sekeping ilmu itu jangan diperdebatkan dengan kepingan-kepingan pemahaman orang lain, karena orang lain memahaminya seperti yang lain lagi. Jadi jangan kita klaim yang kita paham itu yang benar, yang orang lain paham itu tak benar. Di situlah menurut kunci kesuksesan moderasi beragama.³⁰

Adapun figur kerukunan beragama yang berasal dari UIN, menurut Prof. Hamid Sarong, adalah Alm. Prof. Ismuha yang menulis buku, menerjemahkan buku berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Salah satu bukunya adalah *Pengantar Perbandingan Mazhab* sebanyak dua jilid. Dan beliau mengajarkan tentang perbandingan Mazhab dalam bahasa Arab. Dengan buku dan langsung diajarkan penulisnya kita akan sangat mudah untuk memahami dengan sebenar pemahaman. Saat ini jarang kita temukan dosen sekaliber beliau.

Selanjutnya saran Prof. Hamid Sarong adalah perlunya usaha PTKIN untuk menyempurnakan kurikulum yang ada, dengan narasi buku-buku rujukan yang yang tepat. Tidak hanya narasi informasi-informasi ilmu pengetahuan yang muncul secara liar tanpa dibingkai dengan narasi yang dibingkai ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kearifan lokal kebinekaan bangsa Indonesia.

b. Renstra dan Program Kerja

Walaupun selama ini UIN Ar-Raniry telah banyak melakukan program kerja terkait dengan kerukunan beragama di masyarakat, namun belum maksimal dan terstruktur. Sebagaimana yang diutarakan Prof. Syamsul Rijal, bahwa selama ini PTKIN belum begitu serius dalam pengembangan program kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi UIN terkait kerukunan beragama.

Karena apa yang beliau amati selama ini dalam mengorganisir dan mendesain organisasi tidak cukup hanya satu dua kali seminar melalui daring, namun harus ada fokus grup diskusi (FGD) yang yang tersistematis dan berkesinambungan. Kaitan pendalaman konsep terkait kerukunan di Aceh, penelitian guna melihat persoalan sosiologi di masyarakat, menganalisis dengan kepakaran masing-masing bidang ilmu, sehingga dapat dipetakan problematika sekaligus memberikan solusi kepada apa yang diperoleh di lapangan. Aktivitas yang terstruktur, sistematis dan berkesinambungan akan membantu pimpinan universitas, Dosen, mahasiswa bahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan publik saat ini.

Seperti halnya Prof. Syamsul Rijal, Prof. Hamid Sarong menambahkan bahwa Renstra yang ada sudah tidak *up to date* lagi, sudah lama mungkin, maka diperlukan renstra baru. Perlu dibuat kerangka-kerangka toleransi, seperti rumah toleransi atau rumah moderasi beragama yang ada itu belum cukup, tidak cukup dengan gambar-gambar, tidak cukup dengan fragmentasi fragmentasi, tidak cukup dengan contoh-contoh, namun harus dilengkapi dengan kerangka berpikir dalam bingkai ilmiah dalam narasi intelektual yang baik. Sehingga diharapkan Renstra yang ada dapat dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal yang unik. Arahkan isinya tergantung pada PT masing-masing, di Aceh berbeda dengan di Sumatera Utara, berbeda dengan di Lampung, berbeda dengan di Jawa, jangan disamaratakan dan diseragamkan. Moderasi beragama masing-masing daerah itu ada ciri khas sendiri, harus dibangun, dibina dan dipupuk agar masyarakat bisa hidup secara aman dan damai.³¹

c. Tenaga Pengajar/Dosen

³⁰ WW. dengan Prof. Dr. A. Hamid Sarong (Guru Besar FSH UIN Ar-Raniry/Ketua FKUB Aceh).

³¹ WW. dengan Prof. Dr. A. Hamid Sarong (Guru Besar FSH UIN Ar-Raniry/Ketua FKUB Aceh).

Keberadaan SDM dari UIN Ar-raniry selama ini sangat diperhitungkan dalam pembentukan kerukunan umat beragama di Aceh. Beberapa orang Dosen UIN menjadi pengurus FKUB di provinsi dan Kabupaten Kota. ada yang menjadi ketua dan sebagian besar anggota. Sebagian dari mereka ada menjadi nara sumber di beberapa event terkait kerukunan umat beragama dan sebagian lagi menjadi Juru Dakwah, relawan dan fasilitator dalam sosialisasi dan pembinaan sikap kerukunan umat beragama di masyarakat. Namun sering sekali kegiatan yang dilakukan oleh SDM UIN dilakukan secara pribadi bukan atas nama penugasan dari PTKIN.

Menurut Prof. Hamid Sarong, sudah banyak SDM UIN yang berkiprah di ranah kerukunan umat beragama. Saya kira kalau diterjemahkan sampai ke tingkat moderasi beragama sampai ke tingkat toleransi itu sudah banyak dosen UIN yang berkiprah di perguruan tinggi di Aceh bahkan Indonesia. Bahkan menurutnya seorang dosen harus mendalami persoalan-persoalan seperti toleransi dan moderasi Beragama yang ada saat ini. Seorang dosen tidak cocok seorang dosen UIN membangun pemahaman-pemahaman ekstrem sementara dia berada di dalam perguruan tinggi lingkup PTKIN.

d. Penelitian Dosen

Adapun sumbangsih keilmuan dan akademik SDM PTKIN terdapat pengembangan kerukunan umat beragama di Aceh cukup membanggakan. Ada sejumlah penelitian yang dilaksanakn oleh Pusat penerbitan dan penelitian UIN Ar-Raniry, diantaranya, buku dinamika kerukunan umat beragama di masyarakat aceh (Ushuluddin Press), sikap toleransi beragama siswa SMU di Banda Aceh (Jurnal Substantia, 2019), dll.

e. Lembaga Rumah Moderasi Beragama

Menteri Agama Jenderal (Purn) Fachrul Razi meresmikan Rumoh Moderasi UIN Ar-Raniry, Senin, 14 Desember 2020. Rumoh Moderasi menjadi jalur untuk menyebarkan nilai-nilai keberagaman dan kerukunan di Aceh. Ia mengatakan, soal kerukunan di Aceh sudah selesai. Hanya saja saatnya Aceh menyebarkan nilai-nilai keberagaman ke daerah lainnya.

Sikap moderasi sangat penting bagi suatu bangsa. Ia menjelaskan, moderasi beragama telah masuk dalam Rancangan Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, UIN Ar-Raniry.

UIN Ar-Raniry telah lama mengimplementasikan konsep moderasi ini yang mengacu kepada Renstra tersebut dengan nama Rumoh Moderasi. Hal ini juga sejalan dengan visi UIN kita yaitu: Menjadi Universitas yang Modern dalam Keislaman, Kebangsaan dan Keuniversalan.

Menurut Prof. Hamid Sarong, rumah moderasi beragama itu hanya fragmen-fragmen saja. fragmen kepingan-kepingan dari makna pelaksanaan moderasi yang luas. Maka perlu didasari dengan intelektual pengetahuan yang cukup kalau tidak ia tidak banyak manfaatnya, akan menjadi mainan-mainan saja, puranya, ditonjolkan sekedar pencitraan. Menurutnya fragmen yang ada tersebut mesti dilengkapi dan dikawal secara baik yang melibatkan dosen, mahasiswa dan masyarakat yang di bangun diatas nasari inteltual dan kearif lokal masyarakat Aceh. Rumah moderasi di PTKIN adalah rumah yang diisi oleh bagi kaum intelektual dengan dasar ilmu yang mantab. Seperti pertanyaan mengapa kita harus memahami pemahaman orang, Kenapa kita harus memahami agama orang, apa kita harus menghormati dia, kita hormati dia, pertanyaan ini dapat di jawab dengan memeberi contoh bahwa agama kita ini menentramkan sebagaimana kita ikuti semua ajaran Rasulullah. Jika kita mengikuti ajaran Rasulullah, maka tidak ada masalah dalam kehidupan bermasyrkat. Bagaimana Rasulullah bisa bertingkah laku yang menyenangkan orang Yahudi, menyenangkan orang Nasrani, sehingga orang-orang yang seperti itu Ingat kepada rasul Nabi Muhammad. Katakanlah mereka tidak berpindah agama tapi ingat dia bahwa itu orangnya baik sekali, orangnya terpercaya sebelum Nabi Muhammad diresmikan sebagai Rasul, Nabi Muhammad sudah terkenal

sebagai orang jujur sebagai orang percaya. Sebagai pribadi yang terhormat, kenapa kita tidak mampu bilang bahwa saya adalah pengikut Rasulullah yang mulai, agar tingkah laku kita juga akan mendamaikan dan menyenangkan orang lain selain itu sesuai dengan syariat Islam.³²

Selain itu, juga dilaksanakan Workshop Moderasi Beragama bagi Dosen UIN Ar-Raniry, mengambil Tema *Moderasi Beragama: Strategi Penetrasi Pemahaman Nilai Keagamaan dalam Pendidikan Tinggi Islam*. berlangsung empat hari, yaitu 22-25 Juni 2021 yang diikuti 160 dosen dari berbagai disiplin ilmu. Narasumber Workshop Dr. Ahmad Suaedy, Dekan Fakultas Islam Nusantara, Universitas Nahdatul Ulama, Jakarta dan Dr. Junaidi Simun, Manager Riset dan Advokasi, Institut Titian Perdamaian (ITP), Jakarta.³³

Menurut Ketua Panitia, Khatib A. Latief, tujuan dilaksanakan workshop ini untuk menelusuri gagasan dan pemikiran moderasi beragama yang dapat diterapkan dosen di dalam proses pembelajaran dan mencari langkah-langkah dinamis untuk membangun moderasi beragama dalam kerangka pluralisme bangsa. Diharapkan dari workshop ini dapat (1) teridentifikasi gagasan perumusan moderasi beragama yang kontekstual dengan kultur Aceh yang religus; (2) lahir rumusan umum moderasi beragama dalam Pendidikan tinggi Islam di Aceh; (3) teridentifikasi langkah-langkah dinamis, berkeadilan, dan berimbang dalam penerapan moderasi beragama di dunia pendidikan di Aceh; (4) mampu menumbuhkan kembangkan sikap toleransi dan akomodatif terhadap nilai religusitas agama dalam budaya Aceh.

Menurut Narasumber Workshop Dr. Ahmad Suaedy, Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Islam mengatakan beberapa alasan mengapa Moderasi Beragama penting. *Pertama*, tidak bisa disangkal bahwa tradisi nusantara dan Indoensia menempatkan agama dan kepercayaan sebagai elemen yang sangat penting. Karena itu suatu usaha perubahan yang tidak mengikutkan agama sangat sulit untuk mencapai keberhasilan. Namun mengikutkan agama tidak selalu berarti menetapkan elemen-elemen ajaran agama konvensional atau mapan dalam ranah publik atau pemerintahan melainkan bisa dengan mereview atau mengkritiknya agar nilai-nilai dan juga kelembagaan agama sejalan dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan memberikan kontribusi bagi solusi berbagai problem dalam masyarakat mutakhir.

Kedua, fenomena adanya radikalisme dan terorisme yang mengancam kekerasan dan pemusnahan manusia berbasis pada agama. Namun radikalisme dan terorisme tidak bisa ditempatkan sebagai sumber utama dari masalah itu sendiri. Ia lebih sebagai akibat. Maka harus dicari sebab fund amental dari fenomena tersebut. Tradisi peran agama di dalam pemerintahan nusantara ini dianggap bertentangan dengan tradisi di barat yang sekularistik. Maka kini harus dicari cara baru atau revitalisasi peran agamawan dan elemen-elemen agama dalam sistem bernegara dan berpemerintahan.

Ketiga, era disrupsi dan TI (Teknologi Informasi) mengancam stabilitas masyarakat karena tiadanya atau terhapusnya otoritas dalam masyarakat dan budaya termasuk otoritas agama, hukum dan negara bahkan metodologi ilmu pengetahuan. Sehingga terjadi polarisasi yang kompleks dalam masyarakat. Siapa yang kuat dan menguasai teknologi maka itulah yang menang. Ini bukan hanya membahayakan sistem kenegaraan dan pemerintahan melainkan juga sosial, budaya dan kemanusiaan. Perlu dicari suatu pola dan nilai-nilai baru yang bisa diterima oleh masyarakat "zaman now" dengan karakter teknologi informasi dan disrupsi tersebut. Program MB harus bisa menempatkan pada pencarian solusi itu.

³² WW. dengan Prof.Dr. A.Hamid Sarong (Guru Besar FSH UIN Ar-Raniry/Ketua FKUB Aceh).

³³ <http://www.uin-ar-raniry.ac.id/index.php/id/posts/uin-ar-raniry-banda-aceh-laksanakan-workshop> - moderasi-beragama.

Keempat, Indonesia begitu luas dan begitu plural dan multikultural dan ciri paling utama adalah kepulauan, sehingga tidak mudah untuk memahami dasar-dasar bersama dan tidak mungkin dibangun sistem terpusat dengan mengabaikan yang kecil, pinggiran dan lemah. Karena itu, bentuk MB diharapkan bisa menyerap perbedaan-perbedaan tersebut namun di lain pihak bisa dibangun suatu titik temu dan kesadaran bersama yang baru. Di sini perguruan tinggi diharapkan memberi peran dalam terbangunnya basis etika bersama dan baru tersebut.

Kelima, Islam memiliki sejarah yang panjang dan mendalam di nusantara dan Indonesia. Namun tingkat ketebalan dan perannya serta dimensinya berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain. Aceh, misalnya, berbeda dengan Jawa, Makassar, NTB dan seterusnya.

Namun Islam juga tidak hanya memperkenalkan model institusi dan pengetahuan yang mapan melainkan Islam juga berkembang dalam rangka menjawab tantangan zaman tersebut. Maka perguruan tinggi Islam sangat diharapkan perannya dalam membangun dan mengoperasikan program MB tersebut. Sehingga MB bukan suatu formula teh botol atau coca-cola melainkan setiap daerah bisa dan bahkan harus memiliki pola dan ukurannya sendiri. Dari sana bisa dibangun suatu dialog yang terus menerus dan menuntun negara dan pemerintahan dalam menjawab berbagai tantangan tersebut.

Program Moderasi Beragama bukan hanya menjawab tentang radikalisme keagamaan melainkan problem kemanusiaan. Karena itu pula moerasi beragama bukan semacam mata kuliah akhlak dan bukan hanya berlaku bagi negara dan pemerintah melainkan diharapkan menjadi "cara berpikir, bersikap, dan berperilaku setiap warganegara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka, sesungguhnya dalam konteks perguruan tinggi apalagi perguruan tinggi agama Islam moeras beragama ini bukan hanya menanamkan apalagi indoktrinasi melainkan diperdebatkan baik dalam nilai-nilai asasi, metodologinya maupun strateginya sesuai dengan landasan negara dan bangsa serta tantangan-tantangannya.

Sementara narasumber ke dua Dr. Junaidi Simun, Manager Riset dan Advokasi, Institut Titian Perdamaian (ITP), Jakarta. Menjelaskan, bahwa Moderasi beragama adalah upaya dan proses peletakan pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang dilakukan secara benar, seimbang, dan fungsional. Upaya dan proses ini diyakini dimiliki semua agama namun karena berada pada tataran non substansial ajaran agama menyebabkan multitafsir dan keliru implementasinya. Karenanya moderasi beragama adalah upaya pengembalian pemahaman individu beragama ke moderat; bukan memoderatkan agama.

Islam sendiri menawarkan konsep tentang moderasi beragama, yaitu mengambil jalan tengah (*tawassuth*), berkeseimbangan (*tawazun*), lurus dan tegas (*i'tidal*), toleransi (*tasamuh*), egaliter (*musawah*), musyawarah (*Syura*), reformasi (*Ishlah*), dan mendahulukan (*aulawiyah*), dan dinamis dan inovatif (*tathawwur wa Ibtikar*). Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Dosen merupakan elemen penting karena pendidikan tinggi dianggap media yang paling penting, strategis, efektif, dan sekaligus rentan diseminasi pemahaman yang keliru baik tentang ajaran agama maupun teori kehidupan lain.

b. Potensi dan Sumber Daya di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Demikian halnya STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, kendati dengan kapasitas yang relatif berbeda dengan UIN Ar-Raniry juga memiliki beberapa potensi dan sumberdaya yang dapat mendukung kerukunan beragama.

Secara fundamental, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh memiliki visi, misi, tujuan, dan motto (sesuai dengan PMA Nomor 55 Tahun 2016 tentang Statuta STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh) sebagai berikut:

1. Visi: "Menjadi institusi pendidikan yang unggul dan kompetitif dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman".
2. Misi: "Melahirkan sarjana yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam rahmatan lil' alamin."
3. Tujuan: a) meningkatkan pemerataan dan memperluas akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan tinggi keislaman; dan b) meningkatkan kualitas dan pelaksanaan syariat Islam di wilayah barat selatan Aceh.
4. Moto: "keikhlasan, inovatif, dan berakhlak mulia".³⁴

Jika ditelaah secara seksama, visi misi dan motto tersebut mencerminkan aspek kerukunan dan moderasi beragama. Salah seorang mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh mengatakan: "Kerukunan Beragama adalah saling menghormati masing masing agama tanpa ikut campur tangan dalam agama antar agama, seperti sabda Rasulullah "untukmu agamamu, dan untukku agamaku".³⁵

Secara lebih konstruktif, beberapa potensi dan sumber kerukunan beragama yang dimiliki STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dapat dideskripsikan sebagai berikut.

a. Kurikulum Pembelajaran

Inayatillah, Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh menjelaskan bahwa moderasi beragama juga perlu dikembangkan di lembaga pendidikan, dalam hal ini dapat dilakukan melalui penguatan kurikulum Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Kewarganegaraan dan lainnya. Selain itu juga harus didukung dengan kemampuan tenaga pendidik dalam menanamkan paradigma moderasi kepada mahasiswa.³⁶

Inayatillah melanjutkan, dari segi pemerintah, selain melalui aturan-aturan, nilai-nilai moderasi beragama harus diaktualisasikan lewat sikap bernegara, beragama dan berbangsa oleh pejabat pemerintah, sehingga menjadi teladan bagi milenial.

"Dengan adanya pendidikan dan pembinaan yang baik, maka akan melahirkan milenial-milenial dengan karakter moderat yang mampu membawa perubahan di tengah-tengah masyarakat," jelasnya.³⁷

Menurut keterangan dari Jannatin Nisa, aktivis mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, di mata kuliah Aqidah Akhlak mereka pernah belajar mengenai kerukunan beragama, akan tetapi tidak secara difokuskan, hanya sepintas dikarenakan materi mata kuliah menyangkut tentang sikap dan akhlak yang baik bagi seorang muslim.³⁸ Maysarah, juga aktivis Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, mengatakan: Saya pernah belajar sejarah peradaban Islam, Filsafat, disitu diajarkan kita untuk bersikap belas kasih dan betapa indahnya Islam tanpa kerusakan, implementasi dari mata kuliah tersebut saya lihat sudah mulai dijalankan oleh kabupaten Aceh Barat sendiri.³⁹

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sendiri sangat berperan Ketika mahasiswanya mampu untuk bisa memberi pemahaman bahwa tidak ada yang perlu diributkan dalam hal agama, seperti ayat "lakum dinukum waliyadin" 'bagimu agamamu bagiku agamaku' dan Ketika dosen memberikan ilmu yang berkaitan dengan hal kerukunan disitulah peran STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam membangun pemahaman saling cinta, saling menghormati, saling belas kasih terhadap sesama umat, walaupun tidak ada mata kuliah yang dikhususkan mengulas kerukunan beragama.⁴⁰

³⁴ <https://staindirundeng.ac.id/visi-dan-misi/>

³⁵ WW. Maya Sartika, Ketua Dema STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

³⁶ <https://staindirundeng.ac.id/2020/09/stain-meulaboh-bentuk-seuramoe-moderasi-beragama/>

³⁷ <https://staindirundeng.ac.id/2020/09/stain-meulaboh-bentuk-seuramoe-moderasi-beragama/>

³⁸ WW. dengan Jannatin Nisa, aktivis mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

³⁹ WW. dengan Maysarah, aktivis Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

⁴⁰ WW. dengan Maysarah, aktivis Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Menurut Maya Sartika, Ketua Dema STAIN STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, mereka diajarkan kerukunan oleh dosen di sela sela mata kuliah agama, namun tidak ada silabus yang berfokus dalam pembahasan Kerukunan beragama yang saya tahu.⁴¹ Kendati demikian, secara implisit STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh memiliki muatan kurikulum yang bersentuhan dengan aspek kerukunan, toleransi, dan moderasi beragama. Beberapa mata kuliah bermuatan tersebut, di antaranya: 1) Pancasila dan Kewarganegaraan; 2) Konsep Dasar Akidah Akhlak; 3) Syariat Islam Di Aceh; 4) Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5) Civic Education; 6) Komunikasi Antar Budaya dan Agama; 7) Etika dan HAM dalam Pekerjaan Sosial; 8) Resolusi Konflik; dan 9) Studi Multikulturalisme.⁴²

b. Organisasi Mahasiswa

Di kampus STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sendiri setahu saya belum ada pembekalan kerukunan beragama, bahkan ada mahasiswa yang menolak dalam moderasi beragama, menurutnya moderasi adalah mencampur adukkan ajaran agama kita dengan yang lain, padahal saya belajar moderasi itu untuk diajarkan toleransi dengan agama lain saling menghormati dan menjaga kesatuan. Salah satu contoh dari kalangan mahasiswa yang berbeda pendapat adalah saat takziah ke rumah orang meninggal, dimana di daerahnya (simeulu) ketika berkunjung ke tempat duka, yang membawakan makanan adalah orang yang datang berkunjung bukannya si Tuan rumah seperti disini.⁴³ Maya Sartika, Ketua Dema STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, mengatakan bahwa pernah ada kegiatan moderasi yang saya ikuti akan tetapi bukan pihak kampus yang adakan, tetapi dari pihak luar yang meminta mahasiswa ikut kegiatannya, kalau dari pihak kampus sendiri belum ada saya rasa. Untuk UKK/UKM cuma organisasi KAMMI yang lebih fokus membahas tentang keberagamaan, sementara UKK/UKM lain tidak ada, tetapi banyak anggota SEMA yang lebih religius saat telah bergabung dalam organisasi.⁴⁴

Khusus untuk para mahasiswa, Seuramoe Moderasi Beragama STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sudah merancang program penyusunan buku terkait moderasi beragama, namun realisasinya belum berjalan efektif.⁴⁵

Kalau untuk kegiatan seminar atau lainnya mungkin ada diadakan oleh kampus tapi mungkin hanya saya saja yang kurang informasi, tapi kampus pernah mengutus mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Dialog Lintas agama, untuk penyelenggaraan saya belum tahu ada atau tidaknya kampus adakan. Dalam organisasi menulis yang saya ikuti pernah juga terdapat tulisan tentang keberagamaan, akan tetapi tidak difokuskan dalam kerukunan, dan juga ada forum Cinta yang membahas filsafat.⁴⁶

c. Seuramoe Moderasi Beragama

Seuramoe Moderasi Beragama merupakan unit kajian khusus yang disiapkan untuk mengkaji isu-isu terkait moderasi beragama di Aceh dan Indonesia. Unit ini berada di bawah Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.⁴⁷

Pembentukan Seuramoe Moderasi Beragama STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh ditandai dengan Webinar sesi 9 “Moderasi Beragama dan Tantangan di Era Disrupsi.” Webinar ini menghadirkan tiga pemateri sekaligus, yaitu Rektor UIN Syarif Hidayatullah

⁴¹ WW. Maya Sartika, Ketua Dema STAIN STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

⁴² *Buku Pedoman Akademik STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh*, Tahun 2018.

⁴³ WW. Maya Sartika, Ketua Dema STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

⁴⁴ WW. Maya Sartika, Ketua Dema STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

⁴⁵ WW. dengan M. Ikhwan, Ketua Seuramoe Moderasi Beragama STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

⁴⁶ WW. dengan Maysarah, Aktivis Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

⁴⁷ <https://staindirundeng.ac.id/2020/09/stain-meulaboh-bentuk-seuramoe-moderasi-beragama/>

Jakarta, Amany Lubis, Antropolog sekaligus dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Reza Idria dan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Inayatillah.⁴⁸

Ketua Seuramoe Moderasi Beragama STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, M. Ikhwan, mengatakan bahwa keberadaan unit kajian moderasi beragama sesuai dengan instruksi pemerintah dalam rencana strategis Kementerian Agama. Ia menyampaikan, Seuramoe Moderasi Beragama STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh nantinya akan fokus pada kajian-kajian terkait moderasi beragama melalui pendekatan kearifan lokal. Selain kajian dan pembinaan, unit ini nantinya juga akan menghasilkan penelitian-penelitian tentang moderasi. "Sehingga nantinya dapat dijadikan rujukan dalam penyelesaian masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat," ujar M. Ikhwan saat memandu Webinar.⁴⁹

Seuramoe Moderasi Beragama STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah secara internal seperti webinar, yang diikuti dosen dan mahasiswa. Meskipun belum sepenuhnya efektif lantaran suasana covid dan refocusing anggaran, menyebabkan kiprah dan kegiatan yang direncanakan tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian lembaga ini juga telah memprogramkan beberapa kegiatan strategis ke depan, dengan harapan dapat terlaksana dengan baik.⁵⁰

Kendati program moderasi beragama sudah dicanangkan dan Seuramoe Moderasi Beragama sudah didirikan, dosen-dosen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh belum memiliki persepsi yang sama tentang kerukunan atau toleransi beragama,. Hanya segelintir dosen yang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan kerukunan atau moderasi beragama.⁵¹

Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Inayatillah mengatakan, milenial sebagai generasi yang sangat dekat perangkat teknologi harus mendapatkan pembinaan secara serius dalam penanaman nilai-nilai moderasi beragama. Terlebih di tengah-tengah gempuran informasi seperti saat ini.⁵² Dan selaku lembaga pendidikan tinggi Islam, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh harus berperan sebagai "menara air" yang mengaliri setiap hikmah bagi masyarakat. "Pada akhirnya, menjadi *center of excellence* bagi pembangunan dan perbaikan umat,". Inayatillah mengatakan, sebagai *agent of social change* dan harapan umat, mahasiswa selaku generasi muda harus disiapkan dengan sebaik mungkin, terutama dari segi pengetahuan berbangsa, bernegara dan beragama.⁵³

c. Potensi dan Sumber Daya di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa memiliki visi dan misi dalam upaya pengembangan kelembagaan dan SDM untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Visi IAIN ini adalah: "Menjadi pusat kajian keislaman yang berkarakter rahmatan lil alamin". Adapun misi yang diemban meliputi: 1) menghasilkan sarjana Islam yang berwawasan dan berintegritas; 2) menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas; dan 3) melaksanakan pengabdian yang kreatif, inovatif, dan produktif.⁵⁴

Disamping visi dan misi tersebut, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa juga memiliki potensi dan sumber daya yang dapat dikembangkan untuk mewujudkan kerukunan umat beragama. Beberapa potensi dan sumber tersebut adalah:

a. Kurikulum Pembelajaran

⁴⁸ <https://staindirundeng.ac.id/2020/09/stain-meulaboh-bentuk-seuramoe-moderasi-beragama/>

⁴⁹ <https://staindirundeng.ac.id/2020/09/stain-meulaboh-bentuk-seuramoe-moderasi-beragama/>

⁵⁰ WW. dengan M. Ikhwan, Ketua Seuramoe Moderasi Beragama STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

⁵¹ WW dengan Muhajir, Dosen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

⁵² <https://staindirundeng.ac.id/2020/09/stain-meulaboh-bentuk-seuramoe-moderasi-beragama/>

⁵³ <https://staindirundeng.ac.id/2020/09/stain-meulaboh-bentuk-seuramoe-moderasi-beragama/>

⁵⁴ <https://iainlangsa.ac.id/pages/visi-dan-misi>.

IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa memiliki beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan aspek kerukunan atau moderasi dalam kehidupan beragama. Beberapa mata kuliah tersebut yaitu : 1)Pancasila; 2)Ilmu Dakwah; 3)Metode Studi Islam; 4)Pendidikan Kewarganegaraan; 5)Aklak Tasawuf; 6)Hadis Dakwah; 7)Tafsir ayat-ayat dakwah; 8)Komunikasi Islam; 9)Penyuluhan syari'at islam.⁵⁵

Melihat pada muatan mata kuliah tersebut secara tidak langsung berhubungan dengan aspek kerukunan beragama. Meskipun tidak terdapat kurikulum kerukunan beragama di IAIN tersebut, mata kuliah dan pembelajarannya sebagiannya bermuatan kerukunan beragama.

b. Program dan Kegiatan Internal

Salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa adalah Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) dalam rangka penerimaan mahasiswa baru setiap tahunnya. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2021 diawali dengan sambutan menteri agama Yaqut Cholil Qoumas tentang moderasi beragama. Mahasiswa Baru (Maba) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa diharapkan mampu menjadi agen moderasi beragama ditengah kehidupan bermasyarakat.⁵⁶

Kegiatan tersebut dapat menjadi stimulus bagi para mahasiswa dalam menekuni pendidikan yang terarah pada kerukunan hidup dalam beragama. Sebagai calon-calon *agent of social change* mahasiswa dipersiapkan dan dibekali dengan muatan kerukunan dan moderasi beragama.

Selain itu, kegiatan tentang moderasi bergama juga digelar oleh Itjen Kemenag dengan menghadirkan Nasumber pertama Rektor IAIN Langsa, Basri. Basri menyampaikan dalam paparannya ada beberapa langkah strategis yang bisa dijalankan oleh IAIN Langsa untuk terwujudnya moderasi beragama; *pertama*, moderasi beragama harus menjadi perhatian sivitas kademika dalam menyusun rencana pengembangan strategis kelembagaan. *Kedua*, melibatkan komponem dan unsur perguruan tinggi dalam memperkuat nilai- nilai kemanusiaan, nilai-nilai kerukunan beragama, dan moderasi beragama. *Ketiga*, mengembangkan literasi keagamaan (*religious literacy*) dan pendidikan lintas iman (*interfaith education*). *Keempat*, perguruan tinggi keagamaan memperbanyak praktik pengalaman keagamaan yang berbeda sehingga kita bisa menjalin kerja sama antar pemeluk agama.

“Upaya yang dilaksanakan pada IAIN Langsa dalam rangka pembinaan ASN yang berintegritas yakni pembinaan melalui tugas dan fungsi bagi ASN, pengembangan kurikulum yang kontekstual dan dinamis, pembentukan rumah moderasi beragama, pelatihan-pelatihan tentang moderasi beragama, kajian-kajian keagamaan yang dinamis, membangun semangat silaturahmi dan forum interaksi sosial, kebijakan penelitian dan publikasi yang mencerminkan moderasi beragama, dan kegiatan pengabdian masyarakat yang damai dan komunikatif,”⁵⁷

3. Partisipasi PTKIN dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama

Menurut Reza Indria, sebagai sebuah konsep, jika merujuk kepda ilmu sosial, berbanding lurus dengan peradaban Barat. Bahkan jika ditelisik lebih jauh, sangat berkaitan dengan orang Barat menilai peradabannya dan problem-problemnya sendiri. “Jika hari ini, berbicara mengenai moderasi beragama seakan ditujukan bagi Islam dan muslim,

⁵⁵ <https://fuad.iainlangsa.ac.id/pages/kurikulum>

⁵⁶ <https://iainlangsa.ac.id/detailpost/menag-harap-maba-iain-langsa-mampu-menjadi-agen-moderasi-beragama>.

⁵⁷ <http://itjen.kemenag.go.id/web/wujudkan-moderasi-beragama-iain-langsa-dan-kankemenag-kota-palugunakan-langkah-strategis>

sebenarnya konsepnya sendiri berasal dari Barat," jelas Reza. Reza menyampaikan, meski begitu, dalam Islam sendiri para ilmuwan sangat sering menyerukan kembali konsep *washatiyah*. Konsep *ummatan wasatan*, umat yang berada di tengah. "Namun tengah yang seperti apa? ini menjadi suatu kajian dan proyek kita bersama"⁵⁸

Sinyalemen tersebut terkait erat dengan kelembagaan Islam, PTKIN, dan juga eksponen PTKIN itu sendiri, sebagaimana keterlibatan dosen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam forum FKUB Aceh Barat. Salah seorang dosen senior, mantan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, terlibat aktif dalam forum FKUB dan dialog kerukunan bergama, beliau bahkan pernah menjadi pengurus FKUB. Juga Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yang menjabat sekarang, selalu terlibat aktif dalam forum dan kegiatan tentang kerukunan beragama di Aceh Barat, baik yang diselenggarakan oleh FKUB maupun pihak pemerintah daerah setempat.⁵⁹

Selain para dosen, beberapa mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh juga ikut serta dalam kegiatan-kegiatan tentang kerukunan beragama. Maya Sartika, Ketua Dema STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, mengatakan: "Saya pernah ikut kegiatan Moderasi Beragama yang diselenggarakan oleh Kemenag RI bagi organisasi kemahasiswaan lintas agama di Banda Aceh, disana saya lihat sikap peserta antar agama sangat toleran dan menghormati, berbeda dengan di kampus STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sendiri yang mana mahasiswa dalam satu agama saja terkadang intoleran dalam berpendapat. Dalam aspek internal beragama, saya bisa melihat dari kampus STAIN sendiri khususnya dalam ruang kelas saya, terkadang menjadi suatu tantangan juga bagi mahasiswa dalam menyatukan pendapat jika menyangkut pembahasan mengenai agama, dimana mahasiswa STAIN juga berasal dari berbagai daerah yang kental agama, misalnya Abuya, Simeulu, dll sehingga mereka memiliki mazhab sendiri dan tentu saja mempertahankan pendapatnya, dan seringkali dikarenakan perbedaan pendapat ini menjadi suatu ketidakharmonisan antar mahasiswa itu sendiri."⁶⁰

Peran Lembaga STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam mewujudkan kerukunan umat beragama adalah Ketika STAIN mampu menjadi penghubung antar ummat yang mana STAIN bisa menunjukkan bahwasanya Lembaga Pendidikan yang berlandaskan Islam tidak anti toleransi akan tetapi juga bisa menjadi wadah pemerhati dan menyatukan antar umat beragama, salah satunya juga dengan mengirimkan delegasi mahasiswa dalam kegiatan moderasi dan kegiatan lainnya yang diadakan oleh Kemenag Aceh Barat ataupun lembaga lain.⁶¹

Jannatin Nisa, aktivis mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, mengatakan bahwa Organisasi yang pernah diikuti di dalam kampus adalah HMJ dan HMP, diluar kampus berkecimpung dalam organisasi HMI dan belajar tentang kepemimpinan, cara memecahkan masalah, *public speaking* dan kegiatan agamis lainnya. Untuk secara khusus terlibat dengan FKUB tidak ada, namun secara garis besar HMI yang merupakan forum keislaman yang mana ketika basic training di HMI ada diberikan materi tentang bagaimana cara menghadapi anggota dalam forum yang berbeda keyakinan dengan kita untuk saling bertoleransi atau bisa dikatakan cara untuk bertoleransi dengan umat lain yaitu dengan tidak membicarakan hal-hal yang sensitif atau menjaga etika secara norma atau agama dengan mereka, karena HMI juga melibatkan seluruh aspek masyarakat baik muslim dan/ataupun non muslim untuk dijadikan informer untuk kegiatan HMI salah satunya kegiatan Pemeliharaan dan Kesejahteraan Wanita yang di selenggarakan oleh Kohati HMI.⁶²

⁵⁸ <https://staindirundeng.ac.id/2020/09/stain-meulaboh-bentuk-seuramoe-moderasi-beragama/>

⁵⁹ WW. dengan M. Ikhwan, Ketua Seuramoe Moderasi Beragama STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

⁶⁰ WW. Maya Sartika, Ketua Dema STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

⁶¹ WW. dengan Jannatin Nisa, aktivis mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

⁶² WW. dengan Jannatin Nisa, aktivis mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Demikian halnya Maysarah, aktivis Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, aktif dalam organisasi kampus yaitu Formadiksi (ketua), KIP Kuliah, Firqah Literasi Tuas, luar kampus ada organisasi Inong Literasi, dan penulisan cerpen. Dia pernah terlibat ikut Dialog Lintas Agama di Kecamatan dengan tema Moderasi Beragama dalam Mengikis Intoleransi' yang diadakan oleh Kemenag Aceh Barat. Yang diutuskan mewakili oleh kampus pada agustus 2021 lalu.⁶³

4. Keterlibatan PTKIN dalam Tata Kelola Kerukunan Umat Beragama

Reza Idria menjelaskan bahwa moderasi beragama yang dipromosikan pemerintah saat ini merupakan satu konsep tidak hanya ditujukan bagi umat Islam saja, namun untuk semua pemeluk agama.⁶⁴ Reza menambahkan, ketika berbicara *washatiyah*, maka akan ada penengah yang memiliki kewenangan menjadi pengadil, menjadi orang yang menegakkan hukum. Menurutnya, Aceh memiliki banyak aturan, mulai dari surat edaran hingga qanun, namun aturan-aturan tersebut tidak ditegakkan. Padahal semestinya negara berperan sebagai penegak hukum.⁶⁵

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, H. Khairul Azhar, S.Ag mengatakan, pemerintah wajib menjaga dan menjamin keamanan masyarakat untuk bebas menganut agama yang ditetapkan oleh pemerintah. "Pemerintah wajib menjaga dan menjamin keamanan masyarakat untuk bebas beribadah," ungkapnya. Khairul mengatakan, di Kabupaten Aceh Barat tingkat toleransi antar umat beragama masih sangat tinggi, dengan menghargai perbedaan yang ada.⁶⁶

Asisten bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Setdakab Aceh Barat Mawardi SH membuka rapat koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam rangka menjalin sinergitas kehidupan beragama bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Barat yang digelar di ruang rapat Bupati Aceh Barat pada Rabu (14-07-2021). Rapat FKUB yang di inisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Aceh Barat ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpol Aceh Barat, unsur Forkopimda Aceh Barat, perwakilan Kemenag Aceh Barat, para tokoh lintas agama, tokoh adat, serta para anggota FKUB Kabupaten Aceh Barat. Mawardi mengatakan bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama merupakan tugas bersama yang melekat pada setiap umat beragama serta Pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan, mengatur, serta memberdayakan umat beragama yang di akomodir oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ini paparnya.⁶⁷

Salah satu upaya Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia adalah membentuk FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Struktur dan elemen keanggotaan FKUB tidak hanya didominasi oleh umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia. Terdapat juga elemen non-muslim yang menjadi bagian penting FKUB, yang berasal dari Agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu.

Secara hirarkhis struktur organisasi FKUB terpusat di Jakarta (tingkat pusat/nasional) yang diderivasi ke tingkat provinsi dan dijabarkan ke tingkat kabupaten dan kota. Untuk tingkat nasional FKUB dibentuk oleh Pemerintah Pusat melalui koordinasi kementerian terkait, dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga nasional lainnya. Sedangkan di tingkat

⁶³ WW. dengan Maysarah, Aktivis Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

⁶⁴ <https://staindirundeng.ac.id/2020/09/stain-meulaboh-bentuk-seuramoe-moderasi-beragama/>

⁶⁵ <https://staindirundeng.ac.id/2020/09/stain-meulaboh-bentuk-seuramoe-moderasi-beragama/>

⁶⁶ <https://infopublik.id/kategori/nusantara/394094/tingkatkan-kerukunan-beragama-di-aceh-barat-kemenag-aceh-adakan-dialog-lintas-agama?show=>

⁶⁷ <https://www.acehbaratkab.go.id/berita/kategori/berita/pemkab-aceh-barat-perkuat-fkub-antisipasi-potensi-konflik>.

provinsi FKUB dibentuk oleh Pemerintah Provinsi, seperti halnya di wilayah provinsi Aceh yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh. FKUB Provinsi Aceh terpusat di Kota Banda sebagai ibukota provinsi.

Di wilayah Aceh Barat, FKUB dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten setempat. Disamping berafiliasi dan berkoordinasi dengan pihak pemerintah, FKUB juga bekerjasama dengan berbagai lembaga terkait atau *stakeholder* lainnya termasuk PTKIN yang terdapat di sana (STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh) sebagaimana tercermin dari visi dan misi kelembagaannya. Akan tetapi di dalam kenyataannya visi dan misi tersebut belum dapat diwujudkan secara efektif - untuk tidak mengatakan maksimal, karena terbentur oleh berbagai faktor.

FKUB menjalankan misi nasional dalam rangka implementasi Pancasila, dan berdasarkan UUD 45. Setiap sila dari Pancasila mencerminkan kerukunan dan kedamaian bagi seluruh bangsa Indonesia, dan hal ini harus mampu kita wujudkan. Dan terlebih penting lagi adalah FKUB melaksanakan misi Islam itu sendiri dalam mewujudkan *Rahmatan Lil'alam*, misi ini bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.⁶⁸

FKUB Aceh Barat juga mengadakan dialog-dialog intern dan antaragama yang melibatkan berbagai kalangan terkait. Kegiatan ini dilaksanakan secara triwulan, semesteran, dan terkadang pada waktu tertentu secara khusus. Dalam kegiatan ini FKUB juga mengundang elemen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, seperti Abi Samsuar (Mantan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh) dan M. Ikhwan (Ketua Seuramoe Moderasi Beragama).⁶⁹

Di satu sisi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mensupport lembaga FKUB dan berupaya mengimplementasikan program moderasi beragama sebagai amanah Pemerintah Pusat. Namun di sisi lain Pemerintah Daerah tidak mampu mereduksi otoritas dan dominasi kalangan Dayah yang tidak moderat, atau bahkan melindungi dan memelihara kelompok Dayah demi melestarikan kekuasaan (yang didukung oleh kalangan Dayah sebagai mayoritas).

Namun terlepas dari sikap ambiguitas pemerintah daerah terhadap keberadaan FKUB, FKUB telah memainkan peran sebagai instrumen utama kerukunan umat beragama. FKUB memang didekasikan untuk kepentingan kerukunan hidup umat beragama dalam berbagai aspeknya.

Salah satu komponen pendukung utama FKUB adalah PTKIN sebagai produsen gagasan, teori, dan konsep-konsep akademik yang secara normatif dibutuhkan oleh FKUB. PTKIN seharusnya ikut berperan secara proaktif, bekerjasama dengan FKUB dan Lembaga lainnya, karena memiliki potensi dan sumberdaya yang konstruktif untuk perwujudan kerukunan umat beragama.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Kerukunan beragama di Aceh relatif belum menggembirakan, belum sesuai dengan harapan, sebagaimana di Banda Aceh, Kota Langsa, dan Aceh Barat, kendati di wilayah-wilayah tersebut sudah terdapat FKUB dan PTKIN.
- b. Secara umum, kondisi kehidupan umat beragama di Aceh masih tergolong kondusif jika dilihat dari perspektif pemahaman kaum mayoritas (yang berbasis muslim tradisional) sebagai penghuni wilayah dengan jumlah populasi terbesar.

⁶⁸ WW. dengan Ketua FKUB Aceh Barat.

⁶⁹ WW. dengan Ketua FKUB Aceh Barat.

- c. PTKIN di Aceh (UIN Ar-Raniry Banda Aceh; IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa; dan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh) memiliki potensi dan sumber daya yang besar untuk dapat mewujudkan kerukunan beragama di Aceh.
- d. Terdapat unit atau lembaga khusus “Rumah Moderasi Beragama” yang didedikasikan untuk mengentaskan problematika kehidupan umat beragama dan mewujudkan kerukunan dan moderasi beragama.
- e. Secara umum PTKIN di Aceh ((UIN Ar-Raniry Banda Aceh; IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa; dan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh) turut-serta, berpartisipasi dalam kancah perwujudan kerukunan umat beragama di Aceh, kendati masih dalam taraf yang belum maksimal.
- f. Keterlibatan PTKIN (secara formal dan kelembagaan) dalam kaitan tersebut masih sangat terbatas dan belum sebanding dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki.
- g. Partisipasi PTKIN dalam hal ini bahkan tercermin dari peran eksponen atau elemen PTKIN (dosen, aktivis, civitas) yang secara individual terlibat aktif dalam kepengurusan FKUB, MPU, program-program pemerintah yang berorientasi pada perwujudan kerukunan umat beragama.
- h. Secara kelembagaan PTKIN di Aceh (UIN Ar-Raniry Banda Aceh; IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa; dan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh) belum melakukan intervensi dalam proses tatakelola kerukunan umat beragama di Aceh.
- i. Hanya eksponen PTKIN (dosen, aktivis) yang berperan aktif dalam proses tatakelola kerukunan beragama di Aceh, yang secara individual memiliki intervensi dan memainkan peran dan keaktoranannya.

E. Saran-saran

1. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi rujukan untuk pengembangan kajian-kajian terkait kerukunan umat Beragama di Aceh untuk ke depan.
2. Perlu dilakukan kajian-kajian yang lebih mandalam tentang problematika kerukunan umat Bergama dengan berbagai perspektif dan pendekatan.

Bibliografi

- A.T. Talib and Sarjit S. Gill, “Socio-Religious Tolerance: Exploring the Malaysian Experience”, *Global Journal of Human Social Science*, Volume 12, Issue 8, Version 1.0 May 2012.
- Ammar Fadzil, “Religious Tolerance in Islam: Theories, Practices and Malaysia’s Experiences as a Multi Racial Society”, *Journal of Islam in Asia*, Spl. Issue, No.3, September 2011, p.p. 347-348.
- Ari Ganjar Herdiansah, “Public Policy And Religious Conflict In Indonesia: The Case Of Ahmadiyah”, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 1, No. 1, Maret 2016, p.p.79-90.
- Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, *Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama: Kapasitas Kelembagaan dan Efisiensi Kinerja FKUB terhadap Kerukunan Umat Beragama*, Editor: Ibnu Hasan Muchtar & Farhan Muntafa, Jakarta, 2015.
- Chris Wilson, *Ethno-religious Violence in Indonesia From Soil to God*, Routledge, New York, 2008.
- Endah Siswati, “Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci”, *Jurnal Translitera*, Edisi 5/2017, p.p. 11-33.
- Hanna Onyi Yusuf, “Promoting Peaceful Co-Existence and Religious Tolerance through Supplementary Readers and Reading Comprehension Passages in Basic Education

- Curriculum", *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 3 No. 8 [Special Issue - April 2013], p.p.224-232.
- HD Centre, *Conflict Management Strategies in Indonesia: Learning from the Poso Experience*, Workshop Report, Centre for Humanitarian Dialogue (HD Centre) and the Indonesian conflict management organisation, Institut Titian Perdamaian (ITP), 8 December 2009.
- <https://nasional.tempo.co/read/1143019/menag-lukman-budaya-dan-agama-dibenturkan-indonesia-bisa-runtuh/full&view=ok>.<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/11/28/p03ov7396-kemenag-akan-perkuat-peran-forum-kerukunan-umat-beragama>.
- https://www.vice.com/id_id/article/ev3k3a/banda-aceh-tempuh-jalur-hukum-saat-dicap-kota-intoleran-apakah-kota-lain-bakal-ikutan, diakses pada 14 Desember 2018.
- Khotimah, "Religious Harmony and Government in Indonesia", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 23, No. 1, Juni 2015.
- Lampiran I: Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 - 2019.
- Maarif Institute, *Indeks Kota Islami Indonesia*. Maarif Institute for Culture and Humanity, Jakarta.
- Marsudi Utoyo, "Akar Masalah Konflik Keagamaan di Indonesia", *Jurnal Lex Librum*, Vol.III, No.1, Desember 2016, p.p. 367-376.
- Marzuki, *Konflik antar Umat Beragama di Indonesia dan Alternatif Pemecahannya*, Makalah Disampaikan Pada Seminar tentang Revolusi Konflik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Senin 20 November 2006.
- Muhammad Anang Firdaus, "Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia", *Kontekstualita*, Vol. 29, No.1, 2014, p.p.63-84.
- Nur Syam, *Peran PTKIN dalam Membangun Harmoni Sosial di Era Milenial*, Makalah Disampaikan dalam diskusi di STAIN Sorong, 11-10-2018.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor: 9 Tahun 2006, dan Nomor: 8 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2006.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Peran Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama*, Cetakan Pertama, Editor: Bashori A. Hakim, Jakarta, 2013.
- Retnowati, "Agama, Konflik, dan Integrasi Sosial (Integrasi Sosial Pasca Konflik Situbondo)", *Jurnal "Analisa"*, Volume 21 Nomor 02 Desember 2014, p.p.189-200.
- Setara Institute, *Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran Tahun 2018*. SETARA Institute for Democracy and Peace, Jakarta, 7 Desember 2018.
- Sintha Wahjusaputri, "Religion Conflicts in Indonesia: Problems and Solutions", *Sociology Study*, December 2015, Vol. 5, No. 12, p.p. 931-936.
- Syahrin Harahap, Katimin, Sahdin Hasibuan, "The Phenomenon of Social and Religious Conflicts in Tanjungbalai, Medan, Indonesia", *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, Volume 22, Issue 8, Ver. VI (August. 2017), p.p. 31-39.
- Syamsul Hadi, *Abdurrahman Wahid: Pemikiran tentang Kerukunan antar Umat Beragama di Indonesia*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.
- Ulum, Raudhatul dan Budiyono, *Survey Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Tahun 2015*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2015.
- Umi Sumbulah dan Nurjanah, *Pluralisme Agama Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan antar Umat Beragama*, Malang: UIN-MALIKA PRESS, Malang, 2013.



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111
Telp 0651-7552921, 7551857 Situs: www.ar-raniry.ac.id e-mail: puslit@ar-raniry.ac.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Safrihsyah, S.Ag, M.Si
2. NIPN : 197004201997031001
3. NIDN : 2020047001
4. Alamat : Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 672/Un.08/R/Kp.00.4/08/2021 Tanggal 2 Agustus 2021 tentang Penetapan Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPIPKM) pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021, dan dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan/ Kontrak yang telah saya tanda tangani pada tanggal 18 Agustus 2021 Nomor: 981/PPK-UIN/PUSLIT/VIII/2021, mendapatkan anggaran bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPIPKM) yang bersumber dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 pada klaster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi, dengan Nomor Registrasi: 211070000045370, dan dengan judul "Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi" sebesar Rp. 35.700.000,- (*Tiga puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*).

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Biaya pelaksanaan kegiatan **penelitian** di bawah ini meliputi:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian	Rp. 35.700.000,-
2.	Analisis Data serta Ekspose Hasil	
3.	Pelaporan serta pelaksanaan <i>output</i> dan <i>outcome</i>	
Jumlah		Rp. 35.700.000,-

Terbilang: *Tiga puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*

2. Biaya sebagaimana tersebut pada angka 1, 2 dan 3 benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 5 Oktober 2021
Tertanda,




METERAI TEMPEL
4DEAJX375967889

Dr. Safrihsyah, S.Ag, M.Si
NIDN. 2020047001

LEMBAR PENYERAHAN LUARAN DAN/ATAU *OUTPUT*
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH ATAU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PADA PUSLITPEN LP2M UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2021

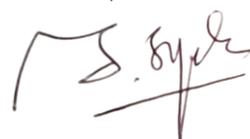
NO.	IDENTITAS	URAIAN
1	Nama Ketua Peneliti	Dr. Safrilsyah, S.Ag, M.Si
2	NIDN	2020047001
3	ID Peneliti	20101100112001
3	Nama Anggota Peneliti	1. Dr. Fuad, S. Ag, M. Hum 2. Maimun Fuadi, S. Ag, M.Ag
4	Klaster	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
5	Nomor Registrasi	211070000045370
6	Judul Laporan	PERAN PTKIN DALAM MEWUJUDKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI ACEH
7	Jumlah Halaman	65 Halaman
8	Judul Draft Artikel/Buku <i>(Bukan Judul Penelitian)</i>	PERAN PTKIN DALAM MEWUJUDKAN TOLERANSI BERAGAMA DI ACEH
8	Jumlah Halaman	25 Halaman
9	Capaian Luaran	1. Laporan Penelitian/ Laporan Kegiatan/ Laporan Pengabdian * <i>(wajib sesuai juknis dan kontrak)</i> 2. HKI <i>(wajib sesuai juknis dan kontrak)</i> 3. Publikasi Jurnal <i>(wajib sesuai Juknis dan Kontrak)</i>
10	Rencana Publikasi pada <i>(Tulis Kategori Jurnal luaran atau penerbit buku sesuai Juknis dan Kontak) **</i>	Contoh: Tajdid Jurnal Ilmu ushuluddin dan Terakreditasi Sinta 3 serta Terindek DOAJ dan Moraref
11	HKI***	1. Nomor Permohonan: 2. Nomor Pencatatan: 3. Pengajuan Ciptaan dilakukan melalui Sentra HKI UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

* *Pilih Sesuai Kategori Kegiatan*

** *Bukti fisik artikel dan atau buku yang dipublikasikan wajib diserahkan ke puslitpen dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan juknis.*

*** *Di isi oleh pihak Puslitpen berdasarkan list daftar dari pihak Sentra HKI UINAR.*

Banda Aceh, 2 Oktober 2021
Peneliti,



(Dr. Safrilsyah, S.Ag, M.Si)

**SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN OUTCOME
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Safrilsyah, S.Ag, M.Si
NIDN : 2020047001
NIPN (ID Peneliti) : 20101100112001
Jabatan dalam Penelitian : Ketua Peneliti
Pangkat/ Golongan : Pembina/(IV/a)
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala dalam bidang Psikologi Agama
Program Studi : Psikologi
Fakultas : Psikologi
Anggota Peneliti : 1. Dr. Fuad, S. Ag, M. Hum
2. Maimun Fuadi, S. Ag, M.Ag

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

No. Registrasi : 211070000045370
Judul Penelitian : Peran PTKIN dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama di Aceh
Kategori Penelitian : Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
Jumlah Dana : Rp. 35.700.000,00
Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Tahun Anggaran : 2021
Outcome : Publikasi pada Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi Sinta 3, sesuai dengan kategori penelitian dan ketentuan yang berlaku pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Saya bersedia dan berjanji akan menyelesaikan dan menyerahkan *outcome* dari hasil penelitian saya sebagaimana tersebut di atas dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan/ Kontrak yang telah saya tanda tangani. Jika target *outcome* tersebut belum dan atau tidak bisa saya penuhi, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan dalam keadaan sadar serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 12 Oktober 2021

Yang Menyatakan,


Safrilsyah, S.Ag, M.Si
NIDN. 2020047001